

**KEBIJAKAN MAHATHIR MOHAMAD DALAM SISTEM
PEREKONOMIAN MALAYSIA 1981-2003**



Skripsi

Oleh:

Duwi Rahmadi

K 4401022

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2006

KEBIJAKAN MAHATHIR MOHAMAD DALAM SISTEM
PEREKONOMIAN MALAYSIA 1981-2003

Oleh:

DUWI RAHMADI

K 4401022

Skripsi

Ditulis dan diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar

Sarjana Pendidikan Program Sejarah

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2006

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.



Persetujuan Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nunuk Suryani, M. Pd

NIP : 131 918 507

Drs. Djono, M. Pd

NIP : 131 884 432

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta dan diterima untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan.

Pada Hari : Rabu

Tanggal : 12 April 2006

Tim Penguji Skripsi:

Nama Terang

Tanda tangan

Ketua : Dra. Sri Wahyuning S., M. Pd

.....

Sekretaris : Drs. Saiful Bachri, M. Pd

.....

Anggota I : Dr. Nunuk Suryani, M. Pd

.....

Anggota II : Drs. Djono, M. Pd

.....

Disahkan oleh
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sebelas Maret
Dekan,

Drs. Trisno Martono, M.M

NIP 130 529 720

ABSTRAK

Duwi Rahmadi. **KEBIJAKAN MAHATHIR MOHAMAD DALAM SISTEM PEREKONOMIAN MALAYSIA 1981-2003**. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, 2006.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan : (1) kondisi perekonomian Malaysia sebelum Mahathir, (2) implementasi kebijakan Mahathir Mohamad, (3) pengaruh kebijakan Mahathir Mohamad terhadap perekonomian Malaysia.

Penelitian ini menggunakan metode historis. Langkah-langkah yang ditempuh dalam metode historis ada empat tahap kegiatan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Sumber data yang digunakan adalah sumber tertulis

yang meliputi dokumen atau arsip, ensiklopedi dan buku-buku. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah analisis historis yaitu analisis yang mengutamakan ketajaman dalam menginterpretasikan fakta sejarah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Perekonomian Malaysia sebelum Mahathir Mohamad berorientasi pada usaha-usaha pencapaian laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan melakukan investasi besar-besaran dalam sektor pertanian, prasarana dan pembangunan pedesaan. Terjadi konflik rasial pada tahun 1969, golongan masyarakat Melayu (bumiputera) merasa tidak puas dengan hasil pembangunan yang dicapai. Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata lebih banyak menguntungkan golongan non-Melayu, sedangkan masyarakat Melayu semakin jauh tertinggal dalam proses pembangunan. (2) Implementasi kebijakan Mahathir mengarah pada usaha memajukan tingkat kehidupan masyarakat Melayu yang dilandaskan pada program yaitu usaha mengurangi bahkan menghapuskan kemiskinan serta mengadakan restrukturisasi masyarakat. Mahathir ingin menjadikan Malaysia suatu negara industri dengan mengemukakan konsep dan ide-ide baru seperti Kebijakan Pandang Ke Timur dan Kebijakan Pembangunan Nasional dan Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (RRJP2). (3) Pengaruh kebijakan Mahathir Mohamad terhadap perekonomian Malaysia adalah laju pertumbuhan ekonomi berkembang rata-rata 7,0% per tahun, walaupun ekonomi mengalami krisis keuangan pada tahun 1997-

1998. Target yang dicapai tidak mengesampingkan tujuan dari *New Economic Policy* yaitu memberantas kemiskinan dan restrukturisasi masyarakat dapat dicapai meski terdapat hambatan. Terjadi perubahan orientasi yang dahulu berbasis pada sektor agraris menjadi pembangunan ekonomi berbasis industri dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai acuan untuk menuju negara maju pada tahun 2020.

MOTTO

“We must have perfectly clear in our minds, that we must be a developed country in our own mould. Modernisation is not Westernisation or Japanisation or Easternisation or Asianisation”
(Dato’ Seri Dr. Mahathir Mohamad)

“Carilah ilmu, maka keadaanmu akan menjadi tinggi, kedudukanmu akan terangkat, kemuliaanmu akan bertambah dan engkau akan terhitung dalam orang terhormat”
(Muhammad Ahmad)

PERSEMBAHAN



Karya ini saya persembahkan kepada:

- ❖ Ibu dan Ayah tercinta
- ❖ Kakak, Nenek, Paman sekeluarga
- ❖ Almamater

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Azza Wa Jalla, penulis panjatkan karena Hidayah dan Rahmat-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan, untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan .

Banyak hambatan yang penulis hadapi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, namun berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya kesulitan yang timbul dapat teratasi. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin untuk menyusun skripsi.
2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang telah menyetujui atas permohonan skripsi ini.

3. Ketua Program Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan pengarahan dan ijin atas penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Nunuk Suryani, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing I, yang dengan kesabarannya dan pengertian telah memberikan petunjuk, masukan dan saran.
5. Bapak Drs. Djono, M. Pd. selaku Dosen Pembimbing II, atas saran dan kritik yang diberikan sehingga skripsi ini dapat disusun dengan baik.
6. Segenap staf pengajar Program Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta.
7. Kepala Kedutaan Besar Malaysia, khususnya Bapak Priyanto dan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
8. Kepala Monumen Pers Surakarta.
9. Semua pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun material yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan yang diberikan.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih ada kekurangan sehingga segala kritik dan saran senantiasa penulis harapkan. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan

Surakarta, 12 April 2006

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Malaysia merupakan salah satu negara perintis ASEAN dengan luas 329,758 km² terletak antara lintang 1⁰ sampai 7⁰ Utara dan garis bujur 100⁰ sampai 119⁰ Timur dengan suhu rata-rata 21⁰C hingga 32⁰C (Buku Resmi Tahunan Malaysia, 2002: 1), mempunyai dua kawasan utama yang terpisah oleh Laut China Selatan yaitu Malaysia Barat (Semenanjung Malaysia), berbatasan dengan Thailand di utara dan Singapura di selatan dan Malaysia Timur, di bagian utara Pulau Borneo (Kalimantan) yang berbatasan dengan Indonesia di selatan dan Brunei di utara. Semenanjung Malaysia berkembang sebagai pusat perdagangan utama di Asia Tenggara, karena berkembangnya perdagangan antara China dan India dan negara lainnya melalui Selat Malaka yang. Selat Malaka adalah suatu bidang perairan yang sempit yang terletak di antara Semenanjung Malaysia (Malaysia Barat) dan Pulau Sumatera (Indonesia). Dari segi ekonomi dan strategis, Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia, sama pentingnya seperti Terusan Suez atau Terusan Panama. Selat Malaka membentuk jalur pelayaran terusan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta menghubungkan tiga dari negara-negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia: India, Indonesia dan China. Lebar Selat Malaka hanya 1,5 mil laut pada titik tersempit, yaitu Terusan Phillips di Selat Singapura, merupakan salah satu dari kemacetan lalu lintas terpenting di dunia. (www.wikipedia.org).

Malaysia meraih kemerdekaan dari Inggris pada 31 Agustus 1957 dengan memakai sistem demokrasi parlementer, yaitu pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen nasional yang dipilih setiap lima tahun sekali dan yang menjabat

perdana menteri biasanya ketua partai politik yang memenangkan pemilihan umum. (Buku Resmi Tahunan Malaysia, 2002: 8).

Pada tahun 1957 penduduk semenanjung Malaya hanya terdiri dari penduduk asli dan para pendatang. Penduduk Malaysia asli jumlahnya kurang dari 50% dibanding jumlah seluruh penduduk, sedang penduduk Cina berjumlah 37 %, dan sisanya orang India serta sebagian kecil orang Pakistan dan Srilangka. Pembentukan federasi Malaysia tahun 1963 menambah jumlah penduduk Cina karena Singapura bergabung ke dalam federasi tetapi diimbangi oleh penduduk Sabah dan Serawak yang dalam politik nasional bersekutu dengan penduduk semenanjung. Keluarnya Singapura dari federasi Malaysia tahun 1965 merubah keseimbangan penduduk asli. Menurut sensus tahun 1970, penduduk bumiputera meningkat 55,5% (suku Melayu 46,8% dan penduduk asli lainnya 8,7%), sementara penduduk non bumiputera 44,5% terdiri dari Cina 34,1%, India 9% dan lainnya 1,4%. Jumlah penduduk Malaysia pada sensus 2000 berjumlah 23,27 juta dengan penduduk Melayu 61%, penduduk Cina 30%, penduduk India 8% dan lain-lain 1%. (Buku Resmi Tahunan Malaysia, 2002: 6).

Penduduk suku Melayu tidak hanya berjumlah besar tetapi juga homogen. Semua orang Melayu berbahasa Melayu dan Muslim meski terdiri dari berbagai macam dialek, tetapi dalam bahasa tertulis mereka memakai bahasa baku. Di sisi lain, orang Cina dan India terdiri dari berbagai suku, agama dan induk budaya yang berlainan satu sama lain. Di antara orang Cina sebagian kecil beragama Kristen, sedangkan kelompok lainnya beragama Buddha, Kong Hu Cu dan Taoisme yang masing-masing mempunyai simbol dan aliran sebagai identitas komunalnya. Orang India (7%) dan umumnya beragama Hindu yang secara kultural dan bahasa yang dipakai heterogen. Kelompok masyarakat Cina yang terbesar (Hokkian) berjumlah sepertiga dari penduduk Cina, disusul penduduk yang berasal dari Kanton, Hakka, Teochiu dan kelompok-kelompok kecil lainnya yang mempunyai kultur dan bahasanya sendiri. Orang India

umumnya berasal dari Tamil (hampir 85%), Malayalam, Telugu dan Sikh. Di Malaysia Timur penduduk Cina merupakan kelompok minoritas, berbeda dengan penduduk bumiputera dan non bumiputera yang muslim dan non muslim dan terdiri dari banyak kelompok, bahasa, adat istiadat dan mempunyai kepekaan identitas kelompok yang mencolok. Kebanyakan dari mereka mengamalkan kepercayaan tradisional tetapi kini pada abad ke 20 telah ramai yang sudah bertukar kepada Kristian atau memeluk Islam. Selain itu, Malaysia juga mempunyai penduduk yang berasal dari Eropa (dipanggil "Serani") dan Timur Tengah. (www.wikipedia.org).

Hampir semua negara sedang berkembang yang memperoleh kemerdekaan setelah Perang Dunia II, menghadapi masalah kesukuan, rasial atau juga agama. Hal ini juga dihadapi Malaysia yang terkotak dalam kelompok Melayu, Cina dan India. Secara sederhana dapat dikatakan kolonial telah menciptakan masyarakat Melayu menjadi kelas bawah di negeri sendiri.

Setelah kemerdekaan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman (1951-1971), masalah pengelompokan ras segera muncul dalam kebijakan pembangunan. Para pemimpin Melayu yang sejak awal sangat prihatin terhadap nasib kaumnya, memberi prioritas pada pembangunan pedesaan yang tidak lain adalah membangun orang Melayu. Rencana pembangunan Malaysia diperinci secara jelas dalam rencana pembangunan lima tahunan, dimana sepanjang sejarahnya sebagai garis pedoman pembangunan Malaysia. Perencanaan pembangunan di Malaysia sebelum tahun 1970-an ternyata belum berhasil, karena golongan Melayu merasa tidak puas dengan hasil pembangunan yang dicapai yang dianggap lebih menguntungkan golongan non-Melayu. Ketidakpuasan ini mencapai puncaknya dalam Konflik rasial pada 13 Mei 1969 (Kompas, 27 Agustus 1986: IV). Peristiwa rasial ini memaksa para pemimpin Malaysia untuk meninjau kembali strategi pembangunannya.

Tunku Abdul Rahman merupakan tokoh karismatik di Malaysia, namun pamor politik dan pengaruhnya semakin merosot terutama sesudah peristiwa 13 Mei 1969 yang merupakan krisis rasial yang terbesar di negara ini yang melibatkan tiga kaum utama yaitu Melayu, Cina dan India. Pada tahun 1971, pada masa pemerintahan Perdana Menteri Tun Abdul Razak Hussein (1971-1976) lahir suatu kebijaksanaan ekonomi baru bagi Malaysia atau *New Economic Policy* (NEP) suatu pola kebijaksanaan jangka panjang 20 tahun (1971-1990). Kebijaksanaan ekonomi baru ini mempunyai dua tujuan yaitu: (1) memberantas kemiskinan dan mengusahakan kesempatan kerja yang lebih banyak untuk rakyat tanpa memandang asal-usulnya; (2) mempercepat proses perubahan struktur masyarakat untuk memperbaiki keadaan ekonomi yang tidak seimbang, sehingga penyamaan peran ekonomis tertentu dengan ras dapat dikurangi dan akhirnya dihapus (*The Second Outline Perspective Plan 1991-2000*, 1991: 7). Akan tetapi Tun Abdul Razak meninggal dunia di tengah perjalanan kebijaksanaannya dapat dituntaskan, maka rencana tersebut dilanjutkan oleh penggantinya Perdana Menteri Tun Hussein Onn (1976-1981). Pada rencana Malaysia ketiga (1976-1980) yang dikeluarkan pada pertengahan tahun 1976 setelah tertunda akibat kematian Tun Razak, baru peranan Hussein Onn dapat terlihat. Suatu perkembangan penting yang terlihat dalam rencana baru ini adalah kesadaran bahwa dominasi Melayu dalam pemerintahan mewujudkan suatu kebijakan untuk menggunakan badan-badan instansi yang lebih luas seperti: *Perbadanan Nasional Berhad* (PERNAS), *Majelis Amanah Rakyat* (MARA) dan *Urban Development Authority* (UDA) guna membantu Melayu agar bisa lebih bersaing. Kepemimpinan Hussein Onn hanya berlangsung sampai dengan pertengahan tahun 1981, karena alasan kesehatan dan digantikan oleh Mahathir Mohamad.

Peranan Perdana Menteri Malaysia dalam pembuatan kebijaksanaan ekonomi adalah terpenting sebagaimana halnya dalam kebijaksanaan penting lainnya termasuk kebijaksanaan luar negeri. Perdana Menteri Mahathir Mohamad

(1981-2003) berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang di hadapi, berbagai kebijakan dibuat untuk menjadikan Malaysia negara maju. Mahathir adalah arsitek utama dari berbagai kebijakan yang populer seperti *Look East Policy* (LEP) atau Kebijakan Pandang ke Timur dan secara pribadi adalah penggerak utama yang terlihat langsung dalam pembuatan kebijaksanaan dan impiementasinya. Perdana Menteri Mahathir Mohamad mendesak masyarakat Malaysia untuk memandang secara bersamaan kepada Jepang dan Korea Selatan baik inspirasi, metode dan keahlian serta bersaha menandingi dan belajar dari etos dan sikap kerja mereka dalam rangka kemajuan ekonomi negara dimasa yang akan datang. Operasionalisasi dari *Look East Policy* yaitu : Kebijakan Industri Berat, Kebijakan Perubahan Jumlah Penduduk, Privatisasi, *Malaysia Incorporation* dan Kebijakan Pertanian Negara. Setelah *New Economic Policy* berakhir mahathir mengeluarkan Kebijakan Pembangunan Nasional dan Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (RRJP2) 1991-2000. Pergeseran ke arah ekonomi berbasis ilmu pengetahuan merupakan bagian dari rencana yang lebih komprehensif untuk mencapai status negara maju pada tahun 2020.

Stabilitas makro ekonomi Malaysia di bawah kepemimpinan Mahathir dapat dijaga. Inflasi turun dari sekira 10% pada tahun 1981 (saat Mahathir mulai memimpin Malaysia) menjadi hanya sekitar 0,3% di tahun 1983. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan stabil juga terjadi pada hampir sepanjang dekade 1990-an. Sejak 1988 laju pertumbuhan selalu di atas 8% dan pada tahun 1989, 1990, 1994 dan 1995 bahkan di atas 9,0% pertumbuhan pendapatan per kapitanya merupakan salah satu yang tertinggi di Asia Pasifik kecuali tahun 1992 mencapai 7,8%. Sebagai akibatnya gerak pembangunan cepat laju pengangguran menurun dan pendapatan perkapita Malaysia meningkat secara signifikan (Pikiran Rakyat, 6 Februari 2004: 21). Mahathir tidak asal membuat rencana, karena hasil yang diperoleh sangat fantastis. Antara lain, tingkat kemiskinan disemua etnis turun drastis dari 49,30% pada tahun 1970 menjadi 15% pada tahun 1990. Selain itu

tingkat pemilikan modal kalangan Melayu dalam dunia usaha terus naik dari 2,4% tahun 1970 menjadi 20,3% pada 1990. Angka kemiskinan penduduk juga menurun drastis dari 35% pada tahun 1982 menjadi 5% pada tahun 1992, semua hal di atas terus menaik hingga saat ini. (Pikiran Rakyat, 6 Februari 2004: 14).

Pada tahun 1998 Malaysia terkena krisis ekonomi yang mengakibatkan perekonomiannya berkontraksi sebesar 7,4%. Walaupun demikian, ekonomi Malaysia telah berhasil kembali ke trend pertumbuhan pesatnya. Hal ini disebabkan berbagai hal, di antaranya menetapkan nilai tukar uang tetap/*fixed rate* (USD1.00=RM3.80), menolak bantuan IMF, tingkat bunga yang relatif rendah, meningkatnya pendapatan sektor pemerintahan dan swasta sebagai akibat dari kebijakan-kebijakan ekonomi terdahulu, akses terhadap kredit yang lebih luas, dan kebijakan fiskal yang ekspansioner. (Pikiran Rakyat, 6 Februari 2004: 21).

Mahathir telah berhasil membangun suatu negara yang dahulunya miskin dan terkotak-kotak secara rasial menjadi negara yang modern melalui kebijakan industrialisasi, yang mengkombinasikan program-program pemerintah dengan investasi swasta. Malaysia kini merupakan negara dengan lingkungan bisnis yang kondusif dan mampu mengundang investasi baru bukan hanya di sektor industri pengolahan, tetapi juga di sektor-sektor industri yang padat teknologi dan ilmu pengetahuan. Malaysia telah menjadi suatu negara industri yang memanfaatkan secara maksimal diversifikasi dan pertumbuhan ekonomi. Malaysia telah beralih dari negara yang tadinya hanya bersandarkan pada pertanian menjadi suatu negara yang berlandaskan industri, teknologi, dan ilmu pengetahuan. (Pikiran Rakyat, 28 Januari 2004: 7).

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai permasalahan seputar perekonomian Malaysia dalam penulisan skripsi dengan judul **“KEBIJAKAN MAHATHIR MOHAMAD DALAM SISTEM PEREKONOMIAN MALAYSIA 1981-2003”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kondisi perekonomian Malaysia sebelum pemerintahan Mahathir Mohamad ?
2. Bagaimanakah implementasi kebijakan Mahathir Mohamad ?
3. Bagaimanakah pengaruh kebijakan Mahathir Mohamad terhadap perekonomian Malaysia ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam hubungannya dengan rumusan masalah di atas maka dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Kondisi perekonomian Malaysia sebelum Mahathir Mohamad.
2. Implementasi kebijakan Mahathir Mohamad.
3. Pengaruh kebijakan Mahathir Mohamad terhadap perekonomian Malaysia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Melatih untuk berpikir secara analisis sistematis, menambah khasanah ilmiah dan sumbangan pemikiran tentang sejarah luar negeri khususnya Malaysia.
 - b. Memperluas wacana pemikiran dan pengetahuan peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya tentang Kebijakan

Mahathir Mohamad Dalam Sistem Perekonomian Malaysia 1981-2003.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana pendidikan pada Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- b. Dapat mengambil hikmah atau pelajaran dari negara lain terutama dalam peningkatan perekonomian bagaimana sebuah negara yang majemuk dan berkembang dapat menjadi sebuah negara yang maju.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Sistem Pemerintahan

a. Pengertian Sistem Pemerintahan.

Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua kata yaitu sistem dan pemerintahan. Sistem adalah keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang merupakan hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan ini menimbulkan ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya bila salah satu bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhan itu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas; susunan teratur dari pandangan teori asas dan sebagainya.

Pamudji (1992: 9) mengartikan sistem sebagai suatu kebulatan atau keseluruhan yang utuh, dimana di dalamnya terdapat komponen-komponen yang

pada gilirannya merupakan sistem tersendiri, yang masing-masing fungsi saling berhubungan satu dengan yang lain menurut pola, tata norma tertentu dalam mencapai tujuan. Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu keseluruhan dari bagian-bagian yang terintegrasi, berkaitan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Secara etimologi kata pemerintahan berasal dari kata pemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari kata perintah. Menurut Pamudji (1989) perintah adalah perkataan yang bermaksud melakukan sesuatu. Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu. pemerintah adalah kekuasaan memerintah suatu negara atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara. Pemerintahan adalah perbuatan (cara, hal urusan dan sebagainya) memerintah.

Daud Busro, seperti yang dikutip oleh S. Pamudji (1992: 10) mendefinisikan sistem pemerintahan sebagai keseluruhan dari susunan atau tatanan yang teratur dari lembaga-lembaga negara yang berkaitan satu dengan yang lainnya, baik langsung maupun tidak langsung menurut rencana atau pola untuk mencapai tujuan negara tersebut. Apabila pengertian sistem dan pengertian pemerintahan digabung maka, kebulatan atau keseluruhan yang utuh itu adalah pemerintah, sedangkan komponen-komponen itu adalah legislatif, eksekutif dan yudikatif yang masing-masing mempunyai fungsi sendiri-sendiri.

Pengertian pemerintahan dalam arti sempit menurut tata hukum negara positif Indonesia terdiri dari presiden, wakil presiden dan menteri-menterinya. Hal ini berlaku bagi negara-negara pada umumnya, baik yang menganut sistem pemerintahan presidensiil maupun yang menganut sistem pemerintahan parlementer, akan tetapi di dalam sistem pemerintahan parlementer yang dimaksud dengan pemerintahan sempit ialah perdana menteri dengan kabinetnya. Ahmad Sanusi dalam Sumbodo Tikok (1988: 166) mengemukakan arti sistem pemerintahan yaitu sebagai berikut: Sambil memperhatikan pendapat umumnya

ahli-ahli dengan kata sistem kami artikan suatu keutuhan kaidah-kaidah yang teratur dan mempunyai tujuan tertentu. Sedangkan kata pemerintahan kami maksudkan suatu lapangan kerja, suatu tugas, khususnya yang disebut pemerintahan dalam hubungannya dengan perundang-undangan. Sesuai dengan pengertian di atas dapat dikemukakan lebih dulu bahwa pola-pola sistem pemerintahan yang dikenal di negara kita dalam garis besarnya dapat dibedakan dalam tiga macam. Pertama: sistem yang dipusatkan secara mutlak dan bersifat revolusioner; kedua: sistem presidensiil; ketiga: sistem pemerintahan parlementer.

Menyimak dari beberapa definisi di atas, maka dapat diartikan bahwa sistem pemerintahan merupakan lembaga yang sah untuk mengatur masyarakat dengan berlandaskan pranata hukum yang mengikuti. Adanya pengaturan pelaksanaan pengurusan, pengaturan, kepemimpinan dan koordinasi dalam berbagai hal dan pemerintahan yang diharapkan terjadinya komunikasi yang baik dan lancar. Hukum yang dimaksud bukan hanya ditujukan pada masyarakat tetapi juga digunakan untuk mengatur serta mengontrol cara bertindak penguasa. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan-perlindungan bagi kedua belah pihak, sekaligus untuk mencegah penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan.

b. Pembagian Sistem Pemerintahan.

Sistem pemerintahan berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua yaitu sistem pemerintahan presidensiil dan sistem pemerintahan parlementer. Pada sistem pemerintahan parlementer hubungan antara eksekutif dan badan perwakilan sangat erat. Hal ini dikarenakan adanya pertanggungjawaban para menteri terhadap parlemen, maka setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara terbanyak dari parlemen, yang berarti bahwa kebijakan kabinet tidak boleh menyimpang dari yang dikehendaki oleh parlemen.

Badan eksekutif dalam sistem parlementer adalah kabinet yang terdiri dari perdana menteri dan para menteri. Menteri bertanggung jawab sendiri atau

bersama-sama kepada parlemen. Kesalahan yang dilakukan oleh kabinet tidak dapat melibatkan kepala negara. Pertanggungjawaban menteri kepada parlemen tersebut dapat mengakibatkan kabinet meletakkan jabatan dan mengembalikan mandat kepada kepala negara, manakala parlemen tidak mempercayai kabinet lagi.

Dalam prakteknya terdapat perbedaan cara penunjukkan formatur kabinet yang akan menyusun kabinet dalam sistem dua partai, partai politik yang memenangkan pemilihan umum sekaligus ditunjuk sebagai formatur kabinet dan langsung menjadi perdana menteri. Dalam sistem banyak partai, bila dalam parlemen tidak satupun dari partai politik yang mampu menguasai kursi secara mayoritas, maka pembentukan kabinet sering tidak lancar. Kepala negara menunjuk tokoh partai politik untuk menjadi formatur. Dalam melaksanakan tugasnya, formatur harus selalu mengingat perimbangan kekuatan diparlemen, sehingga setiap kali kabinet dibentuk merupakan kabinet koalisi yaitu gabungan dari berbagai partai politik.

Sistem pemerintahan parlementer mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Presiden sebagai kepala negara, tidak bertanggung jawab atas segala kebijakan yang diambil oleh kabinet.
- 2) Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif. Eksekutif ini adalah kabinet, kabinet harus meletakkan mandatnya kepada kepala negara manakala parlemen mengeluarkan mosi tidak percaya kepada menteri tertentu atau seluruh menteri.
- 3) Dalam sistem dua partai, yang ditunjuk sebagai pembentuk kabinet dan sekaligus sebagai perdana menteri adalah ketua partai politik yang memenangkan pemilihan umum sedangkan partai politik yang kalah menjadi oposisi.
- 4) Dalam sistem banyak partai, formatur kabinet harus mendapat dukungan dari parlemen.

- 5) Apabila terjadi perselisihan antara kabinet dengan parlemen dan kepala negara beranggapan kabinet berada dipihak yang salah, maka kepala negara akan membubarkan kabinet. Menjadi tugas kabinet untuk melaksanakan pemilihan umum dalam tempo tiga puluh hari setelah pembubaran kabinet tersebut. Sebagai akibatnya apabila partai politik yang menguasai parlemen menang dalam pemilihan tersebut maka kabinet akan terus memerintah.

Dalam negara yang menganut sistem parlementer, kekuasaan kehakiman secara prinsipil tidak digantungkan kepada lembaga legislatif dan lembaga eksekutif, karena tugasnya yang khusus serta untuk mencegah jangan sampai lembaga ini dipengaruhi oleh lembaga-lembaga lainnya agar dapat melaksanakan tugasnya dengan tidak berat sebelah.

Sistem pemerintahan berikutnya adalah sistem pemerintahan presidensiil. Dalam hal ini kedudukan eksekutif tidak tergantung kepada badan perwakilan rakyat. Adapun dasar hukum dari kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat. Sebagai kepala negara seorang presiden menunjuk pembantu-pembantunya yang akan memimpin departemen masing-masing. Menteri bertanggung jawab kepada presiden, karena pembentukan kabinet itu tidak tergantung dari perwakilan rakyat atau tidak memerlukan dukungan kepercayaan dari badan-badan perwakilan rakyat tersebut, maka menteripun tidak dapat diberhentikan olehnya.

Tugas peradilan dilakukan oleh badan-badan peradilan yang pada dasarnya tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain. Keuntungan dari sistem parlementer adalah penyesuaian antara pihak eksekutif dan pihak legislatif mulai dicapai namun sebaliknya pertentangan antara keduanya ini sewaktu-waktu bisa saja terjadi, yang menyebabkan kabinet mengundurkan diri sehingga tidak stabil.

Keuntungan dari sistem ini adalah pemerintahan untuk jangka waktu yang ditentukan menjadi stabil. Kelemahannya adalah bahwa kemungkinan akan

terjadi apa yang ditetapkan sebagai tujuan menurut eksekutif bisa berbeda dari pendapat legislatif (Harmaily Ibrahim, Moh. Kusnadi, 1998: 15). Dalam sistem presidensiil kekuasaan eksekutif berada diluar pengawasan parlemen.

Ciri dari sistem presidensiil adalah sebagai berikut:

- 1) Presiden adalah kepala eksekutif yang memimpin kabinetnya yang kesemuanya diangkat dan bertanggung jawab kepadanya.
- 2) Presiden tidak dipilih oleh badan legislatif, akan tetapi dipilih oleh anggota parlemen.
- 3) Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif dan tidak dapat dijatuhkan olehnya.
- 4) Presiden tidak dapat menjatuhkan parlemen.

Malaysia menganut sistem demokrasi parlementer, yaitu pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen nasional dan yang menjabat perdana menteri biasanya ketua partai politik yang memenangkan pemilihan umum. Kepala negara adalah raja (Yang di-Pertuan Agung) yang dipilih setiap 5 tahun diantara negara-negara kesembilan sultan atau raja dari negara-negara bagian, tetapi tugasnya sebagai kepala negara lebih bersifat seremonial. Sedangkan tampuk pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Undang-undang dibuat oleh parlemen yang terdiri dari Dewan Perwakilan dan Senat. Para anggota Dewan Perwakilan dipilih oleh rakyat untuk masa bakti 5 tahun sedangkan anggota Senat dipilih untuk masa bakti 6 tahun, sebagian dipilih oleh badan legislatif negara-negara bagian (masing-masing dua orang wakil) dan selebihnya dipilih oleh raja.

2. Kepemimpinan

a. Pengertian Kepemimpinan.

Kepemimpinan muncul bersama-sama adanya peradaban manusia yaitu sejak nenek moyang manusia itu berkumpul bersama, bekerja bersama-sama untuk mempertahankan eksistensi hidupnya menantang kebuasan binatang dan alam sekitarnya. Sejak itulah terjadi kerjasama antar manusia dan ada unsur kepemimpinan. Pada saat itu, yang ditunjuk sebagai pemimpin ialah orang-orang yang paling kuat, paling cerdas dan paling berani.

Kepemimpinan berasal dari kata dasar “pimpin” yang artinya bimbing atau tuntun. Dari kata “pimpin” lahirlah kata kerja “memimpin” yang artinya membimbing atau menuntun dan kata benda “pemimpin” yaitu orang yang berfungsi memimpin, atau orang yang membimbing atau menuntun. Di kehidupan sehari-hari dan juga dan juga dalam kepustakaan muncullah istilah yang serupa dengan itu dan kadang-kadang dipergunakan silih berganti seakan-akan tidak ada bedanya satu dengan yang lain, yaitu “pimpinan”, “kepimpinan” dan “kepemimpinan”. Istilah kepemimpinan sebagai terjemahan dari *leadership* seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita dengar dalam percakapan, dalam pertemuan, dari pidato radio, ceramah, atau kita baca dalam surat kabar, majalah buku dan sebagainya. (S. Pamudji, 1982: 5).

Arti kepemimpinan dalam pengertian umum, kepemimpinan menunjukkan proses kegiatan seseorang dalam memimpin, membimbing, mempengaruhi atau mengontrol pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain. Kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui suatu karya, seperti buku, lukisan dan sebagainya atau melalui kontak pribadi antara seseorang dengan orang lain secara tatap muka. Kepemimpinan melalui karangan atau ciptaan yang dituangkan dalam bentuk buku atau lukisan dapat dikatakan kepemimpinan yang tidak langsung, karena pemimpin dalam usaha mempengaruhinya tidak seketika pada saat melakukan kegiatan. Kepemimpinan yang bersifat tatap muka berlangsung melalui kata-kata secara lisan. Kepemimpinan ini bersifat langsung, karena

pemimpin dalam usaha mempengaruhi orang lain, bergiat langsung pada sasarannya. (Onong Uchjana Effendy, 1981: 1).

Tead mengartikan kepemimpinan yaitu kegiatan mempengaruhi orang lain atau sikap yang tidak disadari dan bersifat emosional menurut Jennings tidak cukup untuk menggambarkan kepemimpinan nasional. Maka dengan demikian kepemimpinan nasional dapat diartikan sebagai sebagai kekuatan atau ketangguhan yang dimiliki oleh para pemimpin bangsa yang bersumber dari kemampuan untuk mencapai cita-cita bangsa dengan keberanian untuk memikul resiko yang mungkin terjadi. (Buchari Effendy, 1984: 3-4).

Faktor penting dalam kepemimpinan, yakni dalam mempengaruhi atau mengontrol pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain itu adalah tujuan. Kepemimpinan selalu merupakan kegiatan yang direncanakan dan dilakukan dengan sengaja. Seringkali kepemimpinan dilakukan secara spontan. Meski demikian, direncanakan atau tidak direncanakan, maksud dan tujuan selalu ada.

Pendapat tentang kepemimpinan diutarakan oleh Ralph M. Stogdill (1974) dalam bukunya *A Handbook of leadership* seperti yang dikutip oleh Pamudji adalah sebagai berikut: 1) Kepemimpinan sebagai titik pusat proses-proses kelompok (*leadership as a focus of group process*); 2) Kepemimpinan adalah suatu kepribadian yang mempunyai pengaruh (*leadership as personality and its effects*); 3) Kepemimpinan adalah seni untuk menciptakan paham atau kesediaan, kesepakatan (*leadership as the art of inducing compliance*); 4) Kepemimpinan adalah pelaksanaan pengaruh (*leadership as the exercise of influence*); 5) Kepemimpinan adalah tindakan atau perilaku (*leadership as act or behavior*); 6) Kepemimpinan adalah suatu bentuk persuasi (*leadership as a form of persuasion*); 7) Kepemimpinan adalah suatu hubungan kekuatan/kekuasaan (*leadership as a power relation*); 8) Kepemimpinan adalah sarana pencapaian tujuan (*leadership as an instrument of goal achievement*); 9) Kepemimpinan adalah suatu hasil dari interaksi (*leadership as an effect of interaction*); 10)

Kepemimpinan adalah peranan yang dipisahkan (*leadership as a defferentiated role*); 11) Kepemimpinan sebagai inisiasi (permulaan) dari struktur (*leadership as the initiation of structure*).

b. Sebab-sebab Munculnya Pemimpin.

Menurut Kartini Kartono (1990: 29) tiga teori yang menonjol dalam menjelaskan kemunculan pemimpin yaitu:

1) Teori genetis menyatakan sebagai berikut:

- a) Pemimpin itu tidak dibuat, akan tetapi lahir jadi pemimpin oleh bakat-bakatnya yang luar biasa sejak lahir.
- b) Dia ditakdirkan lahir menjadi pemimpin, dalam situasi kondisi yang bagaimanapun juga.
- c) Secara filsafi, teori tersebut menganut pandangan yang deterministis dan fatalistis.

2) Teori sosial (lawan teori genetis) menyatakan sebagai berikut :

- a) Pemimpin-pemimpin itu harus disiapkan dan dibentuk, tidak terlahirkan saja.
- b) Setiap orang bisa menjadi pemimpin melalui usaha penyiapan dan pendidikan.

3) Teori ekologis atau *synthetis* (muncul sebagai reaksi dari kedua teori tersebut lebih dahulu) menyatakan sebagai berikut :

Seorang akan sukses menjadi pimpinan, bila sejak lahirnya dia telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan dan bakat-bakat ini sempat dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan juga sesuai dengan tuntutan lingkungan /ekologisnya.

c. Cara Melaksanakan Kepemimpinan

- 1) Kepemimpinan otokratis, yaitu pemimpin menganggap organisasi sebagai milik sendiri.
- 2) Kepemimpinan militeristik, yaitu memakai cara yang lazim digunakan dalam kemiliteran.
- 3) Kepemimpinan paternalistik, yaitu pemimpin dianggap sebagai bapak dan anak buahnya dianggap sebagai anak atau manusia yang belum dewasa dan perlu bimbingan.
- 4) Kepemimpinan kharismatik, yaitu mempunyai kemampuan yang luar biasa dari pada orang lain.
- 5) Kepemimpinan bebas (*laissez faire*), yaitu pemberian kebebasan sepenuhnya kepada bawahan .
- 6) Kepemimpinan demokratis, yaitu adanya keterbukaan dari pemimpin untuk menerima saran, masukan atau kritikan dari anak buahnya. (Y. W. Sunindhia dan Ninik Widiyanti, 1988: 29-41)

W. J. Reddin (1982) menentukan watak dan tipe kepemimpinan menjadi tiga pola yakni: berorientasikan tugas (*task orientation*), berorientasikan pada hubungan kerja (*relationship orientation*), berorientasikan hasil yang efektif (*effectiveness orientation*). Berdasarkan tiga orientasi tersebut dapat ditentukan delapan tipe kepemimpinan yaitu:

- 1) Tipe deserter (pembelot), yaitu bermoral rendah, tidak memiliki rasa keterlibatan, tanpa pengabdian, tanpa loyalitas, dan ketaatan, sukar diramalkan.
- 2) Tipe birokrat, yaitu korek, patuh pada peraturan dan norma-norma manusia organisasi, tepat, cermat, keras.
- 3) Tipe *missionary*, yaitu terbuka, penolong, lembut hati, ramah tamah.
- 4) Tipe pembangun (*developer*), yaitu kreatif, dinamis, inovatif, memberikan/melimpahkan wewenang dengan baik, menaruh kepercayaan pada bawahan.

- 5) Tipe orokrat, yaitu keras, diktatoris, mau menang sendiri, keras kepala, sombong, bandel.
- 6) Otokrat yang bijak (*benevolent autocrat*), yaitu lancar, tertib, ahli dalam mengorganisir, besar rasa keterlibatan diri.
- 7) Tipe kompromiser, yaitu plintat-plintut, selalu mengikuti angin, tanpa pendirian, tidak mempunyai keputusan, berpandangan pendek.
- 8) Tipe eksekutif, yaitu bermutu tinggi dapat memberikan motivasi yang baik, berpandangan, jauh tekun.

d. Syarat-syarat Kepemimpinan

Konsepsi mengenai kepemimpinan itu harus selalu dikaitkan dengan tiga penting yaitu; kekuasaan, kewibawaan, kemampuan.

- 1) Kekuasaan ialah kekuatan, otoritas dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu.
- 2) Kewibawaan ialah kelebihan, keunggulan, keutamaan, sehingga orang mampu mengatur orang lain, sehingga orang tersebut patuh pada pemimpin dan bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu.

Kemampuan ialah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan kecakapan ketrampilan teknis maupun sosial yang dianggap melebihi dari kemampuan anggota biasa. (Kartini Kartono, 1990: 31).

e. Fungsi Kepemimpinan

- 1) Pengembangan imajinasi, yaitu memiliki visi yang dapat mendorong apa yang akan terjadi dan kemampuan melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi.

- 2) Pengembangan kepatuhan, yaitu tanggungjawab terhadap pengembangan kepatuhan terhadap pemimpin dan kepada organisasi.
- 3) Pemrakarsaan, penggiatan dan pengawasan rencana, yaitu memprakarsai dan bertanggung jawab atas kemajuan rencana bagi pengrealisasian suatu tujuan tertentu.
- 4) Pelaksanaan keputusan, yaitu melaksanakan keputusan yang bijaksana dan tepat.
- 5) Pengawasan, yaitu mengawasi pelaksanaan kegiatan.
- 6) Penganugerahan tanda penghargaan, yaitu sebagai bentuk ucapan terima kasih terhadap bawahan yang berprestasi. (Onong Uchjana Effendy, 1981: 3-7).

Mahathir mentransformasikan Malaysia dari sebuah negara terbelakang menjadi kekuatan ekonomi dan menonjolkan Malaysia di peta dunia. Mahatir dijuluki sebagai "arsitek Malaysia modern", "reformis pemikiran Melayu", dan "bijak serta kukuh". Kenyataan ekonomi kontemporer Malaysia sudah cukup menjadi jawaban atas semua kritik terhadap Mahathir dengan gaya kepemimpinannya yang otokratik dan bersifat kronisma ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi dinilai sebagai pemimpin yang amat konsisten memajukan kesejahteraan rakyatnya. Di sisi lainnya, tudingan terhadap gayanya yang tak segan memainkan tangan besi dalam menjinakkan musuh-musuh politik juga turut mengiringi.

3. Sistem Ekonomi

Untuk mengetahui tentang sistem ekonomi perlu diketahui bahwa sistem merupakan elemen-elemen yang berhubungan satu sama lain sehingga membentuk satu kesatuan unit. Sebuah sistem pada dasarnya adalah suatu organisasi besar yang menjalin berbagai subjek (atau objek) serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. (Dumairy, 1997: 28).

Sistem ekonomi adalah suatu kumpulan elemen-elemen yang saling berhubungan dalam rangka usaha untuk mencapai kemakmuran (Ecky Soeriawidjaja, 1998: 12). Menurut John F. Due yang dikutip Winardi (1986: 21), sistem ekonomi adalah kelompok lembaga ekonomi yang menganggap sebagai salah satu unit, organisasi, sebagai pelaksana yang sumbernya bermacam-macam namun sedikit, relatif sesuai dengan keperluan kemudian digunakan untuk menata kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehingga akan tercapai kepuasan, namun bila mengingat sifat manusia maka manusia tidak pernah akan puas dalam hidupnya. Sistem ekonomi dibentuk lengkap dengan seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalin kerjasama ekonomi.

Politik dan ekonomi sejak dahulu kala sampai pada saat ini selalu sangat erat hubungannya. Kehidupan politik dan kehidupan ekonomi selalu saling bertemu saling pengaruh mempengaruhi, jalin menjalin. Aktivitas-aktivitas politik sangat sulit dipisahkan daripada aktivitas-aktivitas ekonomi. Kedua aktivitas itu kadang-kadang sejalan, saling bantu membantu, tetapi kadang-kadang bertentangan. Dalam setiap tindakan politik ada aspek ekonominya, demikian pula struktur perekonomian sesuatu masyarakat dapat mempengaruhi lembaga-lembaga politiknya yang sudah ada dan yang akan ada di kemudian hari. Pada satu pihak, politik begitu menentukan kerangka aktivitas ekonomi dan mengarahkannya untuk melayani kepentingan kelompok-kelompok dominan: penggunaan kekuasaan dalam berbagai bentuknya sangat menentukan hakikat suatu sistem ekonomi. Dilain pihak, proses ekonomi itu sendiri cenderung mendistribusikan kekuasaan dan kekayaan: ekonomi merombak hubungan kekuasaan antar politik. Pada gilirannya hal itu merombak sistem politik sekaligus membentuk struktur hubungan ekonomi yang baru. Jadi, dinamika hubungan interasional di zaman modern pada pokoknya merupakan fungsi interaksi timbal balik antar ekonomi dan politik. (Walter S. Jones, 1993: 223)

Menurut pendapat Dumairi (1997: 30-31) mengatakan bahwa sistem ekonomi yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sistem ekonomi yang berlaku atau diterapkan negara berdasarkan beberapa sudut tinjauan seperti:

- a. Sistem pemilihan sumber daya atau faktor-faktor produksi.
- b. Keleluasaan masyarakat saling berkompetisi satu sama lain dan untuk menerima imbalan atau prestasi kerjanya.
- c. Kadar peranan pemerintah dalam mengatur dan mengarahkan.
- d. Menerencanakan kehidupan bisnis perekonomian pada umumnya.

Winardi (1986: 21) berpendapat sistem ekonomi adalah sebuah organisasi yang mencakup sejumlah lembaga atau pranata (ekonomi, sosial, politik, ideologi) yang bertugas memecahkan masalah-masalah sebagai berikut:

- a. Barang dan jasa apakah yang dihasilkan.
- b. Bagaimana cara-cara barang dan jasa-jasa yang dihasilkan.
- c. Bagaimana cara membagi barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan sebaik-baiknya di antara anggota-anggota masyarakat suatu perekonomian.

Menurut pendapat Surangi-Unger yang dikutip oleh Soetrisno (1987: 85) mengatakan bahwa sistem ekonomi adalah keseluruhan lembaga-lembaga ekonomi yang dilaksanakan atau dipergunakan oleh suatu bangsa atau negara dalam mencapai cita-citanya.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur hubungan ekonomi dalam kegiatan produksi, konsumsi maupun distribusi dalam kehidupan masyarakat. Sistem ekonomi merupakan sebuah organisasi yang terdiri dari sejumlah lembaga-lembaga atau pranata ekonomi.

Hampir semua negara pemerintah dilibatkan dalam kegiatan ekonomi yang hal ini membawa persoalan penting mengenai kebijakan ekonomi (*economic policy*), yang bertujuan untuk membantu dalam pengendalian dan perbaikan

(*control and improvement*). Bagaimana caranya agar taraf hidup yang memadai dapat disebarluaskan.

Sistem ekonomi yang berkembang di dunia saat ini meliputi sistem ekonomi komunis, kapitalis dan Sosialis. Untuk mengetahui perbedaan dari ketiga sistem ekonomi yang berkembang berikut adalah ciri-cirinya;

a. Sistem Ekonomi Kapitalis

- 1) Pemilikan perorangan, dalam sistem ekonomi kapitalis pemilikan alat-alat produksi (pabrik, mesin dan lain-lain) dikuasai secara perorangan bukan negara.
- 2) Perekonomian pasar artinya dalam mengadakan produksi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan tidak berdasar persamaan, melainkan untuk pasar yang belum diketahui dalam hal harga penawaran dan penawaran menjadi penentu.
- 3) Adanya persaingan, hal ini merupakan salah satu ciri dalam perekonomian pasar adalah adanya persaingan sehingga dalam sistem ini siapa kuat akan menang dan yang lemah akan tersingkir.
- 4) Mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, yang mengandung arti prinsip profit merupakan salah satu ciri utama dalam kapitalisme. Sistem ini memberikan lebih banyak kesempatan untuk meraih keuntungan yang seluas-luasnya. Hal ini disebabkan perekonomian kapitalis menjamin tiga kebebasan yakni; kebebasan berdagang dan menentukan pekerjaan, kebebasan hak pemilikan dan kebebasan mengadakan kontrak.
- 5) Peranan terbatas bagi pemerintah dalam arti pemerintahan tidak mengadakan campur tangan dalam perekonomian.
- 6) Pola produksi diserahkan sepenuhnya pada kebebasan para produsen.
- 7) Pola konsumsi bebas tergantung pada kebutuhan masing-masing individu.
- 8) Pola distribusi diserahkan kepada mekanisme pasar yang secara otomatis akan mengatur kesemuanya.

b. Sistem Ekonomi Komunis

- 1) Barang yang ditetapkan dan tidak jarang diadakan satu barang konsumsi yang uniform.
- 2) Pola distribusi dikendalikan oleh penguasa, sasaran faktor-faktor produksi tidak mungkin menjadi milik perorangan melainkan dimiliki oleh pemerintah.
- 3) Berdasar pada suatu perencanaan.
- 4) Pembagian pendapatan nasional yang merata.
- 5) Produksi konsumsi dan distribusi barang serta jasa direncanakan oleh badan perencanaan dan disusun dalam rangka jangka panjang. Dalam hal ini perkembangan politik sering ikut menentukan.
- 6) Mekanisme harga dan pasar sama sekali tidak berperan. Metode produksi berdasarkan pada pertimbangan teknis dan lengkapnya alat-alat produksi. Dalam sistem ekonomi komunis setiap individu tunduk kepada kolektivitas saja.
- 7) Pola produksi tidak bebas melainkan sudah ditentukan dari atas menurut suatu planing.
- 8) Pola konsumsi yang dikonsumsi hanya jumlah distribusi dan alokasi barang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah dalam suatu perencanaan.

c. Sistem Ekonomi Sosialis

- 1) Memperkenalkan hak milik pribadi atas alat-alat produksi.
- 2) Melaksanakan pemilikan oleh negara hanya apabila hal tersebut diperlukan demi kepentingan masyarakat.
- 3) Mengendalikan diri secara maksimal.

- 4) Sebagian besar kekayaan dimiliki oleh publik melalui pemerintah yang dipilih secara demokratis termasuk jenis industri jasa umum dan sistem transportasi penting.
- 5) Pembatasan terhadap pemilikan harta kekayaan pribadi.
- 6) Peraturan pemerintah terhadap ekonomi.
- 7) Program pensiun dan bantuan yang dibiayai oleh pemerintah.
- 8) Dalam sistem ekonomi sosialis mempertimbangkan apakah industri atau jasa tertentu perlu dialihkan menjadi milik negara dan diawasi negara.

d. Sistem Ekonomi Pancasila

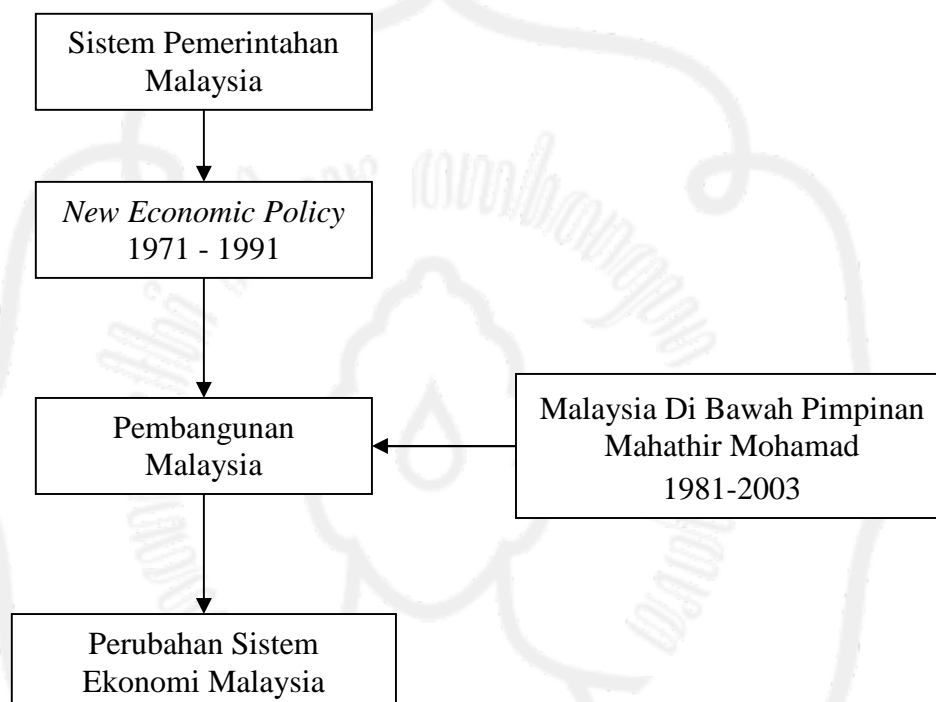
Sistem Ekonomi Indonesia adalah seluruh lembaga-lembaga ekonomi yang dipergunakan bangsa Indonesia dalam mengolah dan meningkatkan segala sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari segi “utopia” tujuan tersebut adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya, mencapai masyarakat adil dan makmur, spiritual dan material berdasarkan Pancasila. Dari segi ekonomi ada 5 ciri khas utama Sistem Ekonomi Pancasila menurut Mubyarto & Boediono (Penyunting) (1981: 10-11) dan lihat juga Mubyarto & Sri Edi Swasono (1987: 147-150) yaitu:

- 1) Peranan dominan koperasi bersama dengan perusahaan-perusahaan negara dan perusahaan-perusahaan swasta. Semua bentuk badan usaha didasarkan pada azas kekeluargaan dan prinsip harmoni dan bukan pada azas kepentingan pribadi dan prinsip konflik kepentingan.
- 2) Memandang manusia secara utuh. Manusia bukan semata-mata *homoioekonomikus* tetapi juga *social man and religious man* dan sifat manusia terakhir ini dapat dikembangkan setaraf dengan sifat yang pertama sebagai motor penggerak kegiatan duniawi (ekonomi).
- 3) Adanya kehendak sosial yang kuat ke arah *eglitarianisme* atau pemerataan sosial.

- 4) Prioritas utama terhadap terciptanya suatu perekonomian nasional yang tangguh. Konsep perekonomian nasional berfungsi sebagai pemupukan ketahanan nasional untuk mencapai suatu perekonomian yang mandiri, tangguh dan terhormat di arena internasional dan yang didasarkan atas solidaritas.
- 5) Adanya imbalan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan sosial.

Sistem ekonomi Malaysia adalah sistem ekonomi kapitalis yang menyandarkan sepenuhnya pada mekanisme pasar (kekuatan permintaan dan penawaran). Prinsip persaingan bebas (*laissez faire*) meyakini kemampuan untuk menentukan efisiensi ekonomi. Pemerintah memberi kebebasan penuh dalam aktivitas ekonomi, sektor swasta memainkan peranan besar dalam kegiatan ekonomi negara, persaingan digalakkan dengan tujuan memperoleh efisiensi dan memaksimalkan profit atau keuntungan dan peran pemerintah adalah menyediakan kemudahan infrastruktur fisik, menentukan perdagangan yang kondusif.

B. Kerangka Berpikir



Keterangan :

Malaysia memakai sistem demokrasi parlementer, yaitu pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen nasional yang dipilih setiap lima tahun sekali, yang menjabat perdana menteri biasanya ketua partai politik yang memenangkan pemilihan umum. Peran Perdana Menteri Malaysia dalam pembuatan kebijaksanaan pembangunan khususnya ekonomi adalah penting

sebagaimana halnya dalam kebijaksanaan penting lainnya termasuk kebijaksanaan luar negeri.

Sebelum dasawarsa 70-an, perencanaan pembangunan di Malaysia lebih berorientasi pada usaha-usaha pencapaian laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal ini dilaksanakan dengan melakukan investasi besar-besaran dalam sektor pertanian, prasarana dan pembangunan pedesaan. Namun pada kenyataannya sasaran laju pertumbuhan ekonomi masih belum menjamin terjadinya pembangunan di negara ini. Konflik rasial pecah pada tahun 1969, golongan masyarakat Melayu (Bumiputera) merasa tidak puas dengan hasil pembangunan yang dicapai. Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata lebih banyak menguntungkan golongan non-Melayu, sedangkan masyarakat Melayu semakin jauh tertinggal dalam proses pembangunan. Kebijaksanaan Ekonomi Baru (*New Economic Policy*) yang merupakan pula suatu pola kebijaksanaan jangka panjang 20 tahun (1971-1990), mulai diperkenalkan kepada masyarakat yang dalam perkembangannya menjadi acuan dalam penentuan kebijakan pembangunan di Malaysia. NEP berusaha memberikan peluang yang lebih besar kepada golongan bumiputera untuk berperan serta dalam proses pembangunan, sehingga setidaknya dalam jangka waktu 20 tahun kesenjangan yang terjadi antar ras khususnya Melayu dan Cina akan dapat dikurangi.

Malaysia di bawah pimpinan Perdana Menteri Mahathir Mohamad (1981-2003) terjadi perubahan arah pembangunan Malaysia. Kebijakan dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Melayu terutama ekonomi seperti; *Look East Policy* (LEP) atau Kebijaksanaan Pandang ke Timur, Kebijakan Industri Berat, Kebijakan Perubahan Jumlah Penduduk, *Malaysia Incorporation*, Privatisasi, Kebijakan Pertanian Negara, Kebijakan Pembangunan Nasional dan Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (RRJP2) 1991-2000.

Dengan tidak merubah sistem ekonomi yang ada, pembangunan Malaysia terutama ekonomi dapat berjalan dengan baik meski sempat dilanda krisis

ekonomi pada tahun 1998. Mahathir ingin membangun suatu negara yang dahulunya miskin dan terkotak-kotak secara rasial menjadi negara modern yang awalnya hanya bersandarkan pada pertanian menjadi suatu negara yang berlandaskan industri, teknologi, dan ilmu pengetahuan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi berjudul Kebijakan Mahathir Mohamad Dalam Sistem Perekonomian Malaysia 1981-2003 yang dilaksanakan di lingkungan perpustakaan dan mengambil koleksi pribadi. Perpustakaan yang digunakan sebagai tempat mencari data dalam penelitian ini, yaitu:

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta.

Monumen Pers Surakarta.

2. Waktu Penelitian

Jangka waktu yang digunakan untuk penelitian dimulai dari disetujuinya judul sampai penyusunan laporan hasil penelitian direncanakan selama 12 bulan pada bulan April 2005 - Maret 2006.

B. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian ilmiah, metode memegang peranan yang sangat penting terhadap keberhasilan penelitian yang dilakukan. Metode merupakan cara kerja yang utama untuk mencapai tujuan dengan menggunakan teknik dan alat tertentu. Metode berasal dari bahasa Yunani *methos* yang berarti jalan atau cara dan *teodhos* yang berarti masalah. Menurut Koentjaraningrat (1997: 70) metode adalah cara kerja yang sistematis untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Menurut Helius Sjamsuddin (1994: 2), metode ada hubungan dengan suatu prosedur, proses teknik yang sistematis dalam penyelidikan disiplin ilmu tertentu untuk mendapatkan obyek atau bahan-bahan yang diteliti.

Berdasarkan masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini dan tujuan dari penelitian historis itu sendiri, maka metode yang digunakan adalah metode sejarah atau metode historis. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau berdasarkan data yang diperoleh guna menentukan proses historiografi (Louis Gottschalk, 1986: 32). Menurut Moh. Nazir (1988: 56) metode sejarah merupakan suatu usaha untuk memberikan interpretasi atau bagian *trend* yang naik turun dari suatu status keadaan di masa lampau untuk memperoleh suatu generalisasi yang berguna untuk memahami kenyataan sejarah, membandingkan dengan keadaan sekarang atau dapat meramalkan keadaan yang akan datang. Sedangkan Helius Sjamsudin (1993: 3) mengemukakan bahwa metode historis adalah suatu cara untuk mengetahui sejarah dengan pemilihan prosedur yang sistematis dengan menggunakan teknik-teknik tertentu, pengumpulan bahan-bahan sejarah baik arsip, perpustakaan maupun wawancara dengan tokoh-tokoh sejarah yang masih hidup dan mempunyai hubungan dengan peristiwa sejarah.

Tujuan dari penelitian historis adalah untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan obyektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasikan serta mensintesisakan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan

memperoleh kesimpulan yang kuat (Sumadi Suryabrata, 1994: 16). Berdasarkan teori-teori yang diungkapkan, maka penelitian harus dengan langkah-langkah yang sesuai dan untuk menghasilkan penulisan sejarah yang valid maka harus mengumpulkan bahan-bahan yang sesuai dengan tema yang akan ditulis, kemudian mengadakan kritik terhadap data yang diperoleh, selanjutnya menafsirkan makna yang saling berhubungan dengan data-data yang diperoleh untuk selanjutnya menyusun suatu cerita sejarah.

Sumber primer, peneliti dapatkan di Kedutaan Malaysia, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sedangkan sumber sekunder sebagian besar di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Monumen Pers, Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret dan koleksi buku atau majalah pribadi serta perpustakaan lainnya.

C. Sumber Data

Sejumlah sumber yang tersedia pada dasarnya adalah data verbal, sehingga membuka kemungkinan bagi peneliti sejarah untuk memperoleh pengetahuan tentang berbagai hal. Data sejarah berarti bahan sejarah yang memerlukan pengolahan, penyeleksian dan pengkategorian. Adapun klasifikasi sumber sejarah itu dapat dibedakan menurut bahannya, asal-usul atau urutan penyampaiannya, dan tujuan sumber itu dibuat. Sumber menurut bahannya dapat dibagi menjadi dua yaitu tertulis dan tidak tertulis, sumber-sumber menurut penyampaiannya dapat dibedakan menjadi primer dan sekunder. (Dudung Abdurrahman, 1999: 31).

Sumber data dalam penelitian historis dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Peninggalan material, antara lain berupa candi, piramid, fosil, monumen, senjata, bangunan tempat tinggal, peralatan atau perlengkapan kehidupan, benda-benda budaya, tempat-tempat keramat dan lain-lain.
- b. Peninggalan tertulis, antara lain berupa prasasti, relief, kitab, naskah-naskah perjanjian, arsip negara dan lain-lain.

- c. Peninggalan tak tertulis atau budaya antara lain cerita rakyat atau dongeng, bahasa, adat-istiadat atau hukum, kepercayaan dan lain-lain. (Hadari Nawawi, 1995: 79).

Secara garis besar sumber sejarah dapat diklasifikasikan menjadi empat tipe, yaitu: dokumen, rekaman kuantitatif, rekaman oral (lisan) dan peninggalan-peninggalan. Dokumen merupakan bahan tertulis dan bahan cetakan merupakan sesuatu yang paling umum digunakan sebagai sumber sejarah. Dokumen itu bisa berupa buku harian, buku tahunan, surat kabar, majalah dan arsip. Tipe rekaman kuantitatif dikatakan bagian dari dokumen karena merupakan bagian dari suatu rekaman atau data yang dapat dijadikan sebagai sumber. Sumber tertulis menurut Louis Gottshclak (1989: 35) berdasarkan urutan panyampaiannya, sumber tertulis dibagi menjadi dua yakni sumber tertulis primer dan sumber tertulis sekunder. Sumber tertulis primer adalah hasil kesaksian dari seorang saksi yang dengan panca indera yang lain atau dengan alat mekanis. Sedang sumber tertulis sekunder adalah hasil kesaksian dari orang yang tidak turut hadir pada peristiwa yang diceritakan.

Menurut Sumadi Suryabrata (1998: 17), penelitian historis tergantung kepada dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber primer, yaitu peneliti secara langsung melakukan observasi atau penyaksian kejadian-kejadian yang dituliskan. Data sekunder diperoleh dari sumber sekunder, yaitu peneliti melaporkan hasil observasi orang lain yang satu kali atau lebih lepas dari aslinya. Di antara kedua sumber tersebut, sumber primer dipandang memiliki otoritas sebagai bukti tangan pertama dan diberi prioritas dalam pengumpulan data.

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan berupa sumber tertulis primer dan sumber tertulis sekunder. Sumber tertulis primer seperti; *The Second Outline Perspective Plan 1991-2000*, koran dan majalah yang sejamin. Sedangkan sumber tertulis sekunder berupa buku-buku yang mempunyai relevansi

dengan tema penelitian. Buku-buku tersebut antara lain; *Dilemma Melayu, The Malays Their Problems and Future, Penjajahan Malaysia Cabaran dan Warisannya* dan lain sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam melaksanakan penelitian ini pengumpulan data merupakan bagian yang amat penting. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Menurut Moh. Nazir (1988: 211), selalu ada hubungan antara mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah memberi arah dan mempengaruhi metode pengumpulan data. Menurut Louis Gottchalk (1986: 46), “laboratorium penelitian yang lazim bagi seorang sejarawan adalah perpustakaan dan alat yang paling bermanfaat bagi seorang sejarawan adalah katalogus”. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka. Menurut Mestika Zed (2004: 89) studi pustaka (*library research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menggali bahan-bahan pustaka yang berupa buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah ataupun dokumen

Sehubungan dengan hal di atas, dalam katalogus perpustakaan biasanya terkandung keterangan mengenai pengarang, karena itu jika seorang mengingat beberapa kata kunci (*key words*) yang terdapat didalam subyek yang dibahasnya, boleh jadi ia dapat menemukan buku atau artikel yang dimasukkan kedalam katalogus dibawah salah satu diantara kata-kata kunci. Tiap subyek sejarah mengandung beberapa indikasi mengenai orang, tempat, periode, dan jenis jabatan manusia yang bersangkutan. Dengan demikian akan dapat menghitung empat perangkat judul yang dapat digunakan untuk mencari judul buku maupun pengarang yang relevan di dalam katalog. (Louis Gottschalk, 1986: 46).

Sumber primer dan sekunder harus dilaksanakan kritik sumber. Sumber yang satu dibandingkan dengan sumber yang lain kemudian diseleksi dan diinterpretasi. Selanjutnya dilakukan penulisan cerita sejarah yang disajikan dalam bentuk tulisan.

Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pencarian sumber data dilakukan berdasarkan pada sumber masalah yang ada, sehingga sumber-sumber terutama buku dicari disesuaikan dengan obyek masalah yang berhubungan dengan tema penelitian.
2. Pencarian dan pengumpulan arsip-arsip atau buku-buku dilaksanakan di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Untuk mencarinya, peneliti terlebih dahulu membaca katalog, mencatat nomor kode atau tanda buku dan menyerahkannya kepada petugas yang kemudian akan mengambilkan arsip atau buku yang dimaksud kemudian di foto kopi. Akan tetapi di Kedutaan Besar Malaysia tidak dapat mencari sumber lebih banyak dikarenakan di perpustakaan sekarang tidak aktif, maka arsip atau buku banyak dilakukan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
3. Penggalan terhadap bahan-bahan pustaka lainnya seperti buku dan ensiklopedi atau yang lain dilakukan di beberapa perpustakaan, antara lain: Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Monumen Pers. Adapun kegiatan peneliti selama di perpustakaan-perpustakaan tersebut adalah mencari bahan-bahan pustaka yang relevan dengan tema penelitian melalui membaca, membuat catatan-catatan ringkas, meminjam atau di fotokopi.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data digunakan untuk memeriksa dan menganalisis data sehingga akan menghasilkan data yang benar-benar dapat dipercaya. Penelitian

sejarah adalah penelitian yang mengandalkan pada kemampuan pelakunya dalam mengadakan interpretasi terhadap sumber yang dianalisis. Analisis historis dapat disebut analisis yang mengutamakan ketajaman interpretasi sejarah atau analisis yang memiliki kekuatan pada interpretasi sejarah. Interpretasi dilakukan karena fakta sejarah tidak dapat berdiri sendiri sehingga memerlukan kemampuan khusus untuk memberikan interpretasi. Menurut Helius Sjamsudin (1996: 89), teknik analisa data historis adalah analisa data sejarah yang menggunakan kritik sumber sebagai metode untuk menilai sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan sejarah.

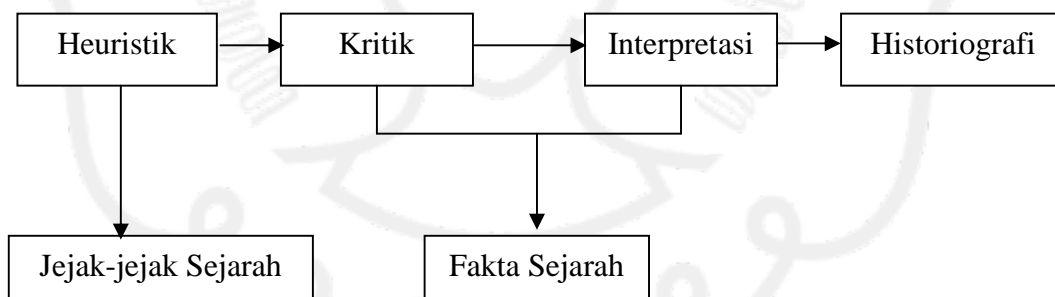
Fakta merupakan bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan dalam penelitian sejarah, karena fakta merupakan bahan utama yang dijadikan sumber oleh sejarawan untuk menyusun historiografi atau cerita sejarah. Fakta tersebut merupakan hasil dari pemikiran para sejarawan sehingga fakta fakta yang terkumpul mengandung subyektivitas. Fakta merupakan bahan utama bagi sejarawan untuk menyusun historiografi, sedangkan fakta sejarah selalu mengandung unsur subyektifitas sehingga dalam menganalisis diperlukan konsep seperti penyeleksian, pengidentifikasian, dan pengklasifikasian. (Sartono Kartodirdjo, 1992: 92).

Interpretasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan data guna menyingkap peristiwa-peristiwa mana yang terjadi dalam waktu yang sama (Dudung Abdurrahman, 1999: 65). Interpretasi data sejarah dilaksanakan dengan cara melaksanakan pengumpulan terhadap berbagai materi atau data yang sesuai dengan tema penelitian ini. Dari data yang telah terkumpul tersebut kemudian dilaksanakan kritik sumber dengan cara membandingkan data yang satu dengan yang lain untuk mendapatkan data yang seobyektif mungkin. Menganalisis penulisan sejarah dibutuhkan kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern merupakan kritik yang berkenan dengan isi pertanyaan yang diucapkan manusia

pada masa lampau, sedangkan kritik ekstern merupakan kritik tentang keadaan sumber yang berkenaan dengan keautentikan sumber sejarah.

F. Prosedur Penelitian

Hasil yang optimal dapat diperoleh apabila melalui prosedur penelitian yang benar. Prosedur penelitian merupakan tata urutan yang harus dilalui dalam melaksanakan sebuah penelitian dari persiapan sampai penulisan hasil penelitian. Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah penelitian, mulai pengumpulan data hingga penulisan hasil penelitian. Menurut Louis Gottschalk (1986: 17), prosedur penelitian dalam metode sejarah terdiri dari empat kegiatan yaitu mengumpulkan jejak-jejak masa lampau atau heuristik, meneliti jejak masa lampau tersebut atau kritik, menafsirkan peristiwa masa lampau atau interpretasi dan menyampaikan hasil rekonstruksi masa lampau menjadi kisah sejarah atau historiografi. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah metode historis yang meliputi empat tahap seperti pada skema dibawah ini :



Ketrangan :

1. Heuristik

Heuristik merupakan kegiatan mengumpulkan jejak-jejak peristiwa masa lampau sebagai peristiwa sejarah melalui sumber primer dan sumber sekunder yang relevan dengan penelitian. . Sumber sejarah di sini dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: (1) sumber tertulis, misalnya dokumen-dokumen atau arsip; (2) Sumber benda, misalnya bangunan (candi), perkakas, senjata; (3) Sumber lisan, misalnya hasil dari suatu wawancara para pelaku sejarah atau saksi mata sejarah. Dalam penulisan ini, menggunakan sumber tertulis yang berupa buku-buku, surat kabar, majalah sebagai studi pustaka.

Dalam penelitian ini, penulis berusaha mencari dan menemukan data yang relevan melalui teknik telaah pustaka. Perpustakaan yang banyak ditemukan sumber adalah perpustakaan-perpustakaan seperti Monumen Pers Surakarta, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dan Kedutaan Besar Malaysia.

2. Kritik

Kritik merupakan kegiatan menyelidiki jejak-jejak sejarah itu autentik atau tidak. Kritik meliputi kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern yaitu kritik terhadap sumber data yang telah ditemukan sahih atau tidak. Kritik intern dilakukan dengan meneliti isinya apakah isi pernyataan, fakta dan ceritanya dapat dipercaya. Kritik ekstern yaitu kritik terhadap sumber-sumber yang dikehendaki asli atau tidak, utuh atau tiruan. Kritik ekstern dilakukan dengan meneliti bahan yang dipakai, jenis tulisan, gaya bahasa dan lain-lain.

Kritik intern dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa proses, antara lain : *pertama*, penilaian terhadap aspek intrinsik yang dimulai dengan menentukan sifat sumber data sejarah. Dari proses ini didapatkan sebuah pengkategorian sumber data yang menempatkan *The Second Outline Perspective Plan 1991-2000* merupakan sumber primer karena dikeluarkan oleh instansi atau pihak terkait yang mendukung penelitian ini, akan tetapi penulis terkendala dengan bahasa sumber yaitu Inggris dan Melayu. Suatu hal terpenting yang terkandung dalam sumber data tersebut adalah dimuatnya keterangan-keterangan

mengenai kebijaksanaan yang berkaitan dengan materi penelitian ini. *Kedua*, membuat suatu perbandingan di antara sumber-sumber data yang telah terkumpul. Pada proses ini dilakukan sebuah kegiatan untuk menghubungkan sumber data yang satu dengan yang lain guna memastikan tingkat validitas sumber data.

3. Interpretasi

Interpretasi merupakan kegiatan menafsirkan, memberikan makna dari fakta yang diperoleh serta menghubungkan antara sumber satu dengan lainnya yang dikaitkan dengan teori maupun konsep pendukungnya. Data dibandingkan dari sumber yang satu dengan sumber yang lain untuk mendapatkan data yang obyektif. Interpretasi merupakan kegiatan menafsirkan dan menetapkan makna dan hubungan dari fakta-fakta yang ada. Kegiatan interpretasi juga menyangkut kegiatan menyeleksi dan membuat periodisasi sejarah. (Dudung Abdurrahman, 1999: 48).

Interpretasi yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah kegiatan dalam metode sejarah untuk menghubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain sehingga dapat diketahui hubungan sebab akibat atau berbagai hal yang berkaitan dengan “Kebijakan Mahathir Mohamad Dalam Sistem Perekonomian Malaysia 1981-2003” yang menjadi obyek penelitian. Fakta-fakta tersebut kemudian ditafsirkan, diberi makna dan ditemukan arti yang sebenarnya sehingga dapat dipahami dan sesuai dengan pemikiran yang relevan, logis dan berdasarkan obyek penelitian yang dikaji

4. Historiografi

Historiografi adalah kegiatan terakhir dari metode sejarah untuk menyatakan fakta sejarah dalam bentuk penulisan sejarah berdasarkan bukti berupa sumber-sumber sejarah yang telah dikumpulkan, dikritik dan diinterpretasi. Pada tahap ini untuk menyusun fakta sejarah dibutuhkan kemampuan mengungkapkan bahasa secara baik, kemampuan untuk menempatkan fakta sejarah sesuai dengan periode, kemampuan menjelaskan apa

yang telah ditemukan dengan menyajikan bukti-bukti dan membuat garis umum yang dapat diikuti secara jelas oleh pembaca.

Untuk mencapai historiografi yang ideal, maka peneliti berusaha untuk menggunakan bahasa yang benar dan merangkaikan periodisasi secara kronologis serta memberikan bukti-bukti fakta dalam sejarah yang ditulis baik dari sumber primer atau sumber sekunder, sehingga didapat penulisan sejarah yang menarik dan disebut sejarah sebagai kisah. Dalam penelitian ini historiografi diwujudkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “Kebijakan Mahathir Mohamad Dalam Sistem Perekonomian Malaysia 1981-2003”.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Perekonomian Malaysia Sebelum Pemerintahan Mahathir Mohamad

Masalah pembangunan ekonomi merupakan suatu masalah yang dialami oleh semua negara. Bagi Malaysia, masalah terbesar yang dihadapinya berhubungan dengan kehidupan kelompok masyarakatnya yang terkotak dalam kelompok Melayu, Cina dan India sebagai akibat dari penjajahan Kolonial Inggris. Usaha meningkatkan kehidupan ekonomi Melayu, merupakan tantangan bagi pemerintah Malaysia. Mengingat bahwa orang-orang Melayu merupakan kelompok yang memegang kendali kehidupan politik dan pemerintahan Negara, namun justru tingkat ekonominya masih rendah bila dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang lain khususnya Cina.

1. Sejarah Perkembangan Perekonomian Malaysia

Pada awal mulanya, kegiatan perdagangan Malaysia dilakukan secara besar-besaran di Malaka. Tahun 1509, Malaka merupakan pusat perdagangan untuk daerah-daerah sekitarnya maupun tempat di mana negara-negara yang jauh

dari Barat dan Timur bertemu (Milne dan Mauzy, 1980: 11). Komoditi pokok dalam perdagangan itu adalah rempah-rempah, timah dan tekstil. Para pedagang mengakui kekuasaan penguasa setempat dan membayar pajak sampai 10% kepada penguasa untuk memungkinkan ikut serta dalam ekonomi perdagangan. Pedagang-pedagang luar negeri diberi tempat khusus untuk menggorganisir perdagangan dan Sultan menunjuk seorang pegawai yang disebut Syahbandar untuk mengawasi. (S. Husin Ali, 1985: 100).

Situasi politik dan ekonomi menjadi berantakan setelah jatuhnya Malaka ketangan Portugis. Setelah jatuhnya Kerajaan Malaka pada tahun 1511 dan sampai masuknya Inggris pada tahun 1786 sebagian besar perekonomian Melayu tergantung pada pertanian dan perdagangan dan para penguasa serta pemimpin kelompok tetap berperan sebagai kelompok elit yang menguasai ekonomi dan politik. (S. Husin Ali, 1985: 101).

Pada waktu Inggris memutuskan untuk melakukan intervensi ke negara-negara bagian Melayu, Inggris sudah mencapai puncak kekuasaan imperialismenya, menguasai jajahan yang tersebar di mana-mana. Dengan adanya revolusi industri di Inggris, timbullah suatu kelas kapitalis baru dan telah meluaskan pengaruhnya di antara pemerintah. Para kapitalis dan bank Inggris mempunyai kelebihan finansial yang dapat diinvestasikan dalam negara jajahan untuk pengembangan industri dalam rangka memproduksi bahan baku yang diperlukan pabrik-pabrik Inggris.

Perusahaan-perusahaan yang dimiliki dan dikuasai oleh orang-orang Inggris mulai dibangun di Semenanjung Melayu selama decade-decade pertama abad ini untuk mengelola tambang timah dan perkebunan karet. Modal Inggris meningkat pesat dan dalam tahun 1920-an telah menjadi 1.680 juta dollar. Separuhnya diinvestasikan dalam perkebunan-perkebunan karet. Perusahaan-perusahaan itu sangat ketat dikontrol oleh orang Inggris. (S. Husin Ali, 1985:102).

Keterlibatan orang-orang Melayu dalam perkebunan dan perdagangan ada dasarnya tidak ada, sekalipun dalam skala yang kecil. Kebanyakan orang-orang Melayu tinggal di daerah pedesaan dan mengolah lahan pertanian secara tradisional. Orang-orang Melayu bukan hanya tidak mempunyai modal tetapi juga tidak memiliki keahlian untuk berdagang. Kehidupan di desa mencukupi sebagian besar kebutuhan hidupnya. Sebaliknya orang-orang Cina dan India telah meninggalkan tanah airnya sebagai perintis dalam mencari kehidupan yang lebih baik.

Kalau ada perubahan untuk orang-orang Melayu pedesaan sebagai akibat dari tata ekonomi yang baru dibawa oleh orang-orang Inggris, maka perubahan itu menyangkut keterlibatan dalam pertanian yang menghasilkan barang-barang perdagangan. Karet dapat menghasilkan uang lebih banyak daripada padi. Di beberapa daerah pertanianpun karet ditanam sebagai tambahan. Partisipasi orang-orang Melayu pedesaan dalam perkebunan dan pertambangan adalah sebagai buruh, tetapi jumlahnya relatif kecil dibandingkan dengan jumlah orang-orang Cina dan India. (S. Husin Ali, 1985: 103).

Orang-orang Inggris telah mendorong orang-orang India untuk pindah dari India Selatan dan menjadi buruh pada perkebunan dan orang-orang Cina dari bagian selatan untuk bekerja pada tambang-tambang. orang-orang Inggris tidak mempekerjakan orang-orang Melayu, sesuai dengan kebijaksanaan bahwa orang-orang Melayu harus meneruskan pertaniannya secara tradisional. Orang-orang Inggris juga beranggapan bahwa orang-orang Melayu bukan merupakan buruh-buruh yang bisa bekerja keras dan tekun karena ikatan kekeluargaan dengan kampung halamannya terlalu kuat, yang memungkinkan untuk berhenti atau pulang kerumah kapan saja. Ini sulit dilakukan oleh orang-orang Cina dan India karena kampung halamannya jauh diseberang lautan. Akhirnya, orang-orang Melayu lebih suka bekerja sebagai pegawai pemerintahan. Tetapi ini berubah setelah berakhirnya Perang Dunia kedua. (S. Husin Ali, 1985: 104).

Meluasnya ekonomi keuangan di daerah pedesaan membawa akibat sebaliknya yang merugikan masyarakat yang berkecimpung dalam kegiatan-kegiatan tradisional seperti menanam padi, menangkap ikan dan menyadap karet. Sebagai akibat dari berkurangnya lahan pertanian dan eksploitasi finansial, kehidupan penduduk pedesaan yang miskin itu semakin diperas. Perbedaan antara desa dan kota dan antara yang kaya dan miskin semakin jelas.

Setelah kemerdekaan dan kekuasaan telah diambil alih dari bangsa Inggris, terjadilah perubahan politis dan administrasi. Tetapi perubahan ekonomi sedikit sekali. Orang-orang Melayu, seperti pada masa lampau tetap memusatkan kegiatan dalam pertanian di daerah pedesaan. Banyak kegiatan di bidang perkebunan, pertambangan dan perdagangan dimulai dan berkembang di negara-negara federal, terutama Perak dan Selangor meskipun perdagangan dalam jumlah besar dilakukan melalui Penang dan karet dalam jumlah besar ditanam di Johor, di samping negara-negara bagaian federal. Tetapi di negara-negara federal pertanian tetap dominan, terutama padi di Kelantan, Kedah dan Perlis meskipun beberapa di antara dilakukan di Perak dan juga di Malaka. Kegiatan perkebunan, pertambangan dan perdagangan itu tidak terdapat di pedesaan dan dengan demikian tidak memberi keuntungan langsung kepada penduduk-penduduk desa. Karena itu, orang-orang Melayu pedesaan tetap tinggal didaerah-daerah yang relatif belum berkembang dan jauh dari daerah-daerah lain. Orang-orang Melayu menghabiskan waktu dengan kegiatan pertanian tradisional seperti menanam padi yang hasilnya sangat minim. (S. Husin Ali, 1985: 106).

Diakui bahwa kemiskinan merupakan masalah utama yang harus dihadapi di negeri ini (S. Husin Ali, 1985: 107-108). Berdasarkan pengkajian yang dilakukan oleh pemerintah sendiri dalam tahun 1970, 791.800 dari 1.606.000 kepala keluarga di Semenanjung Melayu hidup dalam kemiskinan presentase kemiskinan mencapai 49,3%.

Tabel 1.

Semenanjung Malaysia: Keluarga Miskin Menurut Ras, 1970

(Sumber: S. Husin Ali, 1985: 179)

Menurut perkiraan yang dibuat tahun 1975, jumlah kaum miskin mencapai 835.100 dari 1.901.500 keluarga atau 43,9%. Berdasarkan angka-angka tahun 1975, diperkirakan bahwa dari 835.100 keluarga yang miskin 729.900 atau 87,4 % tinggal di daerah pedesaan. Kebanyakan bekerja di bidang pertanian (termasuk perikanan) dan pada umumnya menurut kategori ini, jumlah keluarga miskin yang ada di negeri ini mencapai 69%. Gambaran dewasa ini tidak banyak

	Keluarga Seluruhnya	Keluarga Miskin	Luasnya Kemiskinan	Persentase Jumlah Keluarga Miskin
Melayu	901,5	584,2	64,8	73,8
Cina	525,2	136,3	26,0	17,2
India	160,5	62,9	39,2	7,9
Bangsa lain	18,8	8,4	44,8	1,1
	1.606,0	791,8	49,3	100,0
Yang tinggal di daerah pedesaan	1.116,7	693,7	58,6	86,3
Yang tinggal di daerah perkotaan	439,3	108,1	24,6	13,7

berubah. Negara-negara bagian yang mempunyai presentase kemiskinan lebih tinggi daripada angka yang meliputi seluruh negara 43,9% adalah Kelantan (65%). Perlis (59%), Trengganu (55%) dan Kedah (48,9%). (S. Husin Ali, 1985: 108).

Berbicara tentang kemiskinan di daerah pedesaan, itu berarti kita berbicara tentang kemiskinan orang-orang Melayu karena mayoritas penduduk pedesaan adalah orang-orang Melayu (sekitar 67%). Terjadinya kemiskinan di

daerah kota jauh lebih kecil daripada di desa-desa dan di kota orang-orang Melayu merupakan kelompok minoritas.

Kemiskinan dan peningkatan perbedaan ekonomis merupakan akibat dari sistem ekonomi yang di dasarkan pada persaingan bebas (*laissez faire*) (S. Husin Ali, 1985:110). Filsafat itu tersebar luas di Barat terutama di Inggris ketika perekonomian negara itu berkembang dan kerajaannya meluas. Ciri utama dari filsafat ini adalah bahwa ketika kegiatan ekonomi dan mereka yang melaksanakannya harus bebas dari kontrol atau campur tangan pemerintah. Kriteria keberhasilan adalah jumlah keuntungan yang diperoleh. Semakin besar keuntungannya yang diperoleh dianggap semakin berhasil. Dalam persaingan ini keberhasilan suatu kelompok dalam mengalahkan kelompok lain menimbulkan monopoli. Orang-orang yang memegang monopoli dapat memiliki kekuasaan absolut untuk melakukan sesuatu yang dianggap perlu demi mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Para kapitalis yang memegang monopoli dapat menetapkan harga yang tinggi untuk hasil produksinya dan menentukan pendapatan yang rendah bagi buruh-buruhnya. Akibatnya, akan terjadi eksploitasi yang rawan dan semakin meluas.

Inggris dengan kekuatan politisnya dapat menguasai sumber-sumber ekonomis yang kaya di negara ini: perkebunan, pertambangan dan perdagangan. Inggris memperoleh keuntungan yang sangat besar dan sebagian terbesar dari keuntungan itu diangkut ke negeri dan jajahan Inggris. Kekuatan ekonomi yang berada ditangan para kapitalis Inggris yang memegang monopoli terus berlangsung setelah kemerdekaan. Sistem persaingan bebas yang telah berurat berakar selama Inggris berkuasa masih tetap dipraktikkan (S. Husin Ali, 1985: 111). Sesuai dengan sistem ekonomi ini, sektor swasta mempunyai peranan besar dan sejumlah besar investasi diperlukan dalam sektor swasta ini baik dari para pemilik modal asing maupun pemilik modal dalam negeri. Penanaman modal asing diterima baik, bahkan didorong dengan berbagai rangsangan seperti status

sebagai *pioneer*. Walaupun penanaman modal Inggris melebihi yang lain, orang-orang Amerika, Jepang, Australia dan Kanada juga mengalami kemajuan.

Konsep inti dari sistem persaingan bebas yaitu: (a) pemerintah memberi kebebasan penuh dalam aktivitas ekonomi; (b) sektor swasta diharapkan memainkan peranan penting dalam pengembangan perekonomian di negeri itu; dan (c) persaingan digalakkan dengan tujuan memperoleh efisiensi dan memaksimalkan keuntungan (S. Husin Ali, 1985: 111). Di Malaysia ada beberapa kegiatan ekonomi, termasuk pertanian, perumahan dan transportasi di mana sebagian besar diorganisir oleh pemerintah atau oleh badan semi pemerintah, tetapi modal yang diinvestasikan relatif kecil dibandingkan dengan sektor swasta. Karena pemerintah beranggapan bahwa penanaman modal asing sangat penting, maka diusahakan untuk menarik penanaman modal asing itu. Sebuah komite kabinet telah dibentuk dan undang-undang yang sesuai telah diubah dan beberapa delegasi telah dikirim keluar negeri dengan tujuan meyakinkan para pemilik modal luar negeri bahwa keadaan di negeri ini cukup stabil dan memungkinkan modal yang diinvestasikan mendatangkan keuntungan yang besar. Pemerintah menyadari betapa banyak uang yang telah dikeluarkan dan proyek-proyek yang telah dilaksanakan namun tak pernah mencapai target pembangunan secara keseluruhan seperti telah direncanakan. Sekiranya pelaksanaan itu tidak mencapai sasaran, maka situasi politik akan terancam. Itulah sebabnya mengapa peranan investor swasta menjadi sangat penting. (S. Husin Ali, 1985: 112).

Untuk jangka panjang sistem persaingan bebas hanya akan menjadi akar dari berbagai masalah dan sebagai penghambat kemajuan bagi orang-orang Melayu. Oleh sebab itu diperlukan suatu perbaikan secara menyeluruh di bidang perekonomian. Suatu tuntutan yang sangat dirasakan oleh orang-orang Melayu telah diungkap dengan insiden rasial (13 Mei 1969). Secara sepintas seakan merupakan bentrokan biasa, tetapi persoalan dasarnya adalah ketidakpuasan mengenai masalah ekonomi dan politik (S. Husin Ali, 1985: 115). Pemerintah

rupanya memaklumi peristiwa itu dan karena itu pemerintah mencoba memperbaiki situasi dengan mengadakan perubahan ekonomi yang telah terjadi insiden itu.

Masalah pembangunan ekonomi di Malaysia, terutama dalam usaha memajukan kehidupan masyarakat Melayu sebagai mayoritas, merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh para pemimpin Malaysia. Kebijakan yang diambil tidak dapat terlepas daripada usaha kearah peningkatan taraf hidup kelompok Melayu yang sekalipun memegang kursi pemerintahan namun keadaan ekonomi justru lemah dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang lain.

Posisi kelompok Melayu dalam pemerintahan inilah yang menguntungkan dalam usaha menentukan kebijaksanaan. Mengingat bahwa yang memerintah di Malaysia adalah partai terkuat kelompok Melayu (UMNO). Para pemimpin partai yang tidak lain juga menjadi perdana menteri Malaysia, mempunyai peranan yang besar dalam menentukan keberhasilan program kebijaksanaan program pembangunan yang dijalankan. Oleh sebab itu, di bawah ini akan penulis uraikan berbagai dilema dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia, yang dijabarkan secara kronologis berdasarkan masa pemerintahan masing-masing pemimpin Malaysia sebagai berikut:

2. Masa Kepemimpinan Tunku Abdul Rahman (1951-1971)

Masa kepemimpinan partai UMNO di bawah Tunku Abdul Rahman tidak jauh berbeda dengan apa yang berlaku pada masa Dato Onn. Barangkali karena latar belakangnya dari istana telah membuat Tunku yang diberi gelar “Bapak Kemerdekaan” karena berhasil membawa kemerdekaan Malaysia itu banyak mengesampingkan pandangan umum dalam UMNO.

Pada masa kepemimpinan Tunku Abdul Rahman, masalah pengelompokan ras segera muncul dalam kebijakan pembangunan. Para pemimpin Melayu yang sejak awal sangat prihatin terhadap nasib kaumnya

memberi prioritas pada pembangunan di daerah pedesaan yang tidak lain adalah membangun orang Melayu. Usaha kearah situ dapat dilihat dari program pembangunan yang dilakukan sebagai berikut :

a. Rencana Lima Tahun Pertama (First Malaya Plan, 1956-1960)

Dasar dari rencana ini dilaporkan melalui misi dari IBRD (*International Bank of Reconstruction and Development*) yang datang di Malaysia Barat tahun 1954 pada saat keadaan darurat dan menurunnya potensi ekonomi negara, akibat kenaikan harga karena perang Korea, laporan dari IBRD banyak membantu dalam memformulasikan rencana ini yang lebih dikenal dengan Rencana Malaysia pertama. Rencana ini merupakan studi yang mendalam dan komprehensif terhadap berbagai kebutuhan dan permasalahan di Malaysia Barat. Rencana ini sejalan dengan usaha IBRD untuk merehabilitasi industri karet dan pembangan sektor kehidupan di pedesaan. Juga kenyataan terhadap peningkatan industri timah, sehingga hal ini juga menjadi prioritas utama.

Secara singkat, Rencana Malaysia Pertama memusatkan perhatian kepada: (1) sektor pertahanan keamanan, (2) kebutuhan akan dana bagi keadaan darurat seperti menurunnya nilai harga karet dan timah sebagai akibat dari kenaikan harga yang sangat cepat karena perang Korea. (David Kim, 1982-1983: Vol. 55; No. 4: 617).

Keberhasilan daripada pelaksanaan rencana di atas banyak dipengaruhi oleh keadaan darurat yaitu: masalah pengaturan yang tidak dapat dihindari dari aparat pemerintah setelah kemerdekaan tahun 1957 serta adanya resesi ekonomi dunia antara tahun 1957-1958 yang menyebabkan menurunnya pendapatan.

Program di sektor publik yang diperhatikan seperti transportasi, pertanian, komunikasi, industri, pelayanan sosial dan aktivitas-aktivitas umum dapat dikatakan sukses. Di sektor privat di mana merupakan 60% dari total *investment*, terjadi peningkatan *private-investment* untuk 5 tahun. Sedangkan di

sektor agricultural yang berkembang pesat adalah industri karet di mana terjadi peningkatan dalam penanaman karet dari 30% menjadi 46%. (David Kim, 1982-1983: Vol. 55; No. 4: 622-624).

b. Rencana Lima Tahun Kedua (*Second Malaya Plan, 1961-1965*)

Pada kenyataannya ada 5 hal utama yang dilakukan dalam masa ini, yaitu: (1) memperbaiki standar kehidupan di pedesaan; (2) memperluas lapangan pekerjaan; (3) mengusahakan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat; (4) diversifikasi kegiatan-kegiatan pertanian dan industri; serta (5) perluasan fasilitas sosial. (David Kim, 1982-1983: Vol. 55; No. 4: 617).

Rencana pembangunan pada masa ini mempunyai target untuk meningkatkan lapangan pekerjaan, di mana lebih banyak fasilitas dan kesempatan dibuat untuk memperbaiki ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat pedesaan. Anggaran yang dikeluarkan pemerintah di sektor publik sebesar \$2,150M ini lebih besar 2 kali lipat dari jumlah nyata pengeluaran publik 5 tahun yang lalu. Di sektor privat diperkirakan membutuhkan \$2,900M (peningkatan 40% dari rencana 5 tahun yang lalu). Peningkatan ini adalah dalam sektor pabrik, transportasi jalan, konstruksi dan sektor perdagangan. Output tertinggi ada pada konstruksi industri yaitu sebesar 79% dan yang terendah ada pada pertanian dan sektor pelayanan lain yaitu sebesar 15%./ (David Kim, 1982-1983: Vol. 55; No. 4: 618).

Tingkat lapangan pekerjaan diharapkan meningkat dari 2.215.000-2.555.000 (kenaikan 15%). Di balik keberhasilan dalam memperluas lapangan pekerjaan, namun terlihat bahwa tingkat pengangguran masih relatif tinggi (6%). Dilain pihak, pembangunan pertanian infrastruktur telah memperbaiki kesehatan dan kondisi-kondisi pemukiman masyarakat pedesaan dan akibat penjualan yang lebih murah dan mudah, maka pemerintah dianggap berhasil dalam meningkatkan

standar hidup masyarakat pedesaan. (David Kim, 1982-1983: Vol. 55; No. 4: 625).

c. Rencana Malaysia Pertama (1966-1970)

Sebelum terbentuknya Federasi Malaysia (September 1963) ketiga komponen negara bagian (Malaysia Barat, Sabah dan Serawak) mempunyai rencana pembangunan masing-masing. Rencana Malaysia pertama ini merupakan rencana integrasi yang pertama bagi ketiga wilayah tersebut. Dan merupakan tahap awal dari rencana program pembangunan jangka panjang (20 tahun), yang mencakup program jangka pendek pemerintah untuk mengatasi masalah sosial-ekonomi negara dengan luar serta strategi pembangunan ekonomi untuk jangka panjang. (UMNO 20 Tahun, tanpa tahun: 78).

Rencana Malaysia pertama menunjukkan usaha yang giat dari pemerintah untuk membuat kemajuan dan menjalankan pembangunan dalam waktu 5 tahun yang akan datang, adapun rencana ini mempunyai empat tujuan utama. *Pertama*, ialah untuk mempersatukan seluruh rakyat dan negara-negara bagian Malaysia dengan mengadakan suatu rencana bagi kepentingan seluruh rakyat dan negara. *Kedua*, untuk memperbaiki taraf hidup rakyat dengan membuat berbagai rencana serta kemudahan yang dapat lebih meningkatkan pendapatan rakyat, terutama sekali yang berpendapatan rendah. *Ketiga*, untuk menambah lapangan pekerjaan serta kemudahan-kemudahan bagi rakyat untuk mendapat pekerjaan. *Keempat*, untuk meneruskan usaha menjalankan kegiatan-kegiatan baru dalam bidang ekonomi seperti pertanian dan industri agar ekonomi Malaysia ini tidaklah senantiasa bergantung semata-mata kepada karet dan timah. (UMNO 20 Tahun, tanpa tahun: 79).

Tujuan dasar dan teknik pelaksanaan pada dasarnya adalah sama dengan rencana-rencana pembangunan yang terdahulu. Namun tujuan yang paling mendasar adalah menciptakan suasana di mana ketiga kelompok etnis (Melayu,

Cina dan India) dapat hidup tenteram dan harmonis. Secara umum, Rencana Malaysia Pertama ini menelan biaya sebesar \$10,500 juta yaitu: \$4,550 juta dari sektor publik dan \$5,950 juta dari sektor privat. Dari pendapatan \$4,550 ada di sektor publik tersebut, sebanyak \$3,810 juta akan dibelanjakan untuk pembangunan dibidang-bidang sosial dan ekonomi, seperti kesejahteraan sosial, pendidikan, pertanian dan pembangunan pedesaan sebanyak \$600 juta lagi bagi pertahanan negara dan sebanyak \$140 juta bagi keselamatan dalam negeri. (UMNO 20 Tahun, tanpa tahun: 79).

Adapun keberhasilan pelaksanaan tergantung bukan saja dari pemerintahan yang menjalankan melainkan juga kepada adanya kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat Malaysia. Bersamaan dengan dilaksanakannya rencana pembangunan, isu-isu rasial dan komunal selalu merupakan isu sentral dari politik Malaysia. Terutama menjelang pemilihan umum pada tahun 1969, isu rasial ini menimbulkan masalah yang besar bagi kepemimpinan Tunku Adul Rahman. Rencana pembangunan yang ada pada periode ini sempat terputus akibat munculnya kerusuhan rasial (13 Mei 1969) yang merupakan kerusuhan rasial yang terbesar yang pernah terjadi di Malaysia.

d. Konflik Rasial 13 Mei 1969

Sebenarnya kehebatan potensi konflik dari isu-isu tersebut telah dapat diredam dengan adanya sistem partai aliansi yang merupakan gabungan dari partai UMNO (*United Malaya National Organization*) dan MIC (*Malayan Indian Congres*). Sistem ini dapat berjalan dengan baik selama polarisasi politik di antara etnik tidak diperuncing oleh proses "*bargaining*" dalam aliansi atau oleh melemahnya dukungan dari satu atau lebih partner komunal dalam kondisi yang memimpin. Munculnya polarisasi etnik komunal dapat mengakibatkan meningkatnya desakan dari partai oposisi serta akan mempersulit proses *bargaining* dalam aliansi.

Ada beberapa faktor yang memperuncing polarisasi komunal dan melemah sumber dukungan pemerintah menjelang pemilihan umum tahun 1969 yaitu: (1) pemisahan diri Singapura dari Federasi Malaysia pada tahun 1965, mempunyai dampak yang kuat terhadap masalah komunal. Mengingat bahwa mayoritas penduduk di Singapura adalah keturunan Cina; (2) adanya perdebatan terhadap RUU tentang Bahasa Nasional pada tahun 1967 yang menginginkan adanya perubahan Bahasa Melayu sebagai bahasa resmi negara. Hal ini menimbulkan ketegangan komunal di antara ketiga kelompok masyarakat; (3) hal yang paling penting dari keadaan ini yang memungkinkan partai oposisi menjadi lebih efektif dalam bersatu memperbesar kekuatan dalam pemilu guna menantang kekuatan partai aliansi. (Robert N. Kearney, 1975: 186).

Partai Gerakan Rakyat Malaysia, berusaha memperbaiki distrik pemilihan yang dijabat oleh adanya pembagian komunal. Kebanyakan dari partai oposisi lebih membuka diri terhadap dukungan komunal dengan cara mengkritik keseluruhan struktur kebijakan komunal yang selama ini menjadi bahan *bargaining* di dalam aliansi. Oleh sebab itu, dalam kampanye pemilu tahun 1969 partai aliansi diserang oleh PAN *Malayan Islamic Party* dengan alasan terlalu banyak memberikan izin kepada kelompok non-Melayu. Di lain pihak, partai DAP (*Democratic Action Party*) dan partai PPP (*People Progressive Party*) serta partai Gerakan Rakyat Malaysia, menentang partai aliansi karena perhatian yang terlalu besar diberikan terhadap hak-hak istimewa Melayu dan Kebijakan-kebijaksanaannya yang terlalu bersifat pro-Melayu. Sekalipun kampanye pemilu itu sendiri berjalan damai dan tidak militan, namun hal ini membawa banyak tantangan terhadap kebijakan-kebijaksanaan komunal penting yang dibuat oleh pemerintah aliansi. Untuk alasan ini, maka hasil pemilu ini mempunyai arti simbolis dan politis yang besar dimasa yang akan datang guna memutuskan kebijakan-kebijakan publik dalam mengatasi isu-isu politik yang paling sukar di Malaysia. (Robert N. Kearney, 1975: 186).

Dalam perhitungan jumlah suara di Malaysia Barat partai aliansi telah memenangkan 66 kursi untuk menjamin kontrolnya dalam parlemen. Tetapi gabungan oposisi telah memperoleh 37 kursi dan memperoleh 51,6% suara. Partai aliansi telah menderita kemunduran besar dengan kehilangan 22 kursi parlemen dibanding pemilihan sebelumnya dan telah kehilangan kontrol dalam sidang-sidang legislatifnya di Kelantan, Penang dan Perak, sementara di Selangor partai aliansi mengalami jalan buntu dalam menghadapi gabungan oposisi. Hasil pemilihan tersebut didapatkan karena kekhilafan yang besar dari pemilih Cina dan India terhadap partai-partai oposisi dan telah menunjukkan ketidakmampuan MCA dan MIC untuk menambah suara bagi aliansi. Gejala ini diperbesar oleh kesalahan kecil Melayu terhadap partai PMIP (*Pan Malayan Islamic Party*).

Selama partai oposisi belum memenangkan pemilu akan membawa dampak psikologis terhadap adanya kegelisahan masyarakat Melayu berasumsi bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro Melayu itu sangatlah labil karena dapat diserang setiap saat dan supremasi politik Melayu sedang dalam keadaan bahaya. Keadaan ini menguntungkan oposisi karena dijamin oleh perolehan cukup suara untuk meyakinkan bahwa aliansi tidak dapat lebih lama lagi mengubah konstitusi secara sepihak karena aliansi telah kehilangan 2/3 suara mayoritas di parlemen.

Kecemasan Melayu terhadap pemilu mencapai puncaknya pada saat partai oposisi di Kuala Lumpur mengadakan aksi turun ke jalan guna merayakan keberadaan peranan oposisi yang besar dalam pemilihan. Keesokan harinya demonstrasi balasan dilakukan oleh kepala perwakilan aliansi Selangor, Dato Harun bin Haji Idris. Para pemuda Melayu ikut serta bergabung dalam kelompok pro pemerintah, namun dalam waktu singkat demonstrasi ini meningkat menjadi suatu usaha untuk menyerang kelompok Cina. Krisis kekerasan ini yang tidak lain didorong oleh adanya isu komunal, berlangsung selama 5 hari. (Tunku Abdul Rahman, 1969).

Sebagai akibat dari adanya kerusuhan rasial tersebut, maka pemerintah mengumumkan negara dalam keadaan darurat, konstitusi dan parlemen ditunda, serta seluruh otoritas pemerintah berada ditangan sebuah Dewan Operasional Nasional (*National Operations Council*) yang terdiri dari 6 anggota Melayu dan 2 non-Melayu, kebanyakan berasal dari kabinet aliansi terdahulu. Selama 21 bulan badan ini dipimpin oleh wakil perdana menteri Tun Abdul Razak Hussein, yang menjalankan sepenuhnya tugas eksekutif dan menahan para penantang pemerintah. (Robert N. Kearney, 1975: 188).

Sebagai kelanjutan dari kerusuhan ini pemerintah secara bertahap berusaha merestorasi kembali kekuatan sipil untuk mencegah terjadinya kembali kerusuhan berdarah. Sebagai tahap awal, pemerintah membentuk suatu Dewan Penasehat (*National Consultative Council*) dan mengundang semua partai-partai mayoritas (kecuali partai komunis Melayu/*Malayan Communist Party*) untuk mengirim wakil-wakilnya. Tetapi partai DAP (*Democratic Action Party*) mencalonkan seorang wakil yang telah ditahan pemerintah pada masa keadaan darurat dan saat pemerintah menolak untuk membebaskannya, partai DAP untuk memutuskan tidak bekerjasama dengan dewan penasehat pemerintah. Sebagai tambahan terhadap para pemimpin partai, para pemuka agama, profesi dan kelompok minoritas pun diundang untuk mengirimkan wakil-wakilnya. Ke 65 anggota dewan penasehat bertanggungjawab untuk mencari penyelesaian yang permanen terhadap masalah-masalah rasial, guna meyakinkan bahwa tragedi 13 Mei tidak akan terjadi lagi. Selama satu setengah tahun, dewan penasehat mencari jalan keluar terhadap penyelesaian masalah rasial dan ekonomi yang kemudian operasionalisasinya dilakukan oleh Dewan Operasi Nasional.

e. Ideologi Nasional (Rukunegara)

Secara umum pemerintah menjadi begitu peka terhadap kekhawatiran masyarakat Melayu akan kehilangan kedudukan dominan dalam sistem politik, di

mana bagi kebanyakan masyarakat Melayu hal ini merupakan jaminan utama dalam menghadapi dominasi dari kelompok masyarakat lain yang lebih berhasil dan agresif dalam ekonomi.

Melihat kecenderungan ini, pemerintah memutuskan untuk mengintensifkan program ekonomi yang diusahakan untuk memberi bagian ekonomi yang besar kepada masyarakat Melayu, sebagai usaha yang bersifat yaitu untuk meningkatkan ekonomi nasional. Pemerintah memutuskan suatu sistem yang lebih luas bagi hak-hak istimewa Melayu dan berpaling pada usaha ekonomi yang utama yaitu mengadakan restrukturisasi masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepada kelompok Melayu bagian yang lebih besar dalam sektor ekonomi yang selama ini ada ditangan kelompok non-Melayu.

Restrukturisasi masyarakat sudah dipikirkan pemerintah sebelum krisis rasial bulan Mei 1969 terjadi. Di mana dengan memberi kelompok Melayu bagian dalam sektor ekonomi akan lebih mempermudah untuk menerima partisipasi dari kelompok non-Melayu dalam politik. Namun ada masalah yang mendasar dari strategi ini, yaitu bahwa strategi ini dinilai terlalu bersifat komunal. Oleh sebab itu pemerintah perlu mencari berbagai cara guna meredam munculnya kesalahpahaman dalam debat dan diskusi publik, pada saat membicarakan isu-isu yang sangat komunal ini serta dalam waktu yang bersamaan berusaha agar mendapat dukungan bagi keberhasilan program yang diajukan.

Pemerintah mengalami dilema, sehingga atas anjuran dari dewan penasihat masalah tersebut harus dilindungi dengan sebuah ideologi nasional (Robert N. Kearney, 1975: 189). Maka pada hari ulang tahun kemerdekaan Malaysia tanggal 31 Agustus 1970, Yang Dipertuan Agung mengumumkan deklarasi Rukunegara sebagai sebuah pernyataan resmi dari adanya ideologi nasional yang terdiri dari 5 prinsip sebagai berikut: (1) Kepercayaan Kepada Tuhan; (2) Kesetiaan Kepada Raja dan Negara; (3) Keluhuran Perlembagaan; (4)

Kedaulatan Undang-undang; (5) Kesopanan dan Kesusilaan. (A. W. Widjaja, 1987: 91-92).

Ideologi Rukunegara merupakan sebuah pernyataan dukungan terhadap kebijaksanaan aliansi dalam menghadapi isu komunal. Untuk mengembalikan kedudukan parlemen, pemerintah mengharapkan agar semua partai politik dapat menerima Rukunegara serta melindungi diskusi publik atau kritik terhadap bagian-bagian dari konstitusi yang tercantum dalam deklarasi Rukunegara termasuk topik-topik seperti status dan kekuasaan para pemimpin Melayu, kewarganegaraan, hak-hak istimewa Melayu dan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional.

Perdana menteri yang baru Tun Abdul Razak Hussein telah berhasil membuat diterimanya amandemen serta pembuatan konstitusi ini sehingga dapat mengakhiri diskusi publik terhadap isu-isu komunal yang sensitif ini, serta dapat memperkuat keadaan ke arah diberlakukannya kembali parlemen lebih lanjut perdana menteri menjelaskan bahwa amandemen ini dipertimbangkan sangat perlu untuk mengatasi terjadinya kembali insiden 13 Mei 1969, yang hanya melalui jalan itu dapat menjamin masa depan dari sistem demokrasi pemerintah serta terwujudnya persatuan.

Dari semua penjelasan tersebut di atas, dapat kita lihat bahwa perencanaan pembangunan di Malaysia sebelum tahun 1970-an ternyata belum berhasil karena golongan Melayu merasa tidak puas dengan hasil pembangunan yang dicapai dan dianggap lebih menguntungkan golongan non-Melayu. Ketidakpuasan ini kemudian mencapai puncaknya dalam konflik (13 Mei 1969). Peristiwa rasial ini memaksa para pemimpin Malaysia untuk meninjau kembali strategi pembangunannya.

Tunku Abdul Rahman sekalipun merupakan tokoh kharismatik di Malaysia, namun pamor dan pengaruhnya semakin merosot terutama sesudah peristiwa 13 Mei 1969 yang merupakan krisis rasial antara Melayu dan Cina yang

paling hebat. Abdul Rahman secara sukarela kemudian mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden partai UMNO/perdana menteri Malaysia.

3. Masa Kepemimpinan Tun Abdul Razak Hussein (1971-1976)

Pamor politik Tunku Abdul Rahman dan pengaruhnya semakin merosot terutama sesudah peristiwa rasial 13 Mei 1969. berlanjut dari krisis tersebut terjadi konflik antara kelompok Tunku Abdul Rahman dengan Tun Razak dalam pucuk pimpinan UMNO. Datuk Musa Hitam saat itu aktif dalam kelompok Tun Razak. Disini Musa Hitam dipertemukan dengan keinginan yang sama dengan Dr. Mahathir yang aktif dalam kelompok mahasiswa yang juga menganggap gerakan politik Tunku sangat lamban. Musa Hitam dan Mahathir kemudian menyokong barisan Tun Razak, namun kegiatan keduanya yang terlalu ekstrim menyebabkan dipecat dari keanggotaan UMNO pada tahun 1969 oleh Tunku Abdul Rahman. (J. Victor Morais, 1982: 107).

Pada tahun 1971 Tunku mengalihkan kekuasaannya kepada orang urutan nomer dua dalam kepemimpinan UMNO yaitu Tun Abdul Razak Hussein merupakan presiden UMNO ketiga dan perdana menteri Malaysia kedua, setelah Tunku Abdul Rahman beliau masih mempunyai hubungan dengan istana Pahang.

Tun Razak mengeluarkan *New Economic Policy* sebagai tindak lanjut peristiwa berdarah 13 Mei 1969 yang merupakan rancangan pembangunan ekonomi secara berperingkat selama 20 tahun (1971-1990) dan menjadi landasan Rangka Rancangan Jangka Panjang Pertama (RRJP 1). Kebijakan ekonomi baru bagi Malaysia ini, mempunyai dua tujuan utama: (1) untuk menghapuskan kemiskinan dengan cara meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja bagi semua warganegara Malaysia tanpa memandang ras; (2) untuk mempercepat proses restrukturisasi masyarakat Malaysia guna memperbaiki ketidakseimbangan ekonomi sehingga tidak terdapat lagi pembedaan identifikasi menurut ras dalam fungsi ekonomi. (*The Second Outline Perspective Plan 1991-2000*, 1991: 7).

Usaha mewujudkan perpaduan dan keutuhan rakyat maka pada tahun 1974 dibentuk Barisan Nasional (Diane K. Mauzy, 1983: 48), yang merupakan koalisi dari 13 partai politik di mana salah satunya yang paling menonjol hingga saat ini adalah UMNO.

Angkatan baru yang tidak ada hubungannya dengan UMNO tahun 1946 dibawa masuk untuk meneruskan perjuangan UMNO (khususnya datuk Musa Hitam dan Mahathir Mohamad). Di zaman kepemimpinan Tun Razak ini keduanya duduk dalam kabinet, Mahathir menjadi menteri pendidikan serta Musa Hitam adalah menteri perindustrian (Harold Crouch, Lee Kam Hing dan Michael Ong, 1980: 15). Dalam kepemimpinan Tun Razak pembangunan ekonomi di Malaysia dilanjutkan melalui Rencana Malaysia Kedua (1971-1975).

a. Rencana Malaysia Kedua (1971-1975)

Formulasi dari rencana pembangunan ini amat dipengaruhi oleh terjadinya peristiwa rasial tahun 1969. Rencana ini merupakan upaya pemerintah untuk meninjau kembali perekonomian rakyat, akibatnya rencana ini lebih banyak mengutamakan pada distribusi pendapatan dan kekayaan. Bersamaan dengan itu dikeluarkan kebijakan ekonomi yang baru bagi Malaysia yang lebih dikenal dengan *New Economic Policy* (NEP). (R. S. Milne, 1986: 1364).

b. New Economic Policy

Kebijakan ekonomi baru bagi Malaysia mempunyai dua tujuan utama: (1) untuk menghapuskan kemiskinan dengan cara meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja bagi semua warganegara Malaysia tanpa memandang ras; (2) untuk mempercepat proses restrukturisasi masyarakat Malaysia guna memperbaiki ketidakseimbangan ekonomi sehingga tidak terdapat lagi pembedaan identifikasi menurut ras dalam fungsi ekonomi.

Perubahan-perubahan ini direncanakan sebagai program jangka panjang lebih dari 20 tahun (periode 1971-1990) dan pertama kali dibuat untuk

memformulasikan dan diimplementasikan selama periode ini. Strategi yang dilakukan pemerintah Malaysia dalam Rencana Malaysia kedua ini, berfokus pada dua masalah yaitu: memberantas kemiskinan dan restrukturisasi masyarakat. Berbeda dengan Rencana Malaysia pertama, pemerintah diharapkan lebih aktif dan langsung terjun dalam mengurangi ketidakseimbangan ekonomi di antara Melayu dan non-Melayu. Pembangunan lahan dengan partisipasi Melayu dalam perdagangan dan bisnis terlihat dengan dibentuknya perusahaan-perusahaan bagi golongan Melayu dalam badan-badan resmi seperti *Perbadanan Nasional Berhad* (PERNAS). (Sritua Arief dan Raymond J. G. Wells, 1985: 48).

Pada masa-masa sebelumnya program yang melibatkan Melayu di sektor pertanian modern terkonsentrasi pada penyediaan fasilitas pendidikan dan kredit. Program yang pasif ini gagal dan pemerintah saat ini memutuskan untuk berperan langsung secara aktif dalam program ini yaitu bahwa ada tahun 1990, 30% dari aktivitas perdagangan dan industri itu diharapkan ada dalam manajemen dan penguasaan Melayu. Bersamaan dengan berakhirnya pelaksanaan Rencana Malaysia Kedua, Tun Razak bercita-cita untuk mngemukakan diberlakukannya Rencana Malaysia Ketiga (Sopiee Mohamed Noordin, 1976: 33). Namun sebelum hal in berhasil dilakukan pada tahun 1976 Tun Razak meninggal dunia dalam kedudukannya sebagai perdana menteri dan yang menjadi wakilnya adalah Tun Hussein Onn. Sehingga secara otomatis pada tanggal 15 Januari 1976 Tun Hussein Onn mengabil alih jabatan sebagai presiden UMNO keempat dan menjadi perdana menteri Malaysia ketiga setelah Tun Abdul Razak. (J. Victor Morais, 1981: 33).

4. Masa Kepemimpinan Tun Hussein Onn (1976-1981)

Tun Hussein Onn adalah putra dari Dato Onn bin Jaffar seorang pembesar dari Johor dan pendiri UMNO tahun 1946. Pada awal masa kepemimpinan Hussein Onn mewarisi masalah yang belum sempat diselesaikan

oleh Tun Razak yaitu pertentangan orang lama dan orang baru di dalam UMNO yang semakin memuncak. Hussein Onn langsung dihadapkan ada persoalan yang siapa yang harus dilantiknya menjadi wakil perdana menteri sesuai dengan hak prerogratifnya. Waktu itu disebut-sebut nama Tan Sri Ghazali Syafei yang terkenal sebagai menteri luar negeri dan berperan dalam menormalisasi hubungan Malaysia-Indonesia, juga Ghafar Baba seorang guru yang pernah menjadi pejabat perdana menteri di zaman Tun Razak jika keluar negeri.

Hussein Onn secara mengejutkan mengumumkan Mahathir sebagai wakil perdana menteri. Barisan Mahathir-Musa Hitam yang giat di zaman kepemimpinan Tunku Abdul Rahman dan Tun Razak kini berada di atas angin. Mahathir yang saat itu menjadi menteri pendidikan digantikan oleh Musa Hitam. (Stuart Drummond, 1981: 318).

Dalam pemilu UMNO tahun 1978 sekumpulan pemimpin lama dikepalai oleh Haji Sulaiman Palestin menentang Hussein Onn untuk kursi presiden UMNO. Hal ini merupakan peristiwa yang pertama kali dalam sejarah nasional partai UMNO, di mana calon presiden partai ada yang menandingi presiden yang sedang berkuasa Hussein Onn ditantang H. Sulaiman Palestin seorang tokoh UMNO yang piawai juga untuk menduduki jabatan presiden partai. Walaupun Sulaiman kalah dengan mayoritas suara yang meyakinkan Hussein Onn, namun kejadian yang tidak pernah berlaku sebelumnya itu cukup menunjukkan suara protes yang memberi isyarat bahwa kepemimpinan Hussein Onn sedang menurun.

Tradisi dalam UMNO untuk membiarkan jabatan presiden dan timbalan (wakil presiden) dimenangkan tanpa bertanding sebagai tanda perpaduan dan dukungan yang bulat bagi pimpinan tertinggi partai namun. Namun terlihat dalam periode ini bahwa tradisi tersebut telah bergeser. Sekalipun demikian terpilihnya Hussein Onn sebagai presiden UMNO dalam pemilihan partai tahun 1978, menandakan bahwa secara resmi Hussein dapat melanjutkan program

pembangunan yang telah disusun pada masa Tun Razak yaitu Rencana Malaysia Ketiga. (Robert O. Tilman dan Jo H. Tilman, 1971: 150-151).

Rencana Malaysia Ketiga (1976-1980) dikeluarkan pada pertengahan tahun 1976, setelah setempat tertunda beberapa bulan akibat kematian Tun Razak. Setelah dimunculkan bulan Juli 1976 baru peranan Hussein Onn dapat terlihat.

Suatu perkembangan penting yang terlihat dalam rencana baru adalah kesadaran bahwa dominasi Melayu dalam pemerintahan mewujudkan suatu kebijakan untuk menggunakan badan-badan instansi yang lebih luas seperti: *Perbadanan Nasional Berhad* (PERNAS), *Majelis Amanah Rakyat* (MARA) dan *Urban Development Authority* (UDA) guna membantu Melayu agar bisa lebih bersaing ternyata belum berhasil. Pemerintah menyadari akan adanya dua perkembangan penting sejak tahun 1970 dalam politik Malaysia. Pertama usaha untuk mencapai target 30% pembagian ekonomi bagi Melayu pada tahun 1990 adalah sulit untuk dicapai. Kedua, usaha memajukan kelompok etnis Melayu secara tidak langsung telah menghasilkan kelompok baru elit Melayu, di mana dalam demonstrasi mahasiswa 1974 dengan cepat terpolitisir. Pada saat yang bersamaan terlihat bahwa sekalipun rencana yang lalu telah membantu dalam pendidikan bagi sebagian besar Melayu untuk masuk dalam bidang bisnis namun pemerintah masih gagal dalam membantu secara nyata mayoritas Melayu di daerah pedesaan yang miskin.

Tuntutan juga datang dari kelompok etnis Cina dan India yang jelas juga harus diberi perhatian utama dibandingkan dengan rencana yang lalu. Oleh sebab itu rencana Malaysia Ketiga lebih memperluas pandangannya terhadap keseluruhan lapisan masyarakat Malaysia. Orientasi khusus yang meliputi semua lapisan masyarakat Malaysia ini, menjadi suatu peristiwa politik sesaat rencana baru ini akan dikeluarkan. Kematian Tun Razak bulan Januari 1975 memberikan peluang bagi penggantinya yaitu Hussein Onn. Di mana dalam karir politik Hussein Onn memberikan dukungan yang kuat bagi persatuan semua lapisan

masyarakat Malaysia daripada hanya untuk golongan Melayu. Karena alasan ini, Hussein Onn mengundurkan diri dari partai Aliansi pada tahun 1959 dan meninggalkan politik karena saat itu partai Aliansi menolak membuka diri bagi anggota non-Melayu. Kembali dalam politik atas desakan Tun Razak setelah krisis 1969, Hussein Onn sebagai wakil perdana menteri secara tegas tidak merubah pandangannya. Oleh sebab itu dalam masa pergantiannya sebagai perdana menteri (Januari 1976) kesempatan ini digunakan untuk memperluas inisiatif dari Tun Razak dalam bentuk Rencana Malaysia Ketiga.

Dalam waktu yang bersamaan peristiwa-peristiwa politik yang lain di Malaysia tahun 1975 dan pada awal 1976 juga memainkan peranan penting dalam pembentukan akhir dari rencana ini. Terlepas dari kematian Tun Razak dan penggantinya Hussein Onn kelangsungan hidup keamanan di Malaysia tidak pernah terlepas dari ancaman komunis, khususnya di Kuala Lumpur pada akhir tahun 1975. oleh sebab itu masalah keamanan juga termasuk sebagai tujuan penting dalam Rencana Malaysia Ketiga. Itulah sebabnya mengapa kini ada tiga tujuan pokok dalam rencana itu, sebagaimana telah dijelaskan oleh Perdana Menteri Hussein Onn dalam kata pembukaan rencana itu.

“... memberantas kemiskinan, usaha besar-besaran dan terus menerus untuk menyusun kembali struktur masyarakat, dan menguatkan pertahanan nasional merupakan tujuan dari Rencana Malaysia Ketiga”. (S. Husin Ali, 1985: 112).

Telah ditegaskan bahwa tujuan dari NEP tidak akan dapat dicapai tanpa adanya keamanan. Dengan demikian apa yang semula merupakan strategi dua arah kini menjadi tiga arah. Untuk itu rencana ini juga membutuhkan dana yang lebih besar dari pada rencana Malaysia yang sebelumnya. Hampir dua kali lipat dari pengeluaran dalam Rencana Malaysia Kedua (M\$9,820 juta).

Usaha terhadap kemiskinan adalah penting dan merupakan keputusan yang amat dibutuhkan. Diperkirakan tahun 1979, 49,3% keluarga di

Malaysia hidup di bawah garis kemiskinan 86% di sektor pedesaan dan 14% di areal perkotaan (*Third Malaysia Plan*, 1976: 318). Dalam waktu yang bersamaan, kemiskinan terjadi pada ketiga kelompok etnis namun amat dominan pada kelompok Melayu mengingat 82% dari populasi Melayu tahun 1975 hidup di pedesaan.

Untuk mengurangi kemiskinan: *Pertama*, seperti pada rencana Malaysia yang lain bagian yang lebih besar dari pengeluaran pembangunan secara keseluruhan terletak pada sektor pertanian, terutama ketergantungan Malaysia terhadap karet, kelapa sawit dan timah sebagai pemasukan ekspor. Sehingga dalam rencana ketiga ini, pengeluaran untuk pembangunan pedesaan telah meningkat dari 21,7% menjadi 25,5% (*Third Malaysia Plan*, 1976: 96-98). *Kedua*, indikasi dari bagaimana kemiskinan di atasi dapat dilihat dari bentuknya institusi penting seperti MARA (*Majelis Amanah Rakyat*), PERNAS (*Perbadanan Nasional Berhad*) dan UDA (*Urban Development Authority*) tahun 1960 dan awal tahun 1970 yang memberikan partisipasi yang lebih besar bagi Melayu dalam ekonomi yang mana dialokasi pemerintah. Institusi-institusi tersebut masih menerima bantuan (dalam rencana ketiga) namun peranan Melayu kurang berarti dibandingkan saat dikeluarkannya NEP pada tahun 1970. di mana sekarang pemerintah menyadari bahwa hanya menyediakan fasilitas bukanlah jalan keluarnya, namun kesadaran dan inisiatif dari masyarakat lebih merupakan kunci yang penting dalam meningkatkan pembangunan dan kewiraswastaan.

Pada tahun 1981 karena alasan kesehatan Hussein Onn mengundurkan diri secara sukarela dan hal ini membuka jalan bagi wakilnya Mahathir (H. Bachtiar Djamily, *kompas* 7 Maret 1986: IV). Kemudian pada masa selanjutnya Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad menjadi Presiden UMNO kelima dan sekaligus juga Perdana Menteri Malaysia keempat, setelah Hussein Onn dan yang menjadi Wakil Presiden UMNO/Wakil Perdana Menteri Malaysia adalah Datuk Musa Hitam.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perekonomian Malaysia sebelum Mahathir memimpin menitikberatkan pada sektor pertanian, ekspor bahan-bahan mentah seperti karet dan timah. Dikarenakan ketergantungannya atas komoditas ekspor, penurunan harga komoditas yang terjadi di tahun 1980-an telah sangat mempengaruhi penerimaan ekspor Malaysia, sehingga mempengaruhi perekonomiannya.

Para petinggi Malaysia diawal kemerdekaan sangat menaruh perhatian terhadap kebijaksanaan diversifikasi dan memperkuat aktivitas ekonomi yang telah ada, terutama untuk memodernkan penanaman karet. Bangsa Melayu merupakan grup etnik yang dominan di Malaysia. Ketika Malaysia memperoleh kemerdekaan, mayoritas etnis Melayu tinggal di daerah pedesaan dan berkecimpung terutama di bidang pertanian. Dua komoditas utama yang mereka tanam adalah karet dan padi. Aktivitas pertanian dan perikanan tradisional memberikan pendapatan yang sangat rendah. (Pikiran Rakyat, 6 Februari 2004: 20).

Sebelum menjabat sebagai Perdana Menteri, Mahathir berkeyakinan bahwa strategi pembangunan Malaysia selayaknya didasarkan atas aktivitas pemrosesan barang-barang sekunder dan tersier. Jika tidak, Malaysia akan sangat terpuak bahkan bisa hancur dengan merosotnya harga-harga komoditas, meski dengan strategi diversifikasi ekspor sekalipun. Malaysia telah menjadi suatu negara industri yang memanfaatkan secara maksimal diversifikasi dan pertumbuhan ekonomi. Malaysia telah beralih dari negara yang tadinya hanya bersandarkan pada pertanian menjadi suatu negara yang berlandaskan industri, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Ekspor merupakan sumber pertumbuhan ekonomi yang menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi Malaysia. (Pikiran Rakyat, 28 Januari 2004: 6).

Berbagai kebijakan diarahkan untuk menyamakan posisi kaum Melayu dalam perekonomian yang selama ini jauh tertinggal dibandingkan kelompok

masyarakat lainnya. Kebijakan pemerintah yang dilaksanakan merupakan kombinasi dari dua pendekatan. Pertama, pembangunan ekonomi melalui kebijakan pemerintah dan investasi swasta, dan kedua, pencapaian kemakmuran ekonomi yang netral secara ras.

Melalui pendekatan pertama, Mahathir melakukan perubahan yang pragmatis dan berjangka panjang terhadap ekonomi dan pemerintahan Malaysia. Masa depan Malaysia diharapkan terletak pada sektor industri yang dapat memberikan nilai tambah terhadap bahan mentah yang dimilikinya, serta dalam sektor industri yang berteknologi tinggi. Untuk mencapainya, perusahaan-perusahaan milik negara bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan Korea dan Jepang mendirikan Perusahaan Industri Berat Malaysia yang dikenal sebagai HICOM (*Heavy Industries Corporation of Malaysia*). (Pikiran Rakyat, 28 januari 2004: 6).

Kebijakan privatisasi di Malaysia tidak seluruhnya menghilangkan peran pemerintah, melainkan yang terjadi adalah dalam bentuk kerangka kerja sama antara pemerintah dan swasta. Pemerintah menetapkan kerangka kebijakan utama, mengarahkan, dan menyediakan jasa pelayanan pendukung (*back-up services*), sementara sektor swasta berperan pada sisi komersial dan ekonomi dari perusahaan nasional (*national enterprise*). Fokus lain dari strategi industrialisasi Malaysia adalah pengembangan usaha dan industri kecil dan menengah (UKM dan IKM) yang kompetitif. (Pikiran Rakyat, 28 januari 2004: 6).

B. Implementasi Kebijakan Mahathir Mohamad

1. Latar Belakang Kehidupan Mahathir Mohamad

Dr. Mahathir Mohamad lahir pada 20 Desember 1925 di Alor Star, Kedah dan hidup dalam keluarga yang sangat disiplin. Ayah Mahathir, Encik Mohamad Iskandar adalah keturunan Islam India sedangkan Siti Hawa ibu

Mahathir adalah keturunan Melayu. Mahathir merupakan anak bungsu dari 9 bersaudara dan sangat dekat dengan sang ayah. Encik Mohamad Iskandar menjadi guru sekolah Inggris Kerajaan pada tahun 1908, salah satu muridnya adalah Tunku Abdul Rahman Putra (PM Malaysia Pertama) (J. Victor Morais, 1984: 4). Sekalipun demikian Encik Mohamad tidak membedakan yang miskin dan yang kaya. Pada masa itu, nama Mohamad Iskandar hampir sinonim dengan pembangunan dan kemajuan pendidikan di negara bagian Kedah (J. Victor Morais, 1984: 1). Ayah Mahathir adalah seorang kepala sekolah yang tegas dan memiliki sifat disiplin yang tinggi, sehingga tidaklah mengherankan apabila Mahathir kemudian mewarisi sifat disiplin yang tinggi dari ayahnya. (J. Victor Morais, 1984: 5).

Pendidikan dasar Mahathir diawali di sekolah Melayu di seberang Perak, Kedah selama dua tahun sebelum kemudian bergabung dalam sekolah pemerintah berbahasa Inggris di Alor Star. Mahathir termasuk murid yang cerdas, pendidikannya terganggu selama 4 tahun selama Perang Dunia II dan sambil menunggu waktu itu Mahathir mendapat izin untuk membuka usaha bisnis. Pengalaman pada masa pemerintahan Jepang ini banyak memberikan manfaat. Usaha Mahathir berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perang Dunia II dan kembalinya Malaya dalam pemerintahan Inggris. (J. Victor Morais, 1984: 7).

Pada tahun 1945 Mahathir menyelesaikan sekolahnya pada sekolah pemerintah berbahasa Inggris, dengan ijazah *Senior Cambridge Certificate*. Kemudian Mahathir tertarik untuk melanjutkan studinya dibidang hukum dan berharap untuk bisa memperoleh beasiswa dari pemerintah untuk belajar di Inggris. Namun hal ini tidak terwujud karena pemerintah memutuskan agar Mahathir untuk mengambil bidang studi kedokteran pada King Edward VII College of Medicine di Singapura, mengingat bahwa saat itu sudah banyak ahli hukum sedangkan tenaga medis masih sedikit, Istri Mahathir Siti Hasmah juga berasal dari sekolah kedokteran yang sama. (J. Victor Morais, 1984 :7).

Dalam politik Malaysia, Mahathir merupakan tokoh yang kontroversial baik sebelum maupun sesudah menjadi Perdana Menteri (Chamil Wariya, 1988: 60). Pengalaman memimpin Mahathir dimulai saat menuntut ilmu di Singapura, yang mana menjabat sebagai Ketua Masyarakat Islam pada King Edward VII Medical College Singapura. Disana Mahathir merupakan aktivis mahasiswa yang terkenal dan banyak menulis artikel di "Straits Times" serta "Sunday Times" dengan nama "Che Det". Temanya tentang kemelaratan hidup masyarakat desa (J. Victor Morais, 1982: 10). Sejak menjadi mahasiswa Mahathir terkenal sebagai seorang pejuang bangsa Melayu yang dianggap masih kalah dalam bidang ekonomi.

Pada Tahun 1953 Mahathir mendapat gelar doktor dan setahun kemudian bekerja untuk pemerintah. Tahun 1956 Mahathir bekerja pada sebuah Rumah Sakit Umum di Alor Star. Namun setahun kemudian mengundurkan diri dan membuka praktek/klinik pribadi "Maha Klinik" (J. Victor Morais, 1982: 23). Dalam profesinya sebagai dokter Mahathir adalah seorang yang murah hati, tidak pernah memaksa pasiennya untuk membayar kalau memang tidak mampu. Mahathir juga senang akan bisnis dan selalu mengingatkan para pengusaha Melayu untuk memulai dari bawah agar memperoleh pengalaman dan belajar bagaimana mencapai sukses. Mahathir selalu mempunyai pandangan bahwa apa yang berhasil dilakukan orang lain akan dapat ia lakukan pula. (J. Victor Morais, 1984: 10).

Mahathir dikenal sebagai seorang pemimpin yang tidak pernah merasa takut dan selalu terus terang dalam mengkritik bahkan sering bersifat kontroversial. Mahathir merupakan Perdana Menteri Malaysia tanpa latar belakang pendidikan Hukum. Mahathir merupakan figur yang kalem, tenang dan kolektif serta sangat rasional dan adil dalam suatu diskusi maupun konsensus, akan tetapi tidak dapat melihat adanya inefisiensi pada diri seseorang. (J. Victor Morais, 1984: 15).

Adapun karir politik mulai dirintis Mahathir sejak usia 20 tahun, yang pada tahun 1945 Mahathir membantu pembentukan Kesatuan Melayu Kedah (*Kedah Malay Assosiation*). Kemudian Mahathir bergabung dalam gerakan nasionalisme Melayu (UMNO), saat Dato bin Ja'afar menjadi pendiri dan Presiden UMNO yang pertama Mahathir baru berusia 20 tahun. Pada tahun 1959 ditawarkan untuk ikut serta dalam pemilihan negara bagian Kedah namun Mahathir menolak. (J. Victor Morais, 1982: 20-23).

Keterlibatan secara penuh dalam politik berawal pada tahun 1964 saat menjadi wakil rakyat di Parlemen mewakili Kota Star Selatan di Kedah. Sebagai anggota Parlemen Mahathir terkenal dengan kelantangannya dalam merumuskan perjuangan yang pro-Melayu sehingga dicap sebagai ultra oleh bukan Melayu. (Chamil Wariya, 1988: 60).

Pada permulaan karir politiknya, Mahathir selalu berbeda pendapat dengan Tunku Abdul Rahman dan terhadap kepemimpinan UMNO Bagian. Namun tahun 1964 merupakan terobosan besar pertama yang berhasil dilakukan Mahathir, saat dicalonkan sebagai anggota Parlemen untuk Kota Star Selatan sampai dengan tahun 1969. (J. Victor Morais, 1982: 23).

Setelah terjadinya krisis rasial 13 Mei 1969 di Kuala Lumpur, perbedaan pendapat antara Mahathir dengan generasi konservatif terutama Tunku Abdul Rahman semakin memuncak. Dalam bukunya "Dilema Melayu" Mahathir mengkritik pemerintahan Tunku yang tidak berbuat banyak untuk kelompok Melayu, khususnya masyarakat pedesaan. Tindakan yang diambil Tunku dianggap lamban. Kemudian bersama Datuk Musa Hitam, Mahathir bergabung dalam gerakan kaum muda "Young Turks" dan menulis suatu protes kepada Tunku.

Kritik dan tuntutan terhadap Tunku Abdul Rahman dilakukan dalam satu aksi unjuk rasa di Universitas Malaya tanggal 17 Juni 1969. Pada saat itu pula surat sejumlah tempat halaman diajukan oleh Mahathir kepada Tunku. Dalam surat itu menurut Leon Comber dalam bukunya "Peristiwa 13 Mei", Mahathir

menuduh Tunku terlalu menyokong Cina serta menuntut agar Tunku meletakkan jabatan sebagai Perdana Menteri. (Kompas, 8 November 1987: 11).

Mengenai surat itu, Tunku Abdul Rahman sendiri antara lain menulis:

“Saya tidak pernah sekalipun menyangka bahwa surat seperti itu akan ditulis oleh seorang yang senantiasa menggembar-gemborkan dirinya, sekurang-kurangnya pada pandangan orang, sebagai seorang pendukung partai yang kuat, sekalipun ia tidak setuju dengan beberapa kebijakan yang dijalankan oleh partai”. (Kompas, 8 November 1987: 11).

Mahathir adalah anggota UMNO yang kalah dalam pemilihan, dalam UMNO Mahathir adalah anggota Majelis Tertinggi UMNO. Mahathir diberhentikan dari UMNO akibat suratnya kepada Tunku yang ternyata juga disiarkan oleh surat kabar dan diperbanyak dengan selebaran. Sejak saat itu Mahathir dan Musa Hitam yang ikut mendukung dicap sebagai ultra dan keduanya pada tahun 1969 dikeluarkan dari UMNO. Bersamaan dengan itu buku kontroversial Mahathir “Dilema Melayu” ditarik dari peredaran pada tahun 1970. (Kompas, 8 November 1987: 12).

Terpilihnya Tun Razak sebagai Perdana Menteri Malaysia setelah penguduran diri Tunku, membawa kembali dalam keanggotaan UMNO. Pada tahun 1974 dalam kabinet Tun Razak Mahathir terpilih sebagai salah satu wakil presiden mengalahkan 5 anggota kandidat lain. Dengan meninggalnya Tun Razak di London, maka Tun Hussein Onn menjadi Perdana Menteri banyak yang merasa heran mengapa Hussein Onn mengangkat Mahathir sebagai Wakil Perdana Menteri yang mengalahkan beberapa menteri senior.

Mahathir merupakan figur yang ambisius menginginkan berpengaruh dalam kebijaksanaan nasional. Hal ini terutama dicurahkan dalam bukunya “Dilema Melayu” (J. Victor Morais, 1982: 29). Mahathir berpendapat bahwa pemerintah Malaysia saat ini harus mengkonsentrasikan dirinya lebih pada pembangunan ekonomi daripada politik. Perubahan yang diusulkan ini menimbulkan kontroversi sejak kemerdekaan, pemerintah berpegang pada

kebijaksanaan bahwa Melayu menguasai politik dan non-Melayu menguasai ekonomi. Namun hal ini dimaksudkan agar selain Melayu mengekalkan kekuasaannya dalam politik, juga harus ditopang oleh kebijaksanaan pemerintah untuk menguasai bidang ekonomi. (Chamil Wariya, 1988: 61).

Mahathir ingin membawa kelompok Melayu ke dalam keseimbangan ekonomi dengan kelompok etnis yang lain (terutama Cina) (Mahathir bin Mohamad, 1985: 21-22). Kelompok Melayu diharapkan akan dapat bagian yang adil dalam hal kekayaan negara. Dalam mencapai tujuan jangka panjang NEP, Mahathir berpendapat bahwa bumiputra harus dipersiapkan untuk bisa bersaing dan belajar mengatur keuangan. Pada masa pemerintahan Hussein Onn, Mahathir selain menjadi Wakil Perdana Menteri juga menjadi Menteri Perdagangan dan Industri. (J. Victor Morais, 1982: 29).

Dalam menduduki jabatannya sebagai Menteri Perdagangan dan Industri, terlihat figur Mahathir sebagai seorang pemimpin yang pragmatis dan tegas serta populer dikalangan semua lapisan masyarakat/ras. Mahathir mempunyai cita-cita untuk menjadikan Malaysia suatu negara yang produktif dan efisien, namun untuk itu rakyat harus bersedia mengorbankan waktu dan tenaga. Mahathir ingin agar Melayu tidak terlalu bergantung pada pemerintah dan ingin agar ekonomi pedesaan ditingkatkan sesuai dengan pembangunan yang dinamis.

Dibandingkan dengan Hussein Onn yang lebih hati-hati dalam membuat keputusan, Mahathir terlihat selalu ingin segala sesuatunya berjalan dengan cepat. Menurut Mahathir pemerintah Malaysia yang produktif dan efisien merupakan cara untuk mengatasi masalah-masalah sosial dan ekonomi yang muncul (J. Victor Morais, 1984: 46). Untuk mencapai target 30% bagian Melayu dalam NEP pada tahun 1990, Mahathir bergerak lebih cepat dari para pendahulunya. Mahathir menyalahkan kolonialisme Inggris atas munculnya dilemma terhadap kelompok Melayu. (J. Victor Morais, 1984: 53).

Setelah menjadi Perdana Menteri 16 Juli 1981, Mahathir memilih Musa Hitam sebagai Wakil Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri. Sekalipun ada perbedaan dalam gaya, namun tidak dapat dihindari bahwa keduanya mempunyai banyak persamaan baik dalam pemikiran maupun ide-idenya. Hal ini yang menarik bagi Mahathir untuk mengangkat Musa Hitam sebagai Wakil Perdana Menteri. (Stuart Drummond, 1981: 318).

Kepemimpinan Mahathir dan Musa Hitam yang lebih dikenal dengan administrasi 2M mempunyai pola yang berbeda dengan pendahulunya. Keduanya bukanlah ahli hukum dan berasal dari golongan kelas menengah bukan aristokrat, fenomena ini baru pertama kali terjadi dalam sejarah pemerintahan di Malaysia. Keduanya merupakan simbol dari multirasialisme di Malaysia, karena Mahathir adalah keturunan India dan Musa Hitam adalah keturunan Cina. Keduanya juga pernah dikeluarkan dari UMNO pada tahun 1969 karena mengkritik pemerintahan Tunku Abdul Rahman.

Era Mahathir-Musa Hitam dikenal sebagai era reformasi, Mahathir memahami betul keadaan masyarakatnya yang multirasial. Mahathir telah menunjukkan indikasi bahwa Mahathir seorang yang aktif yang bekerja bukan hanya banyak bicara dan membuat janji-janji belaka. Mahathir selalu memberikan petunjuk kepada para menteri kabinetnya juga kepada rakyatnya, untuk memberikan waktu 1 tahun untuk melihat prospek pelaksanaan program-programnya (J. Victor Morais, 1984: 112-114). Slogan dari pemerintahan yang baru ini “Bersih, Efisien dan Dapat Dipercaya” (*Clean, Efficient and Trustworthy Government*) disiplin kerja dan tepat waktu diterakan bagi semua pegawai pemerintah tanpa terkecuali.

Musa Hitam terlibat langsung dalam kontrol pemerintahan ke daerah guna melihat hasil kerja dari proyek-proyek yang dibuat, apakah ada hasilnya dan produktivitas harus ditingkatkan. Oleh sebab itu dalam administrasi Mahathir ini,

banyak dilakukan reformasi dalam berbagai macam aktivitas yang secara keseluruhan bermaksud untuk membuat gambaran yang baru bagi negara ini.

Dalam UMNO Mahathir menggaris bawahi peranan Melayu dalam NEP (*New Economic Policy*). Tidak pernah ada seorang pemimpin yang tertinggi negara yang dengan keras menentang pemimpin yang lalu seperti yang dilakukan Mahathir dan Musa Hitam (Chamil Wariya, 1988: 61). Mahathir dalam bukunya “Dilema Melayu” mengatakan bahwa Inggris sebagai penyebab utama dari adanya dilema Melayu. Kebijaksanaan dalam yang pernah dilakukan oleh para pendahulunya, terutama kebijaksanaan yang tidak berkiblat ke Barat namun sebaliknya kebijaksanaan yang dipopulerkan oleh Mahathir adalah Kebijaksanaan Pandang Ke Timur (*Look East Policy*).

Berikut garis perjalanan Mahathir Mohamad (Dr. M) :

- 1925 : Lahir di negara bagian Kedah sebagai anak seorang kepala sekolah.
- 1947 : Mendapat beasiswa dari pemerintah Inggris untuk belajar kedokteran di Singapura. Selama itu dia menulis tentang antikolonialisme di koran Malaysia dengan nama samaran.
- 1964 : Memenangkan kursi parlemen untuk pertama kalinya mewakili Alor Star ibu kota Kedah.
- 1969 : Menonjolkan ketidaksukaannya atas dominasi Cina di Malaysia. Mahathir dipecat dari partai UMNO. Namun, tiga tahun kemudian dia kembali ke UMNO.
- 1973 : Dilantik sebagai senator.
- 1974 : Terpilih di parlemen lagi, dan PM baru, Abdul Razak, memilihnya sebagai menteri pendidikan.
- 1975 : Menjadi salah satu tiga naib presiden UMNO
- 1976 : Razak meninggal, digantikan Hussein Onn. Oleh Onn, Mahathir diangkat sebagai deputi PM.
- 1978 : Dilantik sebagai Wakil Perdana Menteri oleh Tun Hussein Onn pada 15 September.
- 1981 : Terpilih sebagai PM, menggantikan Hussein Onn.

- 1985 : Di tengah resesi pengangguran yang mencapai angka dua digit dan bayangan krisis ekonomi, Dr. M mengembangkan mobil nasional Proton Saga.
- 1987 : Bertindak keras terhadap oposisi, menahan 100 lawan politik dan memberedel tiga surat kabar. Dr. M juga bersitegang dengan majelis UMNO.
- 1988 : *Booming* ekonomi Malaysia. Rata-rata pertumbuhan ekonomi 8,5 persen. Malaysia tampil sebagai macan Asia hingga 1997.
- 1991 : Menetapkan Malaysia sebagai negara maju tahun 2020.
- 1998 : Krisis ekonomi datang.
Dr. M memecat deputy PM, Anwar Ibrahim atas alasan kejahatan moral. Anwar dihukum 15 tahun penjara.
- 2002 : Mahathir menyatakan akan mundur sebagai PM pada Oktober 2003.
- 2003 : Dr. M mundur digantikan Abdullah Ahmad Badawi (Republika, 1 November 2003).

Mahathir ingin menjadikan Malaysia suatu negara industri dengan mengemukakan konsep dan ide-ide barunya seperti:

- a. Kebijakan Pandang Ke Timur (*Look East Policy*) terutama pada Jepang dan Korea Selatan. Mahathir berusaha membawa masyarakat Melayu untuk mengagumi kehandalan Jepang di bidang teknologi, perdagangan, ekonomi, sistem kerja yang teratur dan berdisiplin dan pembangunan daerah perkampungan serta sistem pengangkutan Korea Selatan.
- b. Kebijakan yang mengutamakan industri berat, yang telah dilakukan sebelumnya saat Mahathir menjabat Menteri Perdagangan dan Industri. Dan pada tahun 1983 kebijakan ini dipertegas dengan tujuan memperluas pekerjaan bagi masyarakat Melayu. Implementasinya dapat dilihat dari adanya industri mobil "Proton Saga" yang merupakan proyek kerjasama HICOM dan Mitsubishi.
- c. Kebijakan terhadap perubahan jumlah penduduk yang dimaksudkan untuk meningkatkan pasaran dalam negeri.
- d. Pembentukan *Malaysian Incorporated* yaitu suatu bentuk kerjasama antara pemerintah dengan pengusaha (swasta) dalam suatu lembaga.

- e. Privatisasi, kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan menghapuskan mental subsidi dalam masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan peran Melayu.
- f. Kebijaksanaan Pertanian Negara dalam usaha meningkatkan produksi bahan makanan dalam negeri bahkan bagi keperluan ekspor.
- g. Kebijaksanaan Pembangunan Nasional dan Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (RRJP2) sebagai pengganti dan penerus *New Economic Policy* yang telah selesai pelaksanaannya pada tahun 1990.

2. Kebijaksanaan Pandang Ke Timur (*Look East Policy*)

Kebijaksanaan Ekonomi Baru (1971-1990) yang dikeluarkan oleh Tun Razak memasuki paruh kedua (10 tahun kedua) dan dilanjutkan Mahathir sebelum kebijakan baru dikeluarkan. Berbagai upaya dilakukan Mahathir agar Malaysia menjadi sebuah negara yang maju dan kuat. Pada Februari 1982 Kebijaksanaan Pandang Ke Timur (*Look East Policy*) dikeluarkan sebagai suatu kebijaksanaan yang memandang ke Timur yaitu kepada Jepang dan Korea Selatan dan bukannya kepada Inggris. Pada masa pemerintahan Mahathir menjadikan berbeda dengan para pendahulu Mahathir yang cenderung selalu bergantung pada Inggris. Perdana Menteri Mahathir Mohamad mendesak masyarakat Malaysia untuk memandang secara bersamaan kepada Jepang dan Korea Selatan baik inspirasi, metode dan keahlian serta bersaha menandingi dan belajar dari etos dan sikap kerja Orang-orang Jepang dan Korea dalam rangka kemajuan ekonomi negara dimasa yang akan datang. Hal ini diucapkan Mahathir pada simposium ASEAN Jepang ke 5 di Kuala Lumpur, tanggal 14 Agustus 1982 di mana secara tegas menyatakan Kebijaksanaan Pandang Ke Timur (*Look East Policy*) ini bertujuan untuk mengajak seluruh rakyat Malaysia mengikuti jejak negara-negara Timur terutama Jepang, yang berhasil secara cepat dalam pembangunan negara.

Inspirasi, metode dan keahlian dimiliki dapat dijadikan dasar untuk memajukan pembangunan di Malaysia. (Ahmad Atory Hussain, 1996: 130).

Mahathir ingin menandingi dan belajar dari etik, sikap kerja serta sistem kerja Jepang, yang dirasa merupakan faktor utama dalam keberhasilan industrialisasinya dan pertumbuhan ekonomi yang begitu cepat. Memandang ke Timur tidak berarti total Japanisasi atau total pemutusan hubungan kerja dengan Barat. Namun hal ini berarti ketergantungan yang hampir menyeluruh kepada Barat, kini akan diganti dengan suatu sikap keseimbangan baik kepada Timur maupun Barat. Pada kenyataannya, Kebijakan Pandang Ke Timur ingin mengambil apa yang baik dari Barat maupun Timur dalam mengarahkan pembangunan di Malaysia.

Mahathir bertujuan mendorong masyarakat Malaysia ke arah suatu perubahan nilai dan tingkah laku guna membawa kepada hubungan yang lebih erat dengan Jepang dan Korea., terutama dalam wujud lembaga-lembaga pendidikan, program latihan pada perusahaan-perusahaan besar, serta dalam pekerjaan di pabrik-pabrik dan bisnis di Jepang dan Korea Selatan sebagaimana yang ada pada perusahaan dan proyek pembangunan di Malaysia. Mahathir menekankan bahwa tidak hanya keahlian yang ingin di kejar, tetapi lebih penting lagi adalah bagaimana cara kerja yang benar (Kit G. Machado, 1987: 639). Dimensi dari Kebijakan Pandang Ke Timur telah diwujudkan dalam sejumlah program pendidikan dan latihan yang disponsori oleh Jepang bagi masyarakat Malaysia. LEP juga mencakup lebih pada elemen-elemen ekonomi politik. Mahathir menemukan makna dari keberhasilan Jepang dalam menandingi industri Barat dan hal ini perlu dipelajari dan ditandingi. (Kit G. Machado, 1987: 639).

Mahathir tertarik pada pengalaman dan latihan dari Jepang dalam mewujudkan kebijakan-kebijaksanaan bagi adanya suatu restrukturisasi politik dan ekonomi di Malaysia. Termasuk promosi untuk kerjasama yang lebih erat antara pemerintah dan pengusaha (*Malaysia Incorporated*), peralihan segmen

ekonomi dari sektor publik kepada sektor privat (*Privatitaton*) diumumkan secara resmi pada bulan Februari 1983, pembentukan perusahaan-perusahaan perdagangan umum (*Sogo Sossa*), teknik-teknik pengawasan yang bervariasi (contoh: pola pengawasan disiplin kerja yang lebih ketat) serta pembentukan perusahaan industri kerajinan dan industri baru. Mahathir menegaskan bahwa tindakan-tindakan semacam itu tidak berarti membuat segala sesuatu dengan cara Jepang, mengingat adanya perbedaan yang penting di antara kebudayaan Jepang yang homogen dan Malaysia yang pluralistik sehingga dalam belajar dan meminjam suatu hal dari luar haruslah selektif (Kit G. Machado, 1987: 639). Mahathir dari permulaan telah menekankan bahwa LEP tidak berarti meninggalkan Barat sama sekali, hanya untuk mengembangkan sikap yang lebih seimbang antara keduanya.

Bagian yang lebih penting untuk memulai penjelasan tentang LEP adalah dengan meninjau terlebih dahulu arah tujuan dan pemikiran Mahathir terhadap pembangunan nasional di Malaysia (Kit G. Machado, 1987: 642). *Look East Policy* bertujuan untuk mengurangi ketergantungan ekonomi Malaysia kepada negara-negara yang lebih maju dan berusaha untuk membawa Malaysia menjadi negara industri modern setara dengan negara-negara industri baru (*Newly Industrializing Countries/NIC's*) melalui intensif modal dan tenaga kerja terampil bagi industri berat. Mahathir percaya bahwa Malaysia memiliki semua bahan-bahan dasar untuk menjadikan sebuah negara industri yang penting di Asia setelah Jepang dan Korea Selatan. Pangajuan strateginya adalah pada saat Mahathir menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Industri (1978-1981) dan membentuk HICOM (*Heavy Industries Corporation of Malaysia*). HICOM memusatkan perhatian pada proyek-proyek industri besar seperti: mobil, besi baja, mesin-mesin kecil dan semen yang diharapkan dapat meningkatkan pasaran dalam negeri. (Kit G. Machado, 1987: 642).

Mahathir menginginkan adanya perencanaan terhadap pertumbuhan penduduk yang ada saat itu 15 juta menjadi 70 juta pada tahun 2100. Sebuah kebijaksanaan baru dalam pertanian nasional (*New Agriculture Policy*) telah dipersiapkan, yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian serta mengubah apa yang akan menjadi surplus buruh di daerah pedesaan menjadi kekuatan tenaga kerja di perkotaan.

LEP dimulai pada saat konflik dalam hubungan Malaysia-Inggris. Hal ini tidak dapat diragukan berakar pada rasa tidak senang Mahathir terhadap sikap perlawanan Inggris pada kebijaksanaan tertentu yang dibuatnya dan perintah yang dilakukan Inggris untuk meningkatkan uang sekolah bagi para pelajar internasional. Namun lebih jauh dari itu, perubahan sikap Mahathir ini merupakan wujud suatu ketegasan sikap terhadap pengaruh Inggris yang masih kuat dikalangan kelas atas dan menengah Melayu termasuk para pendahulunya.

Pemikiran ekonomi yang tegas titik berat Mahathir pada industri berat, urbanisasi dan semangat etik kerja Jepang terpengaruh pemikiran jangka panjangnya yang menyangkut keperluan terhadap adanya perubahan nilai dan sosial di antara masyarakat bumiputera. Pemikiran Mahathir secara nyata dituangkan dalam bukunya "Dilema Melayu" yang telah beredar kembali pada tahun 1981, sehingga masyarakat Malaysia dapat mengetahui apa yang menjadi pemikiran Perdana Menteri.

Mahathir dengan sangat hati-hati menjelaskan apa yang menjadi kelemahan dari masyarakat Melayu (khususnya para petani) yang terlalu bersandar dengan nasib, kurangnya perhatian untuk mendapatkan keahlian-keahlian baru, ketidakpedulian terhadap waktu serta kurangnya kemampuan bersaing dari Melayu sehingga merintangi kemajuan yang ingin dicapai.

Mahathir mengatakan bahwa orang Melayu pedesaan harus dipekerjakan pada proyek-proyek pembangunan pemerintah di perkotaan. Diadakan program latihan *Look East* di mana Mahathir menegaskan bahwa Melayu harus

memperoleh keahlian melalui praktek kerja dan tidak hanya belajar dari teori. Bagi Mahathir hal ini menjurus pada usaha kearah industrialisasi dan urbanisasi dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi di Malaysia. Sejak tahun 1970 golongan Melayu rata-rata lebih kaya baik secara keseluruhan maupun dalam hubungan lebih baik dan kelompok Melayu berada dilapangan pekerjaan yang lebih luas pada sektor ekonomi modern serta lebih bersifat perkotaan. Ini secara luas merupakan hasil dari kebijaksanaan pemerintah. (Kit G. Machado, 1987: 644-645).

Mahathir secara tegas menyatakan bahwa rasa kekhawatirannya yang terdahulu masih ada, yaitu kelemahan ekonomi Bumiputera tidak dapat di atasi hanya dengan bantuan pemerintah tetapi oleh peningkatan kemampuan sendiri dalam bersaing. Kelanjutan dari pemikiran Mahathir ini, juga dijelaskan terlihat dalam titik berat LEP yaitu pada perubahan nilai dan tingkah laku serta cara atau kebiasaan kerja.

Dapat dikatakan bahwa usaha pencapaian tujuan dari NEP mengalami perubahan karena inisiatif kebijaksanaan ekonomi sejak diambil alih dalam kepemimpinan Mahathir pada tahun 1981. Bersamaan dengan itu, kebijaksanaan ekonomi ini dapat membawa perubahan besar terhadap apa yang telah dicapai dalam pembangunan pedesaan tahun 1980-an ataupun *New Economic Policy* tahun 1970-an. Tetapi inisiatif-inisiatif baru ini, sekalipun berhubungan satu dengan yang lain pada kenyataan tidak merupakan suatu bingkisan tersendiri seperti yang dilakukan oleh kedua pendahlu Mahathir.

Kebijaksanaan Pandang Ke Timur (*Look East Policy*) ini meliputi 2 elemen penting:

- a. Konsep etos kerja dan metode dari Jepang dan Korea Selatan harus dapat menjadi model bagi Malaysia dan usulan dalam peningkatan perdagangan dan investasi pertukaran latihan dengan kedua negara.

Inisiatif ini muncul sebagai akibat dari kekecewaan yang mendalam terhadap Barat (Inggris) yang telah menaikkan uang sekolah bagi mahasiswa-mahasiswa asing termasuk Malaysia dan terjadinya perubahan peraturan oleh Inggris yang menyatakan keberatannya terhadap pengambilalihan perusahaan-perusahaan Inggris oleh pemerintah Malaysia. (Jerry Bass, 1982: 197-198).

b. Segi positif dari Jepang dan Korea Selatan seperti etik kerja, keselarasan dalam menjalankan industri serta disiplin sosial dapat dicontoh oleh Malaysia. (Ahmad Atory Hussain, 1996: 130).

Bentuk operasionalisasi dari kedua tujuan tersebut di atas, dapat dilihat dari beberapa usaha yang dilakukan Mahathir yaitu:

a. Kebijakan Industri Berat

Proses perindustrian di Malaysia telah melalui tahap-tahap yang diperlukan dimulai dengan industri tradisional berbasis pertanian sebelum tahun 1960-an dan seterusnya industri-industri intensif buruh dan ekspor pada tahun-tahun 1970-an. Langkah selanjutnya dalam proses perindustrian ini ialah dengan melaksanakan kebijakan industri berat yaitu perindustrian yang memerlukan modal yang besar, teknologi yang tinggi dan menggunakan tenaga pekerja mahir yang ramai. Kebijakan utama pada masa ini adalah usaha kearah industri berat. Pendekatan ini dimulai sejak tahun 1980 dengan dibentuknya HICOM (*Heavy Industries Corporation of Malaysia*) oleh Mahathir yang saat itu menjabat Menteri Perdagangan dan Industri. Mahathir bertujuan untuk merapikan ekonomi Malaysia dari ketergantungannya pada komoditi tradisional. Tahun 1983 kebijaksanaan dibentuk secara resmi dengan kontrak produksi dari industri-industri baru yang diutamakan adalah perusahaan-perusahaan dengan profil Melayu yang kuat.

Adapun proyek-proyek industrialisasi yang dibangun mencakup pabrik baja “Perwaja” di Trengganu dan pabrik mobil “Proton”. Cabang lain dari proyek industrialisasi Malaysia adalah perusahaan mobil nasional dengan nama Proton.

Pada mulanya proyek amat dibanggakan, namun kemudian terus mengalami kesulitan. Pertama sulit menampung pinjaman dalam nilai mata uang Yen dalam jumlah besar, kemudian masalah pasaran dalam negeri yang terus menyusut. (Zakaria Haji Ahmad, 1986: 150-157).

b. Kebijakan Perubahan Jumlah Penduduk

Kebijakan jumlah penduduk 70 juta disarankan oleh Perdana Menteri Mahathir Mohamad di Perhimpunan Agung UMNO dalam bulan September 1982. Mahathir berpendapat bahwa Malaysia akan lebih berjaya dengan penduduk sebanyak 70 juta dasar kependudukan ini diharapkan dicapai dalam waktu 115 hingga 120 tahun. Penyelesaian jangka panjang adalah untuk meyakinkan permintaan pasar dalam negeri akan ditingkatkan, sehingga pemerintah memutuskan untuk meningkatkan jumlah pasaran melalui kebijakan baru dalam jumlah penduduk. Guna meningkatkan pemasaran terhadap terhadap konsumsi produk-produk hasil peningkatan industri, maka yang ingin dicapai adalah untuk memiliki populasi sekitar 70 juta penduduk pada tahun 2100. (www.pmo.my.gov).

Berhubungan erat dengan adanya kebijakan industri berat, maka diharapkan agar jumlah pasaran dalam negeri juga dapat diperbesar. Mahathir mempunyai visi untuk mewujudkan Malaysia sebagai suatu *Great Society* (yang ditafsirkan sebagai suatu upaya ke arah pembentukan Malaysia menjadi sebuah negara industri baru ala Korea Selatan). (Jomo, 1988: 70).

Sebagai akibatnya sudah dapat dilihat bahwa industri berat memerlukan adanya pasaran dalam negeri yang luas dan hal ini diciptakan dengan usaha meningkatkan jumlah penduduk Malaysia. Hal lain kritik diajukan dalam pembiayaan infrastruktur secukupnya, khususnya bagi pendidikan dan kesehatan serta dalam mengatasi resiko dari meningkatnya jumlah kemiskinan. Namun

Perdana Menteri yakin bahwa tujuan-tujuannya tidak hanya berani tetapi juga berisi.

c. Malaysia Incorporation

Berhubungan erat dengan LEP adalah *Malaysia Inc.* yang mengikuti pola dari *Japan Inc.* di mana diusahakan agar pemerintah dan pengusaha dapat bekerjasama lebih erat melalui perundingan-perundingan secara teratur dan melembaga (R. S. Milne, 1986: 1374). *Malaysia Incorporated* diutarakan oleh Perdana Menteri Mahathir Mohamad pada 25 Februari 1983.

Dalam sebuah memorandum yang diucapkan Mahathir dihadapan para pegawai senior pemerintah tanggal 28 Juni 1983 dijelaskan bahwa konsep *Malaysia Incorporated* mempunyai arti bahwa Malaysia diumpamakan sebagai sebuah perusahaan di mana sektor pemerintah dan privat (swasta) keduanya memegang peranan baik pemilik maupun pekerja dalam perusahaan yang berangkutan. Keduanya diharapkan dapat bekerjasama guna menjamin keberhasilan perusahaan. Hanya melalui keberhasilan perusahaan inilah kelangsungan hidup pemilik maupun pegawai terjamin dan terlindungi. Jika Malaysia ditinjau sebagai sebuah perusahaan, maka masyarakat Malaysia baik yang berasal dari sektor pemerintahan maupun privat, keduanya juga menjadi pemilik sekaligus pegawai dalam *Malaysia Incorporated*. Oleh sebab itu, keberhasilan perusahaan sangat tergantung pada usaha dan kerjasama dari berbagai pihak baik yang berasal dari sektor pemerintah maupun sektor privat. (Jomo, 1988: 1-2).

Mahathir mengatakan bahwa kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa dapat terwujud karena keberhasilan bisnis dan perusahaan negara. Pemerintah membiayai semua kebutuhan termasuk gaji pegawai, serta pajak dan pendapatan yang diperoleh dari semua kegiatan dan keuntungan bisnis privat dan perusahaan. Semakin tinggi tingkat keberhasilan di sektor privat dan makin banyak bisnis dan

perusahaan, maka makin besar pula jumlah pendapatan dan pajak yang diperoleh pemerintah. Sejak jasa pemerintah diperlukan bagi banyak kegiatan bisnis saat itu pula jasa para pegawai pemerintah memainkan peranan yang penting dalam mewujudkan keberhasilan semua bisnis negara. Makin besar tingkat efisien dan usaha pelayanan oleh pemerintah akan meningkatkan pula keberhasilan perusahaan. Jumlah keuntungan yang besar akan menambah penghasilan atau penerimaan pajak oleh pemerintah. Dan pada saat yang bersamaan kemajuan bisnis akan memperluas lapangan pekerjaan.

Malaysia Incorporated dapat didefinisikan sebagai suatu konsep kerjasama antara pemerintah dan privat (swasta) dalam mencapai keberhasilan dimasa yang akan datang. Sehingga pada akhirnya dapat memberikan sumbangan yang besar bagi pembangunan nasional. (Jomo, 1988: 2).

d. Privatisasi

Kebijakan privatisasi diumumkan pada bulan Maret 1983, di mana berusaha mengadakan perubahan ekonomi secara cepat. Hal ini berasal dari keinginan utama Mahathir untuk mewujudkan adanya efisiensi dan rasa tidak senang Mahathir terhadap mental subsidi. Ada sebuah pertimbangan yang sumbernya lebih bersifat politis daripada ekonomi. Pada awal tahun 1980-an, pemerintah percaya bahwa kini terdapat cukup pengusaha Bumiputera yang terlatih untuk ikut ambil bagian dalam privatisasi tanpa menghasilkan resiko di mana Bumiputera hanya dapat memainkan peranan yang kecil. Pada mulanya *New Economic Policy* dibentuk untuk mengarahkan kepada lembaga-lembaga seperti: *Majelis Amanah Rakyat (MARA)* dan *Perbadanan Nasional Berhad Berhad (PERNAS)* yang merupakan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk menjalankan industri Bumiputera baik secara individu maupun kelompok, untuk

bertindak sebagai *entrepreneur*, bukan hanya sebagai manajer dalam lembaga pemerintahan yang besar. (R. S. Milne, 1986: 1375).

Pengertian privatisasi merupakan kebalikan dari nasionalisasi, dan sasaran yang ingin dicapai dalam nasionalisasi adalah agar supaya pemerintah mengambil alih kepemilikan dari perusahaan-perusahaan privat (swasta). Sebaliknya privatisasi berarti peralihan dari peranan tugas perusahaan oleh pemerintah kepada sektor privat. (Ahmad Atory Hussain, 1996: 137).

Perusahaan dan bisnis yang dilakukan oleh swasta lebih menguntungkan. Oleh sebab itu apabila perusahaan-perusahaan pemerintah dialihkan pada sektor privat pemerintah tidak akan kehilangan sumber pendapatannya. Biasanya pemerintah menjalankan bidang pelayanan tertentu seperti: pos, dan telekomunikasi, radio dan televisi, jalan kereta api, perkapalan dan penerbangan, pelabuhan udara, klinik dan rumah sakit, lembaga pendidikan jalan raya serta bentuk pelayanan publik yang lain dikuasai oleh pemerintah. (Ahmad Atory Hussain, 1996: 140).

Pemerintah pusat dan lokal bekerja sama dalam berbagai bisnis dan perusahaan, baik secara murni maupun dalam bentuk bagi hasil. Kecenderungan pada meningkatnya partisipasi pemerintah dalam bidang bisnis, mengakibatkan adanya persaingan dengan sektor swasta. Jika dilihat dari kekuatan yang dimiliki, pemerintah dapat dengan mudah mendominasi perusahaan dan bisnis privat. Namun pada kenyataan pemerintah sering mengalami kerugian.

Pemerintah dapat menerima pemasukan dari telekomunikasi, pelabuhan, radio dan televisi, jalan kereta api dan sebagainya. Namun pemerintah masih bisa mengumpulkan pajak dan hasil pendapatan orang lain, jika bidang pelayanan ini dijalankan oleh sektor privat. Apabila bidang-bidang pelayanan ini dapat lebih baik dijalankan oleh swasta sebagai basis komersial, maka akan terdapat kemungkinan untuk memperoleh pendapatan negara yang lebih tinggi dibanding bila pemerintah yang menjalankannya. (Jomo, 1988: 3).

e. **Kebijakan Pertanian Negara**

Akhirnya pemerintah mempertimbangkan adanya suatu kebijakan baru dalam pertanian (*New Agricultural Policy*) dikeluarkan oleh Mahathir Mohamad pada 12 Januari 1984. Tujuannya adalah: 1) memaksimalkan pendapatan sektor pertanian melalui pengoptimalan sumber-sumber negara agar sumbangan sektor pertanian pada pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan; 2) memaksimalkan pendapatan pengusaha kecil melalui peningkatan daya pengeluaran supaya tingkat kemiskinan dapat dikurangi dan kualitas hidup keluarga diperbaiki; 3) memajukan dan meningkatkan hasil dan mutu komoditi-komoditi yang mempunyai potensi besar untuk ekspor dan bahan pengganti impor serta komoditi-komoditi terpilih untuk bahan makanan dan perindustrian. Untuk itu saham dari perusahaan karet kecil, padi dan lain-lain harus dibentuk kembali dalam unit-unit ekonomi yang lebih besar. (Nik Hashim Mustapha, 1985: 43).

Di satu sisi Kebijakan Pertanian Negara sifatnya radikal, karena akan memindahkan sejumlah besar petani dari lahan pertanian dengan akibat akan muncul ketidakpastian terhadap kesetiaan politik mereka. Akan tetapi tidak terlalu radikal karena kemudian diadakan peninjauan kembali kepada para petani dan dapat mengekalkan adanya ketidakseimbangan yang diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan dalam jumlah lahan pertanian para petani sendiri.

3. Kebijakan Pembangunan Nasional dan

Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (RRJP2) 1991-2000

Tahun 1990 menandakan berakhirnya Rangka Rancangan Jangka Panjang Pertama (RRJP1) dan Kebijaksanaan Ekonomi baru (*New Economic Policy*). Dalam pelaksanaan NEP (1971-1990) ekonomi Malaysia berkembang dengan pesat walaupun menghadapi berbagai tantangan. Kebijakan Pembangunan Nasional dikeluarkan Mahathir Mohamad pada 17 Juni 1991.

Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (RRJP2) 1991-2000 dibuat berlandaskan Kebijakan Pembangunan Nasional, menandakan dimulainya era baru dalam usaha untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju menjelang tahun 2020.

Tujuan utama Kebijakan Pembangunan Nasional adalah untuk mewujudkan keseimbangan yang menyeluruh antara laju pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, memastikan pembangunan yang seimbang antara sektor-sektor utama ekonomi, mengurangi dan menghapuskan kesenjangan dari segi sosial, ekonomi dan wilayah serta memastikan kesejahteraan hidup di samping menerapkan nilai-nilai sosial dan kerohanian. Kebijakan Pembangunan Nasional juga memberi keutamaan kepada pembangunan sumber manusia, menjadikan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sebuah komponen penting dalam perancangan pembangunan dan memastikan perlindungan alam sekitar untuk memperkokoh pembangunan negara yang mapan dalam jangka panjang. (*The Second Outline Perspective Plan 1991-2000*, 1991: 3-4).

Kebijakan Pembangunan Nasional mengambil kemajuan yang dicapai di bawah kebijaksanaan ekonomi baru baik keberhasilan dan kegagalan selama pelaksanaan. Mengandung beberapa perubahan dengan tujuan mengadakan satu dimensi baru dalam usaha pembangunan, terutama dalam membasmi kemiskinan dan merestrukturisasi masyarakat. Dimensi-dimensi baru Kebijakan Pembangunan Nasional adalah seperti berikut:

- a. Pergeseran strategi ke arah pemberantasan dan mengurangi kemiskinan sekaligus.
- b. Memusatkan pada tenaga kerja dan perkembangan dari *Bumiputera Comercial and Industrial Comunity* (BCIC) atau *Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera* (MPPB) sebagai strategi efektif untuk meningkatkan keikutsertaan Bumiputera di dalam sektor ekonomi modern.

- c. Mempercayakan pada sektor swasta untuk dilibatkan merestrukturisasi sasaran dengan menciptakan peluang lebih besar untuk pertumbuhan.
- d. Memusatkan pada pengembangan sumber daya manusia sebagai kebutuhan pokok untuk menuju keberhasilan sasaran hasil pertumbuhan dan distribusi. (*The Second Outline Perspective Plan 1991-2000*, 1991: 4).

Strategi pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Nasional meneruskan strategi kebijaksanaan ekonomi baru yaitu memberantas kemiskinan dan merestrukturisasi masyarakat untuk memperbaiki kesenjangan sosial dan ekonomi antar kaum/ras. Strategi pelaksanaan yang diambil untuk melaksanakan dasar pembangunan nasional adalah seperti berikut:

- a. Hasil pencapaian yang berkualitas dan stabil dalam proses menghapuskan kemiskinan dan juga mengurangi ketidakseimbangan dengan penekanan pada aspek-aspek pendidikan dan latihan sebelum bantuan diberikan.
- b. Kebijakan pembangunan nasional memperkirakan kemampuan negara untuk bersaing dalam pasar dunia di samping menghadapi tantangan baru.
- c. Peran serta semua kaum/ras penting untuk memajukan Malaysia ke taraf negara yang maju menjelang tahun 2020.
- d. Kebijakan pembangunan nasional akan mengambil beberapa perubahan terhadap peran sektor publik dalam pemberantasan kemiskinan akan ditumpukan pada program-program seperti; pendidikan, latihan, kesehatan, transportasi, perumahan, air dan listrik. Tingkat kemiskinan negara diperkirakan dapat dikurangi dari 19,1% pada tahun 1990 menjadi 7,2% pada tahun 2000.
- e. Restrukturisasi masyarakat, penghapusan perbedaan kaum mengikuti fungsi-fungsi ekonomi dan restrukturisasi hak milik menjadi program penting di bawah strategi. Tujuan dasar pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan taraf sosial dan ekonomi masyarakat Bumiputera ke tahap yang lebih maju dan kokoh. Kedudukan dicapai dengan pelaksanaan strategi

meningkatkan tenaga kerja dan penyertaan Bumiputera dalam pengelolaan sektor-sektor modern dan membentuk *Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera* (MPPB). (www.pmo.my.gov).

C. Pengaruh Kebijakan Mahathir Mohamad Terhadap Perekonomian Malaysia

1. Hasil Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Baru dan Rangka Rancangan Jangka Panjang Pertama (RRJP1)

Pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi baru sebagai dasar Rangka Rancangan Jangka Panjang Pertama (RRJP1) telah selesai pelaksanaannya pada masa pemerintahan Mahathir Mohamad pada tahun 1990. Tujuan *New Economic Policy* adalah: (1) memberantas kemiskinan dan membuka lapangan kerja yang lebih banyak untuk rakyat tanpa memandang asal-usulnya; (2) mempercepat proses perubahan struktur masyarakat untuk memperbaiki keadaan ekonomi yang tidak seimbang, sehingga penyamaan peran ekonomis tertentu dengan ras dapat dikurangi dan akhirnya dihapus. (*The Second Outline Plan 1991-2000*, 1991: 7).

Tujuan yang pertama kebijaksanaan ekonomi baru adalah membasmi kemiskinan tanpa memandang kaum, kemiskinan di Malaysia pada tahun 1970 49,3% dari total penduduk untuk dikurangi menjadi 16,7% dalam 1990. Paling besar jumlah penduduk miskin ada di pedesaan dengan kemiskinan 58,7% dibanding dengan di wilayah perkotaan 21,3%. (*The Second Outline Perspective Plan 1991-2000*, 1991: 31-32).

Tujuan yang kedua mempercepat proses perubahan struktur masyarakat, sasaran diharapkan dicapai melalui perubahan struktur keteladanan pegawai, kepemilikan saham di sektor perusahaan *Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera* (MPPB). Pendorong utama strategi kebijaksanaan ekonomi baru adalah restrukturisasi pegawai agar mencerminkan komposisi

pegawai di berbagai sektor ekonomi dan jabatan. (*The Second Outline Perspective Plan 1991-2000*, 1991: 32).

a. Pemberantasan Kemiskinan

Kemiskinan semakin berkurang dan perbedaan pendapatan semakin kecil di Malaysia, tingkat kemiskinan di Semenanjung berkurang dari 49,3% pada tahun 1970 menjadi 15% menjelang akhir tahun. Perbedaan pendapatan juga semakin berkurang bersamaan dengan peningkatan pendapatan dan peluang-peluang yang bertambah pada penduduk pedesaan termasuk pekerja wanita, berpindah dari jenis pekerjaan kegiatan tradisional pada pekerjaan dalam sektor-sektor modern pertanian, produksi dan instansi pemerintahan. Peningkatan kualitas di pedesaan turut mendorong ke arah meningkatkan kemampuan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Pendapatan penduduk pedesaan meningkat pesat berbanding dengan pendapatan penduduk perkotaan. (*The Second Outline Perspective Plan 1991-2000*, 1991: 9).

Angka penduduk miskin di Malaysia berkurangan banyak dari 1.100.000 penduduk pada tahun 1970 menjadi 619.400 penduduk pada tahun 1990, meskipun jumlah penduduk meningkat dari 2.099.000 menjadi 3.614.600. Sebagian besar penduduk miskin terdiri dari penduduk Melayu dan kaum Bumiputera yang lain. Kemiskinan juga terdapat di kalangan masyarakat Cina, India dan kaum-kaum lain. Dari segi wilayah kemiskinan di negeri-negeri Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Sabah dan Sarawak lebih tinggi dari rata-rata negara. (*The Second Outline Perspective Plan 1991-2000*, 1991: 10).

b. Pengangguran

Pertengahan dekade 1980-an kejayaan besar dicapai dalam meningkatkan peluang lapangan kerja terutama di sektor ekonomi modern. Tenaga kerja meningkat 3,6% per tahun sepanjang dekade 1970-an melebihi tingkat pertumbuhan tenaga buruh. Keadaan ini mengurangi pengangguran menjadi 4,6% pada tahun 1982. Merupakan satu pencapaian yang besar dibandingkan dengan tahun 1970 tingkat

pengangguran di tingkat tinggi yaitu 7,4%. Tingkat pengangguran dalam dekade 1980-an meningkat dibarengi dengan kemelesetan ekonomi 1985-1986 dan mencapai tingkat tertinggi yaitu 8,3 % pada tahun 1986. Dengan pemulihan ekonomi tingkat pengangguran berkurang 6% pada tahun 1990. Kebanyakan penganggur berasal dari lulusan sekolah dan memasuki dunia kerja, sering memilih pekerjaan dan kurang berminat bekerja di ladang-ladang dan industri konstruksi. Dengan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan angkatan kerja yang semakin ketat, kekurangan pekerja di beberapa sektor dan kawasan di negara ini timbul. Walaupun sistem pendidikan berkembang secara luas di semua peringkat untuk menambah tenaga berkualitas lebih ramai, maksud dan harapan pencari kerja mungkin tidak seimbang dengan kebutuhan majikan. (*The Second Outline Perspective Plan 1991-2000*, 1991: 10).

c. Restrukturisasi Tenaga Kerja

Salah satu tujuan utama kebijaksanaan ekonomi baru adalah merestrukturisasi tenaga kerja untuk menggambarkan komposisi kaum/ras dalam negara. Diikuti dengan perubahan struktur ekonomi dan munculnya sektor-sektor produksi, konstruksi dan pemerintahan sebagai sektor-sektor pertumbuhan utama, jumlah tenaga kerja Bumiputera ke sektor-sektor ekonomi di perkotaan bertambah. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi adalah pendidikan, tenaga kerja terintegrasi dan dampak positif kebijakan pemerintah. Tenaga kerja Bumiputera pada sektor produksi 50,3% dari jumlah tenaga kerja dalam sektor tersebut. Sebagian besar dari penambahan tenaga kerja Bumiputera dalam pekerjaan rendah, namun dalam banyak bidang pekerjaan persentase Bumiputera meningkat dan menjadikan lebih beragam berbanding dengan kedudukan pada tahun 1970. (*The Second Outline Perspective Plan 1991-2000*, 1991: 11).

Sebaliknya persentase non-Bumiputera dalam sektor pertanian, dalam kepemilikan tanah, sektor publik dan pemerintahan tidak banyak berubah, walaupun jumlah pekerja Bumiputera paling

banyak dalam sektor publik dan jasa serta profesi mengajar. Non-Bumiputera lebih banyak dalam jabatan-jabatan profesional dan teknikal, terutama dalam instansi kesehatan/kedokteran, teknisi dan akunting. Melihat hal ini, ditingkatkanlah tenaga kerja profesional dan teknisi Bumiputera. Bagi kaum India dalam beberapa bidang pekerjaan lebih rendah dari jumlah keseluruhan, dalam bidang-bidang pekerjaan penyertaan sangat memuaskan, dari segi pertumbuhannya lebih rendah dari yang dicapai kaum Bumiputera dan Cina. Akibatnya, bagian kaum India dalam bidang profesional menurun sejak 1970. (*The Second Outline Perspective Plan 1991-2000*, 1991: 11).

d. Restrukturisasi Saham/Modal

Satu unsur penting strategi kebijaksanaan ekonomi baru adalah restrukturisasi saham/modal dalam perusahaan. Tujuan yang ditetapkan ialah menjelang penghujung tahun 1990, saham Bumiputera akan meningkat sekurang-kurangnya 30% manakala yang lainnya meningkat 40%. Pemilikan saham rakyat Malaysia lain bertambah menjadi 46,2%, melebihi target yang ditetapkan. Kaum Cina meningkat menjadi 44,9%, India tetap di tingkat 1% dan kaum lain 0,3%. Adanya keterlibatan asing, pemilikan saham berkurang dari 63,3% tahun 1970 menjadi 25,1% pada tahun 1990 melebihi target yang ditetapkan kebijaksanaan ekonomi baru untuk mengurangi penguasaan asing dalam ekonomi negara. Sebaliknya, saham Bumiputera meningkat hanya 20,3% saja jauh lebih rendah dari target sebesar 30%. Saham yang didaftarkan di bawah perusahaan-perusahaan/korporasi calon meningkat menjadi 8,4%. (*The Second Outline Perspective Plan 1991-2000*, 1991: 12).

Peningkatan saham Bumiputera merupakan satu pencapaian besar walaupun tidak mencapai tujuan atau target yang ditetapkan. Dari segi nilai mutlak, saham Bumiputera meningkat dari 125,6 juta dollar pada tahun 1970 menjadi 22,298 dollar juta pada tahun 1990. Pertumbuhan sebanyak 29,6% per tahun yaitu jauh lebih tinggi dari

pertumbuhan keseluruhan saham sektor ini pada tingkat 16,3%. (*The Second Outline Perspective Plan 1991-2000*, 1991: 12).

Tahap pemilikan oleh Bumiputera sebagai perusahaan individu hanya kira-kira 8,2% menjelang tahun 1990. Semenjak kemelesetan pada pertengahan dekade 1980-an, pertumbuhan saham Bumiputera menjadi semakin lambat disebabkan oleh sumber daya yang terbatas, pengurangan kegiatan instansi-instansi dan kebijakan liberal mengenai pemilikan saham. Ini menunjukkan bahwa tujuan restrukturisasi saham memerlukan waktu yang panjang untuk dicapai.

e. Pembentukan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera

Tujuan untuk membentuk sebuah *Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera* atau *Bumiputera Comercial and Industrial Comunity (BCIC)* didukung pemerintah melalui pemberian kontrak, kuota dan lisensi kepada bisnis dan *joint venture* milik Bumiputera. Di samping itu, instansi-instansi pemerintah seperti *Majelis Amanah Rakyat (MARA)*, *Perbadanan Nasional Berhad Berhad (Pernas)* dan *Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri (PKEN)* aktif dalam membantu Bumiputera. Usaha-usaha lain termasuk penyediaan beasiswa-beasiswa pendidikan dan latihan, kemudahan kredit dan bantuan konsultasi. Hasil dari usaha tersebut dapat meningkatkan jumlah perusahaan-perusahaan yang dimiliki dan dijalankan Bumiputera serta mewujudkan kelompok baru usahawan Bumiputera terutama di kalangan masyarakat Melayu, namun demikian dibandingkan dengan kaum lain, penyertaan Bumiputera masih terlalu kecil. Kebanyakan sektor bisnis dan perdagangan, penyertaan Bumiputera jauh lebih rendah dari non-Bumiputera. (*The Second Outline Perspective Plan 1991-2000*, 1991: 12-13).

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dampak dari kebijakan *New Economic Policy* pada masa pemerintahan Mahathir Mohamad yang diusahakan kearah industrialisasi di Malaysia, membawa pengaruh tidak langsung terhadap golongan Melayu khususnya. Diantaranya yang penting adalah:

- (1) terbentuknya kelas pengusaha Bumiputera dalam hubungannya dengan politik;
- (2) berkembangnya *enterpreneurship* Bumiputera; (3) semangat yang ambisius dalam proyek-proyek berharga yang didirikan pemerintah.

2. Hasil Pelaksanaan

Kebijaksanaan Pandang Ke Timur (Look East Policy)

Kebijaksanaan Pandang Ke Timur yang dilaksanakan mempunyai dampak signifikan terhadap perkembangan perekonomian Malaysia dan dapat dikatakan sebagai titik tolak kemajuan Malaysia kedepan. Banyak kemajuan yang dicapai, akan tetapi tidak sedikit pula hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan Mahathir. Mahathir tertarik pada rahasia sukses Jepang dan pengembangan luar biasa berada dalam etika tenaga kerja, moral, dan kemampuan manajemen. Suatu program yang memungkinkan pelajar Malaysia untuk belajar di Jepang berperan untuk membangun ekonomi dan pembangunan sosial Malaysia. Karena tujuan ini, Malaysia memutuskan untuk mengirimkan para siswa ke Jepang untuk belajar *know-how* tidak hanya teknis dan akademis tetapi juga untuk belajar etika tenaga kerja dan disiplin orang-orang Jepang. Program pertama, adalah untuk mengirimkan para siswa orang Malaysia ke universitas Jepang dan institut teknologi. Kedua, adalah untuk mengirimkan peserta latihan ke industri Jepang dan pelatihan mendirikan. Pembiayaan ditanggung oleh Pemerintah Malaysia, dan Pemerintah Jepang mendukung program ini dengan pengiriman guru-guru Jepang ke Malaysia dan dari segi pembiayaan. (www.aleps.org).

Mahathir Mohamad mengirim 13.000 orang untuk mengikuti pelatihan di Jepang sebanyak 3.000 orang merupakan golongan pelajar. Kebijakan Pandang Ke Timur pada awalnya bertumpu pada bidang teknikal, mekanikal dan *français*. Sebagai langkah percobaan sekitar 260 orang dikirim ke Jepang, 180 orang mendapat pendidikan di Universitas Malaya dan 80 orang di Universitas

Teknologi untuk diploma teknikal. Setelah 22 tahun rancangan ini dijalankan, pemerintah Malaysia mengirimkan 13.000 pelajar sekitar 85% masih bekerja di Jepang sebagai orang gajian dan 10% bekerja di perusahaan pemerintah dan swasta Jepang serta 5% bekerja sendiri. Kebanyakan peserta lebih meminati sebagai orang gajian karena tidak memikirkan berbagai masalah dan merasa puas dengan gaji yang diperoleh. Dari jumlah keseluruhan peserta sebanyak 10.000 peserta gagal menempuh studi disebabkan kebosanan dan proses penyesuaian diri. (www.aleps.org).

Terkait dengan operasionalisasi *Look East Policy* dalam pelaksanaan industri berat mengalami banyak kesulitan, karena kurangnya daya saing dan kecilnya pasaran dalam negeri. Tahun 1983 kebijaksanaan ini dibentuk secara resmi, kontrak produksi dari industri-industri baru yang diutamakan adalah perusahaan-perusahaan dengan profil Melayu yang kuat. Perwaja menelan biaya 1,2 milyar ringgit atau sekitar 480 juta dolar AS. Perusahaan baja negara Malaysia, bekerjasama dengan perusahaan *Nippon Steel of Japan* dan berkapasitas 600.000 ton itu dinyatakan gagal beroperasi di timur laut Malaysia tahun 1986, karena mesin yang dibeli dari mitra Jepang itu tidak bisa menghasilkan produksi akhir yang spesifik dan mengalami kerugian sebesar 117,75 juta ringgit atau 47 juta dolar AS dalam tahun 1987. (Suara Pembaharuan, 20 November 1988, hal. VII).

Perusahaan *Nippon Steel of Japan* kemudian mengakui bahwa proyek memang gagal dan membayar 240 juta ringgit atau sekitar 96 juta dolar AS sebagai ganti rugi kepada Perwaja. Pabrik baja negara Malaysia itu mengubah manajemenya agar perusahaan tersebut dapat membawa keuntungan di kemudian hari. (Suara Pembaharuan, 20 November 1988, hal. VII).

Perusahaan mobil itu berpatungan dengan perusahaan mobil Mitsubishi dari Jepang, bernilai 245 juta dolar AS. Ketika dibangun dari pabrik rakitan tahun 1986, Proton menyatakan dengan bangga bahwa pihaknya akan dapat menjual

125.000 mobil menjelang tahun 1988. Namun proyek-proyek untuk tahun 1988 sedang berjalan di bawah 35.000 mobil dan keadaan semakin parah. (Suara Pembaharuan, 20 November 1988, hal. VII).

Kegagalan proyek industri mobil Proton memang telah diramalkan oleh beberapa ekonom yang mengatakan bahwa penduduk Malaysia yang 16,5 juta jiwa pada waktu itu hanya menyediakan suatu pasaran yang amat kecil, sedangkan Proton tidak akan bersaing secara global. Antara tahun 1985 dan 1986, nilai komoditi sangat merosot. Akibatnya menjerumuskan ekonomi Malaysia ke dalam resesi yang sangat buruk sesudah Perang Dunia II, tetapi sejak awal tahun 1987 nilai komoditi mulai meningkat dan berkembang sampai sekarang walaupun berubah menjadi perusahaan perseorangan. Sekalipun demikian dengan pengalaman jatuhnya harga komoditi tersebut Malaysia tidak boleh lagi terlalu bergantung hanya pada satu dasar saja secara khusus. (Suara Pembaharuan, 20 November 1988, hal. VII).

Industri berat memerlukan adanya pasaran dalam negeri yang luas dan diciptakan dengan usaha meningkatkan jumlah penduduk Malaysia. Persaingan dalam pasar akan meninggikan daya dan mutu pengeluaran untuk ekspor. Pertumbuhan penduduk sebagai modal utama untuk mencapai kemajuan ekonomi dan sosial sebuah negara, serta juga dapat meningkatkan daya pengeluaran ekonomi. Dengan demikian perhitungan demografi diambil dalam perancangan pembangunan untuk memastikan kemajuan ekonomi dan pertumbuhan sosial.

Jumlah penduduk Malaysia pada sensus 2000 berjumlah 23,27 juta dengan penduduk Melayu 61%, penduduk Cina 30%, penduduk India 8% dan lain-lain 1% (Buku Resmi Tahunan Malaysia, 2002: 6). Dari sensus dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang diharapkan melebihi target yang direncanakan, sehingga Malaysia mempunyai pasaran lebih dalam mendistribusikan hasil-hasil industri seperti ditunjukkan pada tabel rencana penduduk. (www.sabah.net).

Tabel 2

Laju Pertumbuhan Penduduk ke Arah Pencapaian Kebijakan 70 Juta Penduduk		
Tahun	Jumlah Kadar Kesuburan	Pertumbuhan Penduduk (Juta)
1990	3,6	17,6
2000	3,5	22,3
2010	3,3	27,7
2020	3,1	33,6
2030	2,9	39,8
2040	2,7	46,0
2050	2,5	51,9
2060	2,3	57,5
2070	2,05	62,1
2080	2,05	65,8
2090	2,05	68,7
2100	2,05	70,8

*JKK (Jumlah kadar kesuburan) adalah salah satu ukuran status kesuburan bagi suatu kumpulan, komunitas atau negara (rata-rata Jumlah anak bagi setiap wanita pada tahun umur subur 15-49 tahun).

(Sumber: www.sabah.net)

Malaysia Incorporation dibentuk dengan tujuan untuk mempererat kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam membangun negara dan dengan kerjasama diharapkan pembangunan negara dapat berjalan dengan baik dan lebih meningkat. *Malaysia Incorporation* menghapuskan pemikiran bahwa pihak swasta hanya mementingkan keuntungan saja dengan mengabaikan kepentingan masyarakat umum dan menganggap pemerintah menjadi penghalang untuk bisnis dan perdagangan. Sektor publik milik pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat mengkonsepsikan pemikiran dengan menganggap seolah-olah pemerintah adalah pemegang saham dalam setiap syarikat swasta. Sektor swasta dapat memajukan bisnis dengan lapangan pekerjaan ditambah, sehingga disatu sisi pengangguran dapat dikurangi. (Ahmad Atory Hussain, 1996: 144).

Terdapat dampak negatif dari pembentukan *Malaysia Incorporation*, yaitu lebih menguntungkan golongan kapitalis yang mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan berlebih. Bagi golongan kapitalis kerjasama pemerintah dan

swasta akan memberikan peluang lebih cerah untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Disebabkan motif bisnis golongan kapitalis adalah untuk mencari keuntungan terlebih dahulu daripada kepentingan masyarakat umum. Pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap swasta kemungkinan tidak berpengaruh disebabkan sistem politik Malaysia yang terlalu terikat dengan golongan kapitalis, sehingga akan mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah Malaysia dalam perdagangan dan perindustrian diubah mengikuti perkembangan politik yang ada. (Ahmad Atory Hussain, 1996: 145).

Seiring dengan *Malaysia Incorporation* yang terbukti berhasil meningkatkan kerjasama pemerintah dan swasta, program privatisasi juga terus diperhatikan sebagai bagian dari rangka kerja mempercepat pertumbuhan ekonomi negara. Pelaksanaan privatisasi sedikit banyak membantu negara mengurangi pengeluaran pembangunan yang ditanggung oleh pemerintah Malaysia. Program privatisasi juga terbukti merangsang pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan efisiensi proyek-proyek yang diswastakan, di samping memberi pengaruh ganda kepada ekonomi. Melalui program privatisasi lebih banyak sumber dapat dialokasikan oleh pemerintah untuk sektor lain dan menyumbang kepada pertumbuhan sektor tersebut.

Akhir tahun 1999 sebanyak 202 proyek dan perusahaan berhasil diprivatisasi, terdiri dari 104 proyek baru dan 98 proyek lama. Dari jumlah tersebut 184 proyek dan 18 perusahaan diprivatisasi. Proyek dan perusahaan terdiri dari perusahaan-perusahaan pemerintah, instansi-instansi pemerintah, pembangunan tanah, proyek-proyek baru seperti perusahaan umum, stasiun televisi dan sebagainya. Sektor-sektor terdiri dari sektor konstruksi, listrik dan gas, transportasi dan multimedia, irigasi dan bendungan, instansi pemerintah, *Perdagangan borong dan runcit*, hotel dan restoran, instansi keuangan, produksi, pertanian dan kehutanan, dan instansi-instansi lain. Sepanjang tahun 1999

sebanyak 16 proyek privatisasi telah ditandatangani. Tidak termasuk proyek-proyek yang telah disetujui untuk diprivatisasi oleh pemerintah dan sedang dalam proses. (www.pmo.gov.my).

Proyek-Proyek Privatisasi Tahun 1999		
No.	Proyek	Status
1.	Pembangunan Tanah dipersimpangan Jalan Pahang/Jalan Tun Razak (Proyek Taman Sari)	Pembangunan Tanah (<i>land swap</i>)
2.	Pembangunan Rumah Bujang TUDM, Subang	Pembangunan Tanah (<i>land swap</i>)
3.	Pembangunan Kompleks Angkutan Darat di Bukit Gedung, Pulau Pinang	Pembangunan Tanah (<i>land swap</i>)
4.	Privatisasi Pembangunan Tanah Lembaga Pelabuhan Kelang di Taman Dato' Hamid, Kelang	Pembangunan Tanah (<i>land swap</i>)
5.	<i>YPM Realities Sdn Bhd</i>	Penjualan Kekayaan
6.	Perusahaan Air Pulau Pinang	Perseroan
7.	Perusahaan Air Terengganu	Perseroan
8.	Majlis Pembangunan Sumber Manusia	Perseroan
9.	Privatisasi Katering	Kontrak Kerja
10.	<i>Percetakan Undang-undang, Perusahaan Peguam Negara</i>	Kontrak Kerja
11.	<i>Pengendalian Kotak Plastik Ulangpakai dan Pemungghaan Barang di Kompleks Pasar Borong, Kuala Lumpur</i>	Kontrak Kerja
12.	<i>Syarikat Majutani KEDA Sdn Bhd</i>	Pembelian Saham
13.	<i>Syarikat Darabif Sdn Bhd</i>	Penjualan Kekayaan
14.	<i>Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara (DARA)</i>	Penjualan Aset
15.	<i>Syarikat Pahangbif Sdn Bhd</i>	Penjualan Kekayaan
16.	<i>Lembaga Kemajuan Wilayah Jengka (JENGKA)</i>	Penjualan Aset

(Sumber: www.pmo.gov.my)

Sejak pertengahan tahun 1980-an Malaysia mengalami pertumbuhan ekonomi pesat mencapai pertumbuhan pe

ngeluaran dalam negeri kotor melebihi 8% per tahun selama 9 tahun berturut-turut. Pertumbuhan pesat didukung oleh sektor produksi dan jasa sementara sektor pertanian mengalami tingkat pertumbuhan yang kecil dan sederhana 2-3% per tahun. Sejak pelaksanaan Kebijakan Baru Pertanian Negara Pertama mulai 1984 dan Kebijakan Baru Pertanian Negara Kedua mulai 1992, sektor pertanian mencatat tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan

sebanyak 3,2%. Jumlah nilai ditambah pertanian meningkat dari RM11,9 milyar pada tahun 1985 menjadi RM16,2 milyar pada tahun 1995. Nilai ekspor barang pertanian pula meningkat dari RM13,9 milyar tahun 1985 menjadi RM35,4 milyar pada tahun 1995 yang merupakan pertumbuhan rata-rata tahunan sebanyak 9,8%. Perkembangan pesat dalam ekonomi sejak tahun 1991 dan krisis ekonomi yang dihadapi sekarang menimbulkan tantangan baru dalam pengelolaan sektor pertanian. tantangan tersebut melibatkan masalah yang berhubungan dengan ekonomi yang berkembang pesat secara terus menerus, terutama ekonomi yang mencapai tenaga kerja berlebih serta menghadapi masalah defisit perdagangan. (www.pmo.gov.my).

3. Hasil Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Nasional dan Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (RRJP 2) 1991-2000

Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (RRJP2) 1991-2000 menjadi dasar pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Nasional, yang bertujuan untuk mencapai pembangunan seimbang. Rangka kerja umum pembangunan ekonomi yang diterapkan untuk memperkuat Malaysia sebagai sebuah ekonomi modern yang berasaskan industri dan kemajuan ekonomi dan sosial yang pesat. Pada tahun 1998 ekonomi mengalami kemerosotan disebabkan krisis keuangan Asia. Pemerintah Malaysia kemudian memperkenalkan beberapa langkah yang terbukti memulihkan ekonomi dan menguatkan kedudukan Malaysia untuk menghadapi tantangan masa datang.

Secara keseluruhan ekonomi berkembang pada rata-rata 7,0% per tahun dan mencapai target, walaupun ekonomi mengalami krisis keuangan pada tahun 1997-1998. Tingkat pertumbuhan yang tinggi dicapai dalam tingkat inflasi dan lapangan pekerjaan meningkat 3,3% sedang tingkat pengangguran berada pada tahap yang rendah yaitu pada 3,1% dalam periode tersebut (*The Third Outline Perspective Plan 2001-2010*, 2001: 46). Pendapatan per kapita meningkat rata-

rata 7,8% per tahun dan bertambah dua kali lipat dari RM6,298 menjadi RM13,359 pada akhir RRJP2. Kesamaan daya beli per kapita tumbuh 5,3% per tahun untuk mencapai USD8,852 atau 2,5 kali lebih tinggi dibanding per kapita pendapatan USD3,516. (*The Third Outline Perspective Plan 2001-2010*, 2001: 34).

Dalam tahun 1997-1998 ekonomi Malaysia merosot akibat pengaruh krisis keuangan Asia Timur, dampaknya dialami pada tahun 1998. *Majelis Tindakan Ekonomi Negara* (MTEN) dibentuk pada 7 Januari 1998 sebagai sebuah badan konsultan untuk menangani krisis ekonomi. Di bawah MTEN, *Badan Pemulihan Ekonomi Negara* dibentuk sebagai garis panduan untuk pemulihan ekonomi. Badan pemulihan bekerja untuk menstabilkan mata uang, mengembalikan kepercayaan pasar, menjaga kestabilan pasar keuangan serta menangani isu-isu seperti memperbaiki kebijakan ekonomi dan meneruskan agenda pemerataan sosial ekonomi. Empat komponen utama dalam langkah-langkah pemulihan tersebut adalah:

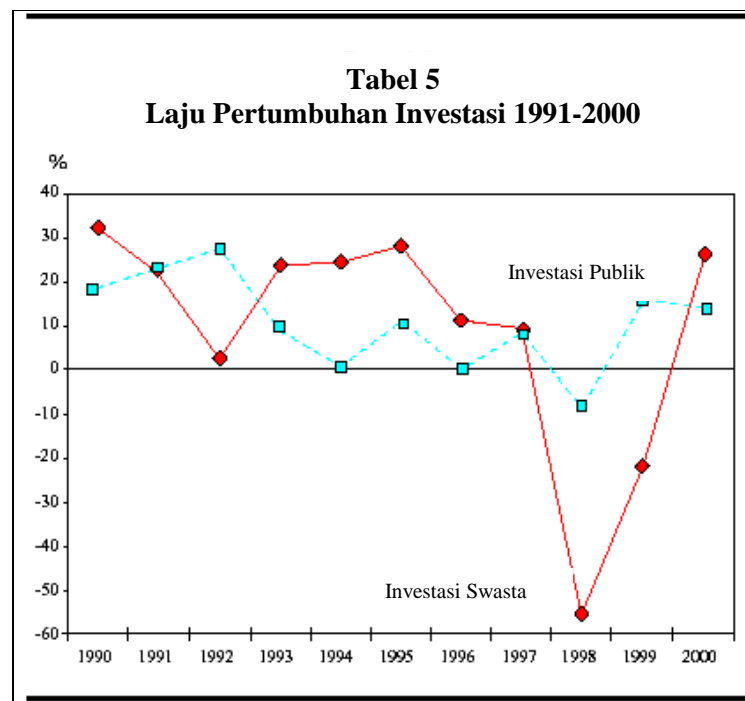
- 1) Stimulus fiskal yang ditujukan untuk sektor utama untuk mencegah kontraksi singkat dan menaikkan pertumbuhan ekonomi.
- 2) Kebijakan keuangan untuk menurunkan tingkat bunga.
- 3) Menetapkan *Danaharta* untuk menangani peningkatan hutang dalam portfolio sektor perbankan, *Danamodal* untuk menangani permodalan dan penggabungan sektor perbankan, dan hutang perseroan/perusahaan untuk memudahkan strukturisasi hutang untuk perusahaan-perusahaan maju.
- 4) Pengenalan tentang modal yang selektif mengendalikan ukuran sebagai *pre-emptive* menginjak 1 September 1998, termasuk melarang Ringgit diperdagangkan di luar negara dan menetapkan Ringgit pada RM3,80 untuk USD1,00. (*The Third Outline Perspective Plan 2001-2010*, 2001: 35)

Keadaan stabil hasil dari penetapan nilai Ringgit telah memudahkan proses pembuatan keputusan dan memungkinkan Malaysia mengambil peluang

dari pemulihan permintaan luar. Akibat yang terjadi adalah tingkatan surplus keuangan yang belum pernah terjadi 13,9% dari *Gross National Product* untuk 1998 dan 17,1% dari *Gross National Product* untuk 1999. Surplus mendukung kenaikan yang tajam dalam cadangan internasional, meningkatkan kebijakan moneter dan menyediakan likuiditas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. (*The Third Outline Perspective Plan 2001-2010*, 2001: 35).

Pendukung utama pertumbuhan ekonomi Malaysia adalah sektor swasta serta ekspor barang dan jasa seperti ditunjukkan dalam tabel target dan pencapaian ekonomi makro. Investasi swasta berkembang pada tingkat 2,9% per tahun, jauh lebih rendah dari target sebanyak 8,0% per tahun disebabkan oleh krisis ekonomi pada tahun 1998 seperti ditunjukkan dalam tabel pertumbuhan investasi. Dalam periode tujuh tahun pertama RRJP2, investasi swasta merupakan pendorong utama pertumbuhan dan berkembang pesat pada tingkat 17,0 % per tahun. Pelaksanaan pesat program privatisasi meningkatkan penanaman modal dalam negeri terutama dalam sektor peralatan, transportasi dan jasa. Aliran masuk investasi asing yang besar ke dalam sektor produksi untuk peningkatan kapasitas industri berorientasikan ekspor termasuk sektor minyak dan gas serta investasi dalam bidang berintensif modal dan berteknologi tinggi turut menyumbang tingkat investasi swasta yang tinggi. Promosi *foreign direct investments* (FDI) diperkuat dengan pengenalan beberapa paket insentif tambahan pada tahun 1996 untuk menarik perusahaan informasi dan teknologi komunikasi untuk menjalankan operasi dalam *Koridor Raya Multimedia*. (*The Third Outline Perspective Plan 2001-2010*, 2001: 38-39).

Tabel 4 Target dan Pencapaian Ekonomi Makro (%)		
	Target RRJP2	Pencapaian RRJP2
Tingkat Pertumbuhan Tahunan Rata-rata		
KDNK	7,0	7,0
Konsumsi Swasta	7,2	5,5
Konsumsi Publik	5,8	5,5
Investasi Swasta	8,0	2,9
Investasi Publik	-0,4	10,5
Ekspor Barang dan Jasa	6,3	12,4
Impor Barang dan Jasa	5,7	11,4
Tenaga Kerja	3,1	3,3
Angkatan Kerja	2,9	3,1
Persentase kepada KNK		
Tabungan	36,2	39,0
Investasi	34,5	29,0
Tingkat Pengangguran	4,0	3,1



(Sumber: *The Third Outline Perspective Plan 2001-2010*, 2001: 39)

Terdapat hasil yang berbeda-beda dicatat dari segi pencapaian sasaran hasil Kebijakan Pembangunan Nasional. Dalam aspek pemberantasan kemiskinan dan restrukturisasi tenaga kerja, negara mencapai perkembangan pesat dalam periode RRJP2. Kemajuan juga terlihat dalam pembangunan *Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera* (MPPB). Akan tetapi, pemilikan modal oleh Bumiputera menurun dari yang dicatat pada tahun 1990.

Tingkat kemiskinan rakyat Malaysia menurun dari 16,5% pada tahun 1990 menjadi 7,5% pada tahun 1999 seperti ditunjukkan dalam tabel pencapaian pemberantasan kemiskinan. Banyaknya keluarga miskin berkurang sekitar 39 % menjadi 351.100 pada tahun 1999. Tingkat kemiskinan di pedesaan dan perkotaan menurun hampir separuh dari tingkatan pada tahun 1990. Tingkat kemiskinan di kalangan rakyat Malaysia berkurang dari 3,9% atau 137.100 keluarga pada tahun 1990 menjadi 1,4% atau 64.100 keluarga pada tahun 1999. Rata-rata pendapatan bulanan masyarakat Malaysia meningkat dua kali lipat menjadi RM2,472 pada tahun 1999. Rata-rata pendapatan masyarakat 40% meningkat sebanyak 11,7% per tahun, lebih rendah dibanding yang dicatat kategori pendapatan masyarakat 20% dan 40%. (*The Third Outline Perspective Plan 2001-2010*, 2001: 50).

Tabel 6						
Pemberantasan Kemiskinan 1990 dan 1999						
	1990			1999		
	Jumlah	Perkotaan	Pedesaan	Jumlah	Perkotaan	Pedesaan
Tingkat Kemiskinan ² (%)	16,5	7,1	21,1	7,5	3,4	12,4
Jumlah Keluarga Miskin ('000)	574,5	82,0	492,5	351,1	86,8	264,3
Tingkat Kemiskinan ³ (%)	3,9	1,3	5,2	1,4	0,5	2,4
Jumlah Keluarga Miskin ('000)	137,1	15,5	121,6	64,1	13,5	50,6
Jumlah Keluarga ('000)	3.486,6	1.149,3	2.337,3	4.681,5	2.548,0	2.133,5
Catatan:						
1. Data kemiskinan merujuk pada warganegara Malaysia.						
2. Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) tahun 1999 adalah RM510 per bulan untuk ukuran keluarga 4,6 di Semenanjung Malaysia; RM685 per bulan untuk ukuran keluarga 4,9 di Sabah; dan RM584 perbulan untuk ukuran keluarga 4,8 di Sarawak.						
3. Kemiskinan dianggar berdasarkan separuh dari PGK.						

(Sumber: *The Third Outline Perspective Plan 2001-2010*, 2001: 50)

Pemilikan modal saham Bumiputera dalam sektor korporat meningkat dari 19,3% pada tahun 1990 menjadi 20,6% pada tahun 1995 tetapi menurun menjadi 19,1% pada tahun 1999. Dalam nilai mutlak, pemilikan kekayaan Bumiputera meningkat dari RM20,9 milyar pada tahun 1990 menjadi RM59,4 milyar pada tahun 1999. Pada akhir periode RRJP2, sejumlah 19,6% perusahaan dengan pendaftar syarikat berada di bawah kendali Bumiputera. Persentase perusahaan Bumiputera dalam semua sektor ekonomi masih rendah yaitu antara 8,7% hingga 32,6 % sebagian besar dipusatkan dalam sektor pertanian, konstruksi dan transportasi. (*The Third Outline Perspective Plan 2001-2010*, 2001: 51).

Pemilikan kekayaan non-Bumiputera meningkat dengan dari RM50,8 milyar pada tahun 1990 menjadi RM125 milyar pada tahun 1999, walaupun persentase saham korporat menurun dari 46,8% pada tahun 1990 menjadi 40,3% pada tahun 1999. Promosi investasi asing untuk merangsang pertumbuhan dan mempercepat pemulihan ekonomi menghasilkan peningkatan nyata dalam pemilikan modal kekayaan asing dalam sektor korporat dari 25,4% menjadi 32,7% dalam periode yang sama. (*The Third Outline Perspective Plan 2001-2010*, 2001: 51).

Tabel 7
Pencapaian Restrukturisasi Masyarakat 1990-2000

	1990	2000
Kepemilikan Modal Sektor Korporat (%)		
Bumiputera	19,3	19,1
Non-Bumiputera	46,8	40,3
Orang Asing	25,4	32,7
Perusahaan Nominasi	8,5	7,9
Tenaga kerja Bumiputera menurut Sektor (% dari jumlah tenaga kerja)		
Pertanian	67,9	61,6
Pertambangan dan Penggalian	51,9	57,2
Produksi	46,4	49,1
Konstruksi	34,9	37,4
Listrik, Gas dan Air	70,2	71,2
<i>Perdagangan borong dan runcit</i>	49,0	56,0
Transportasi	34,5	38,3
Keuangan	41,1	45,3
Jasa Pelayanan Lain	64,7	63,5
Tenaga Kerja Bumiputera dalam Kategori Jabatan Tinggi (% dari jumlah tenaga kerja)		
Profesional dan Teknikal	60,5	63,8
Manajer dan Administrasi	28,7	36,9
Daftar Bumiputera Profesional (% untuk setiap profesi)		
Akuntan	11,2	15,9
Arsitek	27,6	28,9
Dokter	27,8	36,7
Dokter Gigi	24,3	34,8
Dokter Hewan	35,9	42,6
Surveyor	13,1	26,5
Insinyur	44,7	47,8
Pengacara	22,3	31,3

(Sumber: *The Third Outline Perspective Plan 2001-2010*, 2001: 53)

Usaha pemerintah untuk meningkatkan persentase tenaga kerja Bumiputera untuk jabatan tinggi diperlengkap oleh inisiatif sektor swasta dengan mewujudkan lebih banyak lapangan pekerjaan pada Bumiputera. Hasilnya, persentase Bumiputera dalam kategori profesional dan teknik, termasuk guru dan perawat meningkat dari 60,5% pada tahun 1990 menjadi 63,8% pada tahun 2000. Persentase Bumiputera dalam kategori manajer dan administrasi juga meningkat dari 28,7% menjadi 36,9% dalam periode yang sama. Akan tetapi persentase tersebut masih rendah dibanding dengan etnik lain. Persentase Bumiputera terdaftar dalam delapan kategori pekerjaan profesional yaitu akuntan, arsitek, dokter, dokter gigi, insinyur, pengacara, *surveyor* dan dokter hewan meningkat dari 20,7% pada tahun 1990 menjadi 28,9% pada tahun 1999. (*The Third Outline Perspective Plan 2001-2010*, 2001: 54).

Dalam periode RRJP2 penekanan diberikan kepada pembangunan *Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera* melalui berbagai program pembangunan kewiraswastaan. Sektor swasta menyumbang melaksanakan program seperti pembangunan *vendor* dan *francais* serta usaha bersama. Pelaksanaan program untuk membangunkan *Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera* juga menyumbang peningkatan jumlah usahawan Bumiputera dalam kedua sektor korporat dan bukan korporat. Terdapat kira-kira 697.000 usahawan Bumiputera dengan dalam periode RRJP2. Krisis ekonomi pada tahun 1998 telah mempengaruhi prestasi perusahaan Bumiputera. Walaupun jumlah usaha bisnis Bumiputera dalam sektor ekonomi modern dan dinamis telah meningkat, sejumlah besar usahawan Bumiputera dipusatkan dalam sektor konstruksi dan aktivitas jasa seperti distribusi gas, minyak dan pariwisata. (*The Third Outline Perspective Plan 2001-2010*, 2001: 54-55).

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan Mahathir Mohamad mempunyai pengaruh besar terhadap perubahan perekonomian Malaysia. Bersamaan dengan itu Kebijakan Pandang Ke Timur (*Look East Policy*) untuk mencontoh keberhasilan pembangunan di Jepang dan Korea Selatan telah dilancarkan. Bagi Inggris hal ini ditafsirkan sebagai kebijakan yang membelakangi Barat, walaupun pada hakekatnya tidak. Ini merupakan kebijakan untuk mengurangi ketergantungan Malaysia yang berlebihan kepada Barat dan kini melihat serta mengambil apa yang baik, tidak terkecuali itu dari Barat dan Timur.

Tidaklah dapat disangkal bahwa Mahathir memang merupakan seorang pemimpin yang mempunyai visi kontroversial. Walaupun pada masa kepemimpinannya tidak terbayang akan membuat perubahan-perubahan besar namun terbukti bahwa berbagai kebijakan itu diperkenalkan. Sekalipun demikian, Mahathir tidak mengesampingkan Kebijakan Ekonomi Baru (NEP) yang diperkenalkan tahun 1971. Akan tetapi tidak semua target dapat dicapai, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan. Kebijakan itu diteruskan dan berdasarkan ada kebijakan tersebut berbagai perubahan dilakukan.

Kemiskinan dan restrukturisasi masyarakat yang menjadi permasalahan pokok dapat dikurangi dan tidak adanya sentimen terhadap ras/kaum tertentu dalam setiap kegiatan baik ekonomi maupun politik. Krisis ekonomi yang pernah menghantam Malaysia dapat di atasi dengan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak lain terutama IMF, bahkan diantara negara-negara di Asia Tenggara, Malaysia dapat bangkit kembali menjadi macan Asia Tenggara meninggalkan negara-negara lain. Hal lain dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan tidak semua dapat dicapai dengan baik bahkan terdapat kendala. Peranan Perdana Menteri Malaysia dalam pembuatan kebijaksanaan ekonomi sangat penting untuk melakukan perubahan yang mendasar bagi stabilitas ekonomi dan politik khususnya.

Berikut dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa stabilitas makro ekonomi Malaysia di bawah kepemimpinan Mahathir dapat dijaga. Inflasi turun dari sekira 10% pada tahun 1981 (saat Mahathir mulai memimpin Malaysia) menjadi hanya sekitar 0,3% di tahun 1983. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan stabil juga terjadi pada hampir sepanjang dekade 1990-an. Sejak 1988 laju pertumbuhan selalu di atas 8% dan pada tahun 1989, 1990, 1994 dan 1995 bahkan di atas 9,0% pertumbuhan pendapatan per kapitanya merupakan salah satu yang tertinggi di Asia Pasifik kecuali tahun 1992 mencapai 7,8%. Sebagai akibatnya gerak pembangunan cepat laju pengangguran menurun dan pendapatan perkapita Malaysia meningkat secara signifikan (Pikiran Rakyat, 6 Februari 2004: 21). Mahathir tidak asal membuat rencana, karena hasil yang diperoleh sangat fantastis. Antara lain, tingkat kemiskinan disemua etnis turun drastis dari 49,30% pada tahun 1970 menjadi 15% pada tahun 1990. Selain itu tingkat pemilikan modal kalangan Melayu dalam dunia usaha terus naik dari 2,4% tahun 1970 menjadi 20,3% pada 1990. Angka kemiskinan penduduk juga menurun drastis dari 35% pada tahun 1982 menjadi 5% pada tahun 1992. (Pikiran Rakyat, 6 Februari 2004: 14).

Di dibandingkan dengan Malaysia, Indonesia juga mengalami krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 akan tetapi masalah yang ada di Indonesia lebih kompleks. Penggambaran keadaan di Malaysia di bawah pimpinan Perdana Menteri Mahathir Mohamad hampir sama dengan saat Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soeharto selama 32 tahun yang dikenal dengan pemerintahan orde baru. Terdapat beberapa kesamaan masalah yang dihadapi antara Malaysia dan Indonesia seperti kemiskinan, ras, suku, agama, krisis ekonomi dan lain sebagainya hanya saja dalam penanganan berbeda. Banyak faktor yang mempengaruhi usaha Indonesia untuk lepas dari krisis ekonomi.

Indonesia mengakui pemilikan individual atas faktor-faktor produksi, kecuali sumber daya-sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak

dikuasai oleh negara, sebagaimana diatur dengan tegas dalam Pasal 33 UUD 1945. Secara konstitusional dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi Indonesia bukan kapitalisme dan bukan sosialisme atau tepatnya sistem ekonomi campuran. (Dumairy, 1997: 33).

Sistem ekonomi campuran dengan persaingan terkendali merupakan sistem ekonomi yang agak tepat untuk mengelola perekonomian Indonesia. Akan tetapi dalam perkembangannya perekonomian Indonesia semakin bersifat liberal dan kapitalistik. Derasnya arus globalisasi bersamaan dengan bubarnya sejumlah negara komunis utama yang bersistem ekonomi sosialisme telah mengiringi Indonesia terseret arus kapitalisme. (Dumairy, 1997: 34).

Sejak era 1980-an, pembangunan ekonomi Indonesia cenderung mengabaikan sektor primer (pertanian). Di awal pemerintahan orde baru besarnya Produk Domestik Bruto nasional sekitar 70% berasal dari sektor pertanian dan memberikan tingkat kesejahteraan yang sangat signifikan. Lompatan kebijaksanaan makro ke sektor industri dan jasa ternyata sangat rapuh, karena justru lapisan bawah yang mayoritas di pedesaan tidak tersentuh oleh pembangunan. Dalam perjalanannya, kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto terus melorot sampai dengan tahun 2002, hanya tinggal 18%. Indonesia sebelum tahun 1984 merupakan importir beras terbesar di dunia, bahkan Indonesia merupakan negara pengimpor daging dalam jumlah yang besar. Pasar swalayan dibanjiri buah-buahan impor asal Thailand, Cina, dan Australia. Belum lagi devisa banyak dikuras untuk mengimpor kedelai 600.000 ton per tahun dan produk olahan. (Pikiran Rakyat, 6 Februari 2004: 20).

Semua kebijakan yang dikeluarkan telah memperburuk distribusi pendapatan antara pedesaan dan perkotaan serta migrasi tenaga kerja terampil dari sektor pertanian ke sektor industri di perkotaan. Ironisnya, lebih dari 70% penduduk Indonesia menggantungkan diri ke sektor pertanian. Yang lebih mengejutkan para pakar ekonomi bahwa di era krisis di mana seluruh sektor

pembangunan tumbuh negatif (banyak terjadi PHK massal) ternyata sektor pertanian masih tumbuh positif. Artinya sektor pertanian mempunyai daya tahan yang kuat terhadap krisis ekonomi. (Pikiran Rakyat, 6 Februari 2004: 20).

Berhentinya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 dan dibentuknya Kabinet Reformasi Pembangunan oleh Presiden Habibie, mempunyai implikasi yang amat luas dari segi politik, ekonomi, sosial dan kemasyarakatan. Ulasan ini dapat dianggap sebagai upaya untuk melihat dampak berkuasanya Presiden Soeharto dan akibatnya dengan munculnya Presiden Habibie. Karena sangat lamanya berkuasa secara sadar atau tidak sadar, sebenarnya terbentuk suatu ideologi yang untuk ringkasnya dapat dinamakan Soehartologi. (Sjahrir, 1999: 233).

Ciri-ciri dari adanya Soehartologi dari sisi pemerintahan dan kehidupan negara yaitu: *Pertama*, Legitimasi kata pembangunan yang mendapat nilai tambah kuat dengan duduknya para teknokrat dalam pemerintahan seperti Prof. Widjojo Nitisastro dan kawan-kawan yang dikenal luas sebagai *The Berkeley Mafia*. *Kedua*, Manajemen mikro ekonomi yang punya ciri-ciri peningkatan distorsi, orientasi yang *family friendly* dan hanya *market friendly* bila itu tidak bisa dicegah. Ciri ini sangat sulit untuk diharapkan keluar dan disebut sebagai Soehartologi secara mikro. Terlihat bagaimana cara teknokrat bergerak dalam masalah mikro seperti hutang swasta, kebijakan mikro perbankan, dan regulasi yang tetap masih luas menyebar di berbagai kegiatan usaha dalam sistem ekonomi Indonesia. *Ketiga*, Sikap otoriter dari sisi politik yang tidak sesuai dengan iklim reformasi. (Sjahrir, 1999: 233).

Era reformasi mensyaratkan transparansi atau keterbukaan seluas-luasnya yang disertai proses demokratisasi disegala bidang. Berhentinya Soeharto bukanlah berarti hilangnya Soehartologi, upaya untuk *reinveting the government* tidaklah terlaksana yang ada bukan reformasi tetapi reparasi. Latar belakang militer punya arti bagi Soeharto untuk mengendalikan dan mengembangkan

kekuasaan dalam arti *power*, dan tidak memaafkan para pengkritik yang tidak sejalan dengan pemikiran Soeharto. (Sjahrir, 1999: 247).

Dalam konteks Indonesia, format pembangunan yang dilakukan sejak awal memang telah diskenariokan untuk meletakkan bidang ekonomi sebagai prioritas yang harus tercapai, sehingga bidang-bidang lain harus diamankan dan diposisikan sebagai pendukung. Konsekuensi yang ada adalah paradigma “stabilitas politik” menjadi sumber utama dari pencapaian keberhasilan pembangunan ekonomi. Seluruh potensi konflik dibidang politik yang mungkin akan muncul harus dimandulkan sejak dini, karena jika konflik mencuat maka target pembangunan ekonomi bisa meleset. Instrumen-instrumen pengendali politik itu antara lain pembatasan ruang gerak pers, pewadahtunggalan organisasi profesi, pembatasan partai politik, sistem *floating mass* dan keleluasaan militer untuk masuk wilayah-wilayah sipil. (Ahmad Erani Yustika, 2002: 197-198).

Dengan jaminan stabilitas politik suatu kerangka umum pembangunan ekonomi domestik secara teratur dan terorganisir bisa dirancang dan dijalankan. Dalam hal ini investasi sebagai sumber pokok bagi pembangunan atau pertumbuhan ekonomi mendapatkan ruang dan jaminan yang lebih pasti, khususnya investasi luar negeri (*foreign investment*). Investasi asing baru bisa mengalir ke suatu negara jika jaminan stabilitas politik bisa didapatkan, karena hanya dengan begitulah mereka dapat menjalankan studi kelayakan bisnis secara rasional. Untuk konteks Indonesia, karena pada awal pembangunan dana yang dimiliki sangat terbatas, kehadiran utang luar negeri dan investasi asing sangat dibutuhkan. (Ahmad Erani Yustika, 2002: 198).

Pembangunan di Indonesia meletakkan sebuah pilihan bahwa sistem politik otoriter (dengan mengandalkan partisipasi masyarakat sangat minimal) sebagai pendukung pencapaian pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Pilihan strategi sistem politik otoriter menghasilkan pencapaian yang secara besaran ekonomi cukup mengesankan. Sampai tahun 1966 (sebelum krisis

ekonomi) pertumbuhan bisa dipatok rata-rata 7% per tahun, bahkan tahun 1995 mencapai 8,2% dan 1996 sebesar 7,8%. Tetapi kemudian terbukti kisah sukses pertumbuhan ekonomi tersebut menyimpan dua kelemahan yang sulit untuk diatasi. (Ahmad Erani Yustika, 2002: 198).

Pertama, sedikitnya ada 4 kritik penting menyangkut pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia: (i) pertumbuhan yang tinggi telah dicapai terutama oleh adanya pergerakan nilai tukar (*terms of trade*) yang menguntungkan; (ii) pertumbuhan ini terutama merupakan hasil dari eksploitasi sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui; (iii) meningkatnya utang luar negeri sebagai penopang ekspansi pada tahun 1980-an, setelah dukungan dari minyak menipis; dan (iv) argumen-argumen sehubungan dengan pertimbangan-pertimbangan distribusional, serta keprihatinan bahwa kaum kaya memperoleh manfaat terbesar dari pertumbuhan ekonomi. *Kedua*, persoalannya sekarang manajemen pembanguna yang dikontrol dengan sebuah pemerintahan otoriter telah menghasilkan krisis akumulatif yang berujung kepada hilangnya kepercayaan terhadap apapun yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga pemulihan ekonomi yang dirancang (walaupun secara teoritis ekonomi dapat dipertanggungjawabkan) direspons oleh masyarakat (domestik dan asing) dengan sikap negatif. (Ahmad Erani Yustika, 2002: 199).

Kasus di Indonesia memberi pelajaran penting bahwa pengelolaan masyarakat dalam iklim otoriter menciptakan biaya sosial-politik yang sangat besar, yakni terakumulasinya krisis kepercayaan masyarakat yang sulit untuk disembuhkan akibat praktik-praktik pemerintahan manipulatif dan tidak terkontrol. Selain itu, moral dari masyarakat Indonesia yang bernuansa Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) telah berurat akar bahkan seperti budaya membuat pemulihan ekonomi terhambat.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perekonomian Malaysia sebelum Mahathir Mohamad menempuh sejarah yang cukup panjang, perencanaan pembangunan di Malaysia lebih berorientasi pada usaha-usaha pencapaian laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan melakukan investasi besar-besaran dalam sektor pertanian, prasarana dan pembangunan pedesaan. Konflik rasial pecah pada tahun 1969, golongan masyarakat Melayu (Bumiputera) merasa tidak puas dengan hasil pembangunan yang dicapai. Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata lebih banyak menguntungkan golongan non-Melayu, sedangkan masyarakat Melayu semakin jauh tertinggal dalam proses pembangunan. Kebijakan ekonomi baru (*New Economic Policy*) merupakan suatu pola kebijaksanaan jangka panjang 20 tahun (1971-1990), berusaha memberikan peluang yang lebih besar kepada golongan Bumiputera untuk berperan serta dalam proses pembangunan, sehingga dalam jangka waktu 20 tahun kesenjangan yang terjadi antar ras khususnya Melayu dan Cina akan dapat dikurangi. *New Economic Policy* mempunyai tujuan ganda: *pertama*, menghapuskan kemiskinan di seluruh negeri tanpa memandang ras, agama dan sebagainya. *Kedua*, mengadakan perombakan struktur masyarakat sehingga tidak terdapat lagi kaitan antara ras dengan fungsi-fungsi ekonomi dan tempat tinggal.
2. Implementasi kebijakan Mahathir mengarah pada orientasi terhadap usaha memajukan tingkat kehidupan masyarakat Melayu yang juga dilandaskan pada program jangka panjang dari *New Economic Policy* yaitu usaha mengurangi bahkan menghapuskan kemiskinan serta mengadakan restrukturisasi masyarakat. Perhatian yang besar terhadap kehidupan masyarakat Melayu dan menuding Inggris sebagai penyebab utama dilema

Melayu dalam bidang perekonomian yang menjadi salah satu indikasi mengapa Mahathir cenderung atau berorientasi beralih ke Timur. Kebijakan Pandang Ke Timur (*Look East Policy*), Kebijakan Pembangunan Nasional dan Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (RRJP2) diharapkan dapat mencapai tujuan *New Economic Policy*. Mahathir dengan tegas mempertahankan kebijaksanaannya sekalipun banyak hambatan yang harus dihadapi dan memiliki orientasi yang luas kearah kemajuan Malaysia. Berbagai upaya dilakukan agar Malaysia tampil sebagai negara yang dahulu mengandalkan sektor agraris menjadi negara maju berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Kebijakan Mahathir Mohamad sangat berpengaruh terhadap perekonomian Malaysia, yaitu laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi rata-rata 7% per tahun, kemajuan dalam pemberantasan kemiskinan dan restrukturisasi masyarakat, peran Bumiputera dalam sektor ekonomi mulai nampak, pengangguran dikurangi dengan penciptaan lapangan pekerjaan lebih banyak, kemampuan sumber daya manusia yang handal dengan kemampuan berbahasa Inggris dan penguasaan teknologi komputer dalam berbisnis atau bekerja, pendapatan masyarakat Malaysia meningkat, bahkan saat terjadi krisis keuangan 1997-1998 Malaysia mampu bangkit kembali tanpa adanya campur tangan pihak lain dan tidak mengubah sistem ekonomi yang ada. Akan tetapi tidak semua target dapat dicapai dan dalam pelaksanaannya terdapat berbagai hambatan yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan yang dikeluarkan.

B. IMPLIKASI

1. Teoritis

Implikasi secara teoritis dari hasil penelitian ini, adalah peranan pemimpin bangsa dalam pembuatan berbagai kebijaksanaan sangat penting. Kekuatan atau ketangguhan yang dimiliki oleh pemimpin bangsa yang bersumber dari kemampuan untuk mencapai cita-cita bangsa dengan keberanian untuk memikul resiko yang mungkin terjadi sangat diperlukan. Adanya perbedaan dan perubahan orientasi serta gaya kepemimpinan tidak dapat dipisahkan dari karakteristik individual seorang pemimpin bangsa. Sosok seorang pemimpin yang memberikan perhatian besar terhadap kehidupan masyarakat yang dipimpinnya, berakibat pembuatan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan harus sesuai dengan kondisi masyarakat dan bangsa.

Perbedaan gaya kepemimpinan menimbulkan ketidakpuasan dari golongan atau elit tertentu dan dijadikan isu untuk menjatuhkan seorang pemimpin. Tempat dan latar belakang pendidikan seorang pemimpin berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, seperti perubahan orientasi ke Timur yang menganggap Barat tidak sesuai lagi untuk dijadikan contoh bagi pembangunan ekonomi dan politik negara. Kebijakan yang dikeluarkan diharapkan dapat mengatasi masalah kesukuan, rasial atau agama yang dihadapi oleh negara-negara berkembang yang memperoleh kemerdekaan setelah Perang Dunia II, karena kolonial telah menciptakan masyarakat kelas bawah di negeri sendiri. Program jangka panjang dibuat untuk mengurangi kemiskinan dan mengadakan restrukturisasi masyarakat. Perubahan pembangunan ekonomi dari agraris ke industri dilakukan agar tingkat kehidupan masyarakat kelas bawah khususnya dapat berkembang.

2. Praktis

Implikasi praktis dari hasil penelitian ini terhadap pendidikan yaitu sebagai seorang pemimpin haruslah memberi keteladanan dengan mempunyai

kekuatan dan ketangguhan serta cakap dalam memimpin. Pemimpin yang baik yaitu pemimpin yang mengutamakan kepentingan negara dan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun golongannya. Bagi tokoh politik lain agar menghilangkan segala sikap yang berbau feodal dan kolonial yang merugikan dan menindas rakyat serta membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan bangsa. Mahathir Mohamad merupakan figur pemimpin yang tegas dalam mempertahankan kebijaksanaan yang dibuat sekalipun banyak hambatan yang dihadapi dan memiliki orientasi luas kearah Malaysia sebagai negara maju tahun 2020.

Kontribusi penelitian ini terhadap dunia pendidikan formal adalah pengkayaan materi pelajaran bagi sekolah-sekolah tingkat menengah. Dalam hal ini, perkembangan sejarah luar negeri yang kebanyakan hanya membahas secara umum tidak spesifik. Bagi golongan intelektual khususnya mahasiswa, dapat meningkatkan kesadaran bahwa memiliki ilmu dan wawasan yang luas itu sangat besar manfaatnya. Dalam hal ini Mahasiswa dapat membandingkan keadaan yang terjadi di suatu negara lain dengan negara Indonesia yang dimungkinkan mempunyai kesamaan dalam sejarah perkembangan ekonomi dan politik khususnya. Indonesia mempunyai masalah tentang kesukuan, rasial, agama, kemiskinan dan mengalami krisis moneter yang hampir sama dengan Malaysia tetapi berbeda dalam penanganan, hal ini menjadi menarik untuk dikaji oleh mahasiswa dan para peneliti.

3. Metodologis

Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis. Pemilihan metode historis didasarkan pada pokok permasalahan yang dikaji yaitu peristiwa masa lampau untuk direkonstruksikan menjadi cerita sejarah, melalui pemilihan prosedur yang sistematis dengan menggunakan teknik-

teknik tertentu, pengumpulan bahan-bahan sejarah baik arsip, dokumen atau buku perpustakaan.

Keterbatasan penelitian ini adalah pencarian sumber yang berkaitan dengan obyek penelitian sulit di dapatkan. Kesulitan terletak pada tempat penelitian yang tidak memungkinkan untuk di kunjungi yaitu di Malaysia, sehingga sumber primer atau sumber lain yang relevan dengan penelitian terbatas. Selain itu penulis juga mengalami kesulitan dalam merekonstruksi menjadi sebuah cerita sejarah atau sejarah sebagai kisah, karena bahasa sumber yang ada yaitu Inggris dan Melayu. Penulis harus menterjemahkan bahasa sumber ke dalam bahasa Indonesia untuk memudahkan menyusun dan dapat dipahami dengan jelas.

C. Saran

1. Bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian lanjutan mengenai sejarah luar negeri khususnya Malaysia agar memfokuskan penelitian pada karakteristik kelompok elit dan sistem politik yang ada di Malaysia. Karena terdapat hubungan antara kelompok elit dan sistem politik dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh individual elit dalam hal ini Perdana Menteri Malaysia sebagai tokoh utama, agar dapat menghasilkan penemuan baru yang lebih luas sehingga dapat digunakan untuk menambah wawasan dan pengembangan ilmu sejarah.
2. Bagi pemerintah yang berkuasa hendaknya dapat mengambil pelajaran dari pengalaman negara lain bagaimana mengatasi suatu masalah, karena dimungkinkan terdapat kesamaan masalah yang sedang dihadapi oleh negara sendiri tetapi berbeda dalam penanganan.
3. Bagi para peneliti hendaknya memiliki kemampuan membaca dan memahami bahasa sumber atau bahkan menterjemahkan bahasa sumber yaitu bahasa

asing terutama bahasa Inggris untuk kalangan yang lebih luas agar lebih mudah dalam melakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Rahman Haji Abdullah. 1997. *Penjajahan Malaysia Cabaran dan Warisannya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ahmad Atory Hussain. 1996. *Politik dan Dasar Awam Malaysia*. Kuala Lumpur : Utusan Publication Distributor.
- Ahmad Erani Yustika. 2002. *Pembangunan dan Krisis*. Jakarta : Grasindo.
- Ahmad Sarji Abdul Hamid. 1995. *Malaysia's Vision 2020 Understanding The Concept, Implication and Challenges*. Kuala Lumpur : Pelanduk Publication.
- Arief, Sritua dan Raymond J. G. Wells. 1985. *Malaysia's New Economic Polic : Time for Stocktaking*. Asia Pasific Community. (30), 48-57.
- Budi Winarno. 2002. *Teori dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Bass, Jery. 1984. Februari. *Malaysia in 1982 : A New Frontier ?*. Asian Survey. Vol. XXIV. (2).
- Case, William. 1996. *Elte and Regim in Malaysia*. Australia : Monash Asia Institute.
- Dato' Abdul Rasyid Mahmud. 1999. *Managing Economic Crisis : The Malaysian ExperienceI*. Kuala Lumpur.
- David, Berri. 1981. *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta : CV. Rajawali.

- Drummond, Stuart. 1981. September. *Malaysia : The Generation Takes Over*. World Today.
- Dudung Abdurrahman. 1999. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta : Logos
- Dumairy. 1997. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Erlangga.
- Ensiklopedi Indonesia Seri Geografi*. 1990. Jakarta : PT. Intermedia.
- Gazalba, Sidi. 1981. *Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu*. Jakarta : Bhatara Karya Aksara.
- Gotschalk, Louis. 1986. *Mengerti Sejarah*. Jakarta : Universitas Indonesia Press. 1990. Jakarta: Depdikbud.
- Harold, Crouch. 1996. *State and Society*. Australia : Cornell University Press.
- Haryanto. 1982. *Sistem Politik Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.
- Helius Sjamsudin. 1996. *Metodologi Sejarah*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Husin Ali, S. 1985. *Rakyat Melayu Nasib dan Masa Depan*. Jakarta : PT. Inti Sarana Aksara.
- Jomo, Shamsulbahriah Ku Ahmad (terj.). 1988. *Pembangunan Ekonomi dan Kelas Sosial Di Semenanjung Malaysia*. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia.
- _____. K. S. 1991. *Masyarakat Malaysia Cabaran Sosio-Ekonomi*. Kuala Lumpur : INSAN.
- Kartini Kartono. 1988. *Pengantar Metodologi Research*. Bandung : Alumi.
- _____. 1990. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Khor Kok Peng. 1987. *Ekonomi Malaysia dan Kemerosotan*. Institute Masyarakat Malaysia.
- Kim, David. 1982-1983. *Malaysian Development Planning*. Pasific Affairs : Winter. Vol. 55. (4), 613-639.

- Kuntowijoyo. 1994. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Mahatir Muhammad. 1975. *Dilema Melayu*. Jakarta : Sinar Harapan.
- Machado, Kit G. 1987. Juni. *Malaysian Cultural Relations with Japan and South Korea in The 1980's*. Looking East. Asian Survey. Vol. XXVI. (6).
- Mayong, Lexy J. 1990 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosada Karya.
- Means, Gordon P. 1975. Malaysia dalam Robert N. Kearny (ed.). *Politics and Modernization in South and South East Asia*. New York : Schenkman Publishing Company Inc.
- Mestika Zed. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Milne, R. S & Diane K. Mauzy. 1980. *Politics and Government in Malaysia*. 2nd edn. Singapore and Van Couver : Times Books International and University of British Columbia Press.
- _____. 1986. Desember. *Malaysia Beyond The New Economic Policy*. Asian Survey. Vol. XXVI. (12), 1364-1382.
- Moh. Nazir. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Morais, J. Victor. 1981. *Hussein Onn A Trust With Desteny*. Singapore : Times Book Internasional.
- _____. 1984. *Mahathir-Profile in Courage*. Petaling Jaya : Eastern Universities Press Sdn. Bhd.
- _____. 1982. *Mahathir Riwayat Gagah Berani*. Kuala Lumpur : Arena Buku Sdn. Bhd.
- Nawawi. 1993. *Kepemimpinan yang Efektif*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Nik hasim Mustapa. 1989. *Dasar Ekonomi Malaysia*. Bangi : Universitas Kebangsaan Malaysia.

- Nugroho N. 1971. *Norma-norma Dasar Penulisan Sejarah*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Okposin, Samuel Basse & Cheng Ming Yu. 2000. *Economic Crises in Malaysia*. London : ASEAN Academic Press.
- Omar Syed Agil Al Alatas. 1995. *Wawasan Pembangunan Negara Tahun 2020*. Kuala Lumpur : Minda.
- Onong Uchjana Effendy. 1981. *Kepemimpinan dan Komunikasi*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Pamudji, S. 1993. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Pengantar Ilmu Ekonomi Buku Panduan Mahasiswa*. 1997. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sartono Kartodirjo. 1974. *Kepemimpinan dalam Sejarah Indonesia*. Yogyakarta : Balai Pembinaan Administrasi Universitas Gajah Mada.
- _____. 1993. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- _____. 1982. *Perbandingan Pemerintahan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Soejono Soekanto. 1993. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sjahrir. 1999. *Krisis Ekonomi Menuju Reformasi Total*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Sutopo, H. B. 1988. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Pusat Penelitian UNS.
- Soetrisno. 1984. *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Soleh Abdul Hak dan Tameah Muh. Tun. 2002. *Malaysia : Buku Resmi Tahunan 2002*. Jabatan Penerangan Malaysia.

- Sri Edi Swasono. 1985. *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Sukarna. 1990. *Perbandingan Sistem Politik*. Bandung : Media.
- Sumardi Suryabrata. 1994. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : CV. Rajawali.
- The Second Outline Perspective Plan 1991-2000*. 1991. Kuala Lumpur : National Printing Department.
- The Third Outline Perspective Plan 2001-2010*. 2001 Kuala Lumpur : National Printing Department.
- Tilman, Robert O. dan Jo H. Tilman. 1977. Februari *Malaysia and Singapore*, 1976 : A Year of change. Asian Survey. Vol. XVI. (2), 143-154.
- _____. 1976. *Third Malaysia Plan 1976-1980*. Kuala Lumpur : Government Printer.
- Tunku Abdul Rahman. 1969. *May 13 Before and After*. Kuala Lumpur : Utusan Melayu Press.
- UMNO 20 Tahun*. Kuala Lumpur : Ibu Pejabat UMNO Malaysia (tanpa tahun).
- Rivai, Veithzal. 2004. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Vision 2020 Malaysia : Towards Establishing A Fully Developed Nation*. 1997. Jabatan Penerangan Malaysia.
- Wariya, Chamil. 1988. *UMNO (Baru) Kelahiran dan Perkembangan Awalnya*. Kuala Lumpur : "K" Publishing & Distributors Sdn. Bhd.
- Winardi. 1986. *Pengantar Sistem-sistem Ekonomi*. Bandung : Penerbit Alumni.
- Sunindia, Y. W. & Ninik Widiyanti. 1988. *Kepemimpinan dalam Masyarakat Indonesia*. Jakarta : PT. Bina Aksara.
- Zakaria Haji Ahmad. 1986. Februari. *Malaysia in 1985 The Beginnings of Bagas*. Asian Survey. Vol. XXVI. (2).

B. Majalah dan Surat Kabar

- “Air Mata Kabinet Lepas Mahathir”. 2003. Oktober 30. *Jawa Pos*. 1. 14.
- Alektot, Alex. 1988. “Rencana Ambisi Malaysia Gagal, Industri Mobil Proton Rugi Terus”. November 20. *Suara Pembaharuan*. VII.
- “Anwar Mengecam Mahathir Siap Dituntut”. 2003. November 1. *Jawa Pos*. 14.
- “Badawi Gantikan Mahathir”. 2003. November 1. *Republika*. 1, 9, 14.
- “Barisan Nasional Diperkirakan Raih Mayoritas Kursi Parlemen”. 1986. Agustus 4. *Kompas*. I. XII.
- “Berlomba di Luar, Petik Kemenangan di Kandang”. 1992. September 12. *Tempo*. 22-24.
- “Era Baru Buat Che Dhet”. 1981. Juli 26. *Tempo*, 15-17.
- Erwin Kustiman. 2004. “Mahathir dan Role Model Kepemimpinan Asia”. *Pikiran Rakyat*. 6. 7.
- “Mahathir Berlibur Ke Laut Tengah”. 2003. November 1. *Jawa Pos*. 1. 14.
- “Mahathir Dukung Usulan PBS Ubah Konstitusi Sabah”. 1986. Mei 14. *Kompas*. I. XII.
- “Mahathir : Hati-Hati Dengan Obsesi Demokrasi”. 2003. Oktober 31. *Kompas*. 1. 11.
- Nasihi Masha. 2005. “Visi dan Jalan Mahathir”. Februari 5. *Kompas*. 2.
- “Pembela Melayu Berpaling Ke Timur”. 1992. September 12. *Tempo*. 25.
- “Sesudah Penangkapan Apa Lagi ?”. 1987. November 14. *Tempo*. 22-23.
- Teuku Rezasyah. 2004. “Negarawan Begawan”. Februari 6. *Pikiran Rakyat*. 1. 14.
- “Transformasi Perekonomian Malaysia”. 2004. Januari 28. *Pikiran Rakyat*. 6. 7.

“Warisan Mahathir, Keajaiban Ekonomi”. 2003. *Republika*. 9.

Widjaja, A.W. 1987. *Tinjauan UUD Indonesia Malaysia Singapura Konstitusi Perbandingan*. Jakarta : PT. Bina Aksara.

Yusdar Hilman. 2004. “Pertumbuhan dan Transformasi Ekonomi Malaysia”. Februari 6. *Pikiran Rakyat*. 20-21.

C. Sumber Internet

www.wikipedia.org, 23 November 2005

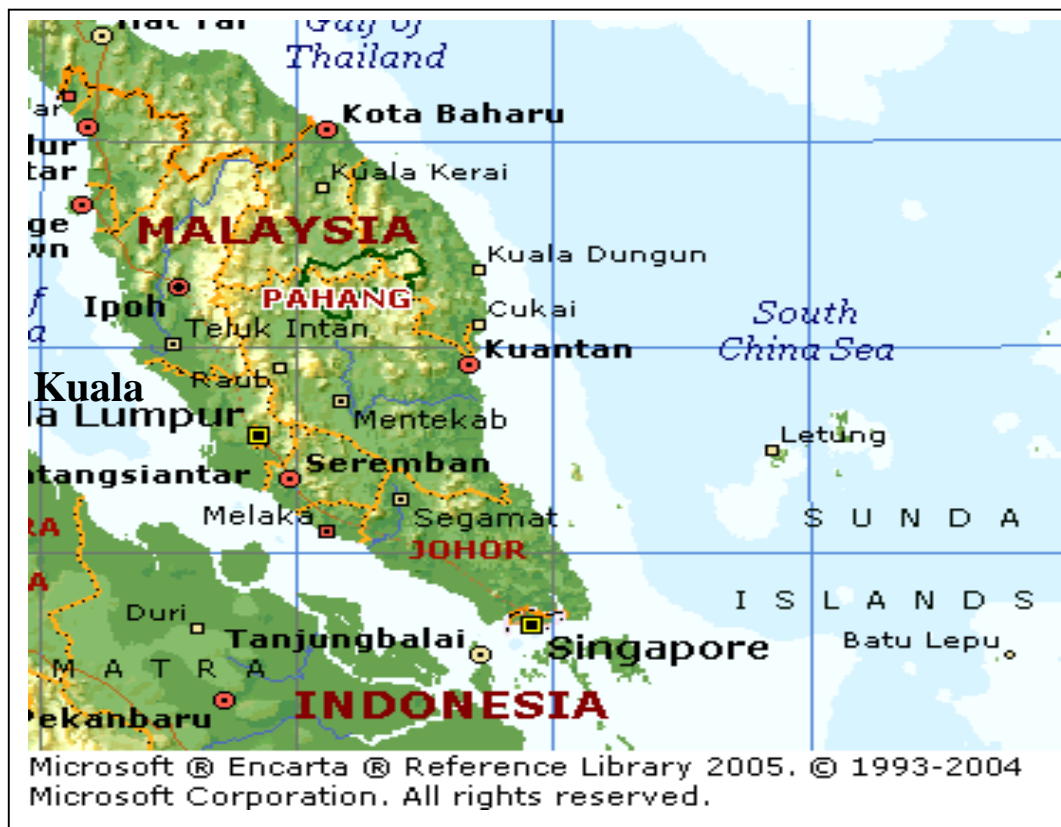
www.aleps.org, 26 Desember 2005

www.pmo.my.gov, 26 Desember 2005

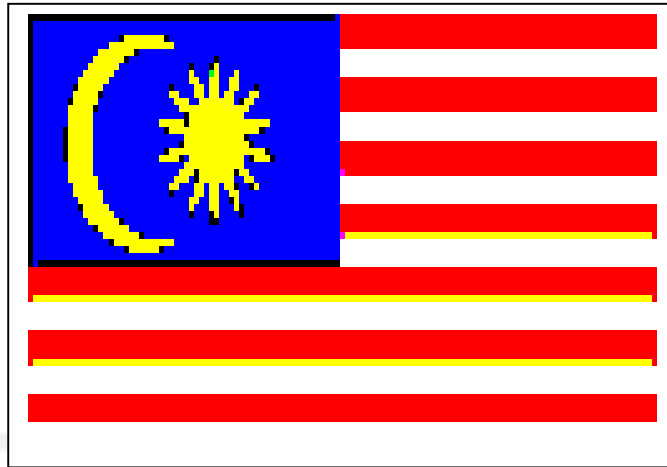
www.sabah.net, 26 Desember 2005

Lampiran 1.

Peta Negara Malaysia



Lampiran 3. Bendera Malaysia



Bendera Malaysia dikenal sebagai Jalur Gemilang, 14 jalur merah dan putih (melintang) yang sama lebar dengan jalur merah di sebelah atas dan berakhir dengan jalur putih di sebelah bawah, tanda keanggotaan yang sama dalam persekutuan 13 buah negeri Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Sabah, Sarawak, Selangor dan Terengganu dan Kerajaan Persekutuan.

Bagian yang berwarna biru tua di atas sebelah kiri ke bawah hingga atas jalur merah yang kelima maknanya perpaduan rakyat Malaysia. Bagian biru tua itu mengandung anak bulan tanda Agama Islam agama resmi Malaysia. Bintang pecah 14 itu tanda perpaduan 13 buah negeri dan Kerajaan Persekutuan. Warna kuning pada anak bulan dan bintang itu ialah warna Diraja bagi Duli-duli Yang Maha Mulia Raja-raja.

(Sumber : www.3dflags.com)

Lampiran 4. Lambang Negara Malaysia



Lambang Malaysia, atau *Jata Negara* menunjukkan bintang pecah 14 menandakan 13 buah negeri yang terkandung dalam Persekutuan Malaysia, dan Kerajaan Persekutuan, bintang bersama-sama anak bulan itu tanda Agama Islam - agama resmi Malaysia. Lima bilah keris itu tanda Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu dahulu (Johor, Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu).

Bagian sebelah kiri perisai itu (pokok Pinang) menandakan Negeri Pulau Pinang dan bagian sebelah kanan dengan pokok Melaka menandakan Negeri Melaka. Kedua-dua buah negeri ini adalah sebagian dari Negeri-negeri Selat dahulu. Dalam empat jalur yang sama besarnya dalam bagian tengah itu, warna-warna hitam dan putih ialah warna Pahang; merah dan kuning warna Selangor; hitam, putih dan kuning warna Perak; merah, hitam dan kuning warna Negeri Sembilan. Empat buah negeri ini ialah Negeri-negeri Melayu Bersekutu yang asal.

Tiga bagian di sebelah bawah itu menandakan Negeri Sabah di sebelah kiri dan Sarawak di sebelah kanan. Di tengah-tengahnya ialah Bunga Raya - Bunga Kebangsaan. Harimau-harimau yang ditunjukkan sebagai penumpang jata Negeri-negeri Melayu Bersekutu dahulu digunakan dalam Lambang Malaysia. Cogan, "Bersekutu Bertambah Mutu" ditulis dengan tulisan Rumi di sebelah kiri dan tulisan Jawi di sebelah kanan.

Warna kuning pada awan-awan itu ialah warna Diraja bagi Duli-duli Yang Maha Mulia Raja-raja.

(Sumber : www.Wikipedia.org)

Lampiran 5. Foto Mahathir Mohamad

